

ANALISIS CSIS

TAHUN XVIII, NO. 1
JANUARI-FEBRUARI 1989

Aspirasi Perdamaian

- Konsep Perdamaian dalam Sistem Internasional dan Strategi Nasional
- Garis Baru Politik Luar Negeri Uni Soviet: Menuju Ko-Eksistensi Damai dan Kerjasama
- Amerika Serikat - Jepang: Dari Pax Americana ke Pax Consortis?
- Garis-garis Besar Politik Luar Negeri Indonesia
- Menuju Normalisasi Hubungan Indonesia-Cina
- Dokumen: Ringkasan Peristiwa ASEAN



CENTRE FOR STRATEGIC AND INTERNATIONAL STUDIES

Analisis CSIS

Diterbitkan oleh CENTRE FOR STRATEGIC AND INTERNATIONAL STUDIES (CSIS) sebagai jurnal berkala untuk menyajikan tulisan-tulisan tentang berbagai masalah nasional dan internasional. ANALISIS adalah suatu forum terutama untuk para staf peneliti CSIS sendiri. Tetapi sumbangan tulisan dari luar CSIS akan dipertimbangkan untuk dimuat sesuai dengan kebutuhan. Isi tulisan-tulisan yang dimuat dalam ANALISIS sepenuhnya menjadi tanggungjawab pribadi penulis masing-masing.

Logo CSIS



Mulai tahun 1989 CSIS menggunakan logo baru: *Nalar Ajar Terusan Budi*. Logo berbentuk sebuah piringan cekung berukiran bola dunia yang melatarbelakangi gambaran orang tanpa busana duduk memangku buku terbuka beralaskan kain lampin. Tangan kiri menunjuk ke buku dan tangan kanan menunjuk ke atas menggambarkan orang yang sedang menguraikan pengetahuan yang ditimba dari buku. Ketelanjanan gambar orang di tengah piringan melambangkan keterbukaan budi -- tiadanya sikap a priori -- pada warga CSIS, seperti pada para analis umumnya, dalam kegiatan studinya. Gambar ini menunjukkan kegiatan belajar dan mengajar atau menguraikan pikiran, sebagaimana para analis CSIS melakukan studi dan menguraikan pikiran mereka kepada siapa saja yang membutuhkannya. Sedangkan bola dunia melambangkan alam jagad raya yang menjadi cakrawala dan lingkup CSIS berada dan berkarya. Kalimat *Nalar Ajar Terusan Budi* yang tertera pada lingkaran piringan adalah *surya sengkala*: cara merangkai kata dalam tradisi Jawa untuk menandai suatu tahun penting menurut peredaran matahari dan sekaligus menge-mukakan makna yang terkandung dalam peristiwa yang tahunnya ditandai itu. *Nalar* menurut tradisi Jawa itu berwatak 1, *Ajar* berwatak 7, *Terusan* berwatak 9, dan *Budi* berwatak 1. Sebagaimana lazimnya sengkala dibaca dalam urutan terbalik: 1971, tahun CSIS berdiri. Nalar Ajar Terusan Budi juga menggambarkan alam pikiran, dan hakikat kegiatan CSIS. CSIS sebagai lembaga profesi keilmuan, yang didukung oleh kreativitas individu, pada hakikatnya mempunyai kegiatan intelektual yang bukan hanya meng-analisa kebenaran tetapi juga terpanggil untuk menunaikan kewajiban sosialnya. Makna Nalar Ajar Terusan Budi adalah bahwa bagi CSIS, bernalar, belajar serta meng-uraikan pikiran adalah kelanjutan wajar dari budi yang arif. Logo dibuat oleh G. Sidharta dalam bentuk asli berupa piringan perunggu.

*Pemimpin Redaksi/
Penanggung Jawab*

Rufinus LAHUR

Dewan Redaksi

Daoed JOESOEOF, A.M.W. PRANARKA, J. Soedjati DJIWANDONO,
M. Hadi SOESASTRO, Harry TJAN SILALAHI, Jusuf WANANDI,
Clara JOEWONO, Kirdi DIPOYUDO, Djisman S. SIMANDJUNTAK,
A.R. SUTOPO

Redaksi Pelaksana

S. TJOKWARDOJO, Bambang WALGITO, Sunarto NDARU MURSITO,
Pambudi SAKSANA, Medelina K. HENDYTIO

STT

SK Menpen RI No. 509/SK/DITJEN PPG/STT/1978,
tanggal 28 Agustus 1978

ISSN

0126-222X



TAHUN XVIII, NO. 1, JANUARI-FEBRUARI 1989

Daftar Isi

• Pengantar Redaksi	2
• Konsep Perdamaian dalam Sistem Internasional dan Strategi Nasional <i>Daoed JOESOEF</i>	5
• Garis Baru Politik Luar Negeri Uni Soviet: Menuju Ko-Eksistensi Damai dan Kerjasama <i>Kirdi DIPOYUDO</i>	30
• Amerika Serikat-Jepang: Dari Pax Americana ke Pax Consortis? <i>Bantarto BANDORO</i>	39
• Garis-garis Besar Politik Luar Negeri Indonesia <i>Kirdi DIPOYUDO</i>	47
• Menuju Normalisasi Hubungan Indonesia-Cina <i>Endi RUKMO</i>	61
• Dokumen: Ringkasan Peristiwa ASEAN <i>Sudibyo, Djokosukokartarto & Yoyok Ariessusanto</i>	70

Pengantar Redaksi

CENTRE FOR STRATEGIC AND INTERNATIONAL STUDIES yang diwakili oleh M. Hadi Soesastro memperoleh kesempatan pertama untuk menerima "1988 Peace Messenger" (Piagam Utusan Perdamaian 1988) dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Piagam penghargaan ini diserahkan oleh Wakil Sekretaris Jenderal PBB, Urusan Politik dan Keamanan, Vasily Sovrancuk, di Markas PBB, New York. Piagam penghargaan serupa juga diberikan kepada dua lembaga dari Indonesia, yaitu Yayasan Karana dan Institut Keguruan Ilmu Pendidikan Muhammadiyah Jakarta, serta 57 lembaga lainnya dari 34 negara.

Penyerahan piagam penghargaan itu bertepatan dengan Hari Perdamaian Internasional yang diperingati di seluruh dunia pada tanggal 20 September 1988. Di tanah air piagam penghargaan diserahkan oleh Galai M. Magdi, Perwakilan Program Pembangunan PBB (UNDP) yang berkedudukan di Jakarta, masing-masing kepada Jusuf Wanandi mewakili CSIS, Seto Mulyadi mewakili Yayasan Karana, dan Agustiar mewakili IKIP Muhammadiyah, pada tanggal 10 Oktober 1988.

Dalam rangka itu, ANALISIS mengambil tema ASPIRASI PERDAMAIAIN untuk edisi Januari-Februari 1989. Lagipula turut menyegarkan kesadaran masyarakat bahwa perdamaian sangat bermakna bagi kehidupan manusia dan masyarakat antar bangsa di dunia.

Di mana pun manusia mendambakan perdamaian yang dibutuhkannya dalam arti bahwa perdamaian memungkinkan manusia hidup layak sebagai manusia, mengembangkan dirinya dan mewujudkan kesejahteraan lahir batinnya. Yang dimaksud bukanlah semata-mata tiadanya perang atau konflik bersenjata antar bangsa atau antar kelompok dalam satu negara, melainkan juga suatu pola kerjasama dan integrasi antar bangsa atau antar kelompok. Perdamaian antar bangsa yang mantab harus lebih daripada tiadanya perpeperangan. Ia menghapus kekerasan dan penyalahgunaan kekayaan serta kekuasaan. Ia harus terus-menerus memperluas kumpulan hukum internasional yang mengatur hubungan antar negara. Perdamaian

tidak bisa menghapus semua konflik kepentingan nasional tetapi harus menyediakan sarana-sarana untuk menyelesaikan sengketa-sengketa berdasarkan hukum dan keadilan. Lagipula perdamaian harus didasarkan atas kebenaran bahwa kepentingan-kepentingan pokok bangsa-bangsa tidak bantek melainkan merupakan kepentingan bersama semua bangsa yang dapat dimajukan dengan usaha bersama.

Kecenderungan dasar sejarah umat manusia ialah menuju penghapusan perang dalam bagian-bagian dunia yang semakin luas. Pertama perang dihentikan dalam wilayah suku; kemudian dalam wilayah negara; dan akhirnya antara bangsa-bangsa dalam kawasan yang luas seperti Skandinavia, Amerika Utara, dan kawasan ASEAN. Dengan dihapusnya perperangan dalam masyarakat yang semakin luas, peradaban berkembang. Hukum dikembangkan dan keadilan ditegakkan. Ilmu pengetahuan mencapai kemajuan-kemajuan dan kesenian-kesenian berkembang.

Selama 300 tahun lebih para filsuf dan negarawan Barat berusaha mengorganisasi suatu sistem perdamaian yang mantab. Gagasan hukum internasional berkembang secara perlahan-lahan. Demikian pun lembaga-lembaga internasional. Diperlukan Perang Dunia I untuk memaksa banyak bangsa mengorganisasi suatu instrumen perdamaian yang mantab berupa Liga Bangsa-Bangsa, tetapi sistem ini tidak bertahan lama. Diperlukan Perang Dunia II untuk menciptakan PBB, suatu organisasi dunia yang dimaksud untuk mewujudkan dan memperkuat perdamaian dan keamanan internasional. Lembaga ini telah banyak berjasa untuk memajukan perdamaian dan keamanan di dunia, tetapi sejauh ini tidak berhasil menghentikan perperangan untuk selamanya seperti diharapkan pada waktu pembentukannya. Alasan pokoknya adalah kenyataan bahwa negara-negara anggotanya tidak mempunyai kemauan politik untuk menggunakan potensi lembaga itu secara efektif.

Pada hakikatnya PBB adalah suatu instrumen esensial untuk memelihara perdamaian, meningkatkan keamanan dan mengembangkan kerjasama internasional demi kepentingan semua negara anggota. Piagamnya memberikan banyak kemungkinan untuk memelihara perdamaian dan keamanan internasional. Dengan bertindak berdasarkan ketentuan-ketentuannya, PBB telah memberikan banyak sumbangan untuk memperkuat perdamaian dan meredakan konflik-konflik internasional. PBB telah menyelamatkan umat manusia dari suatu perang dunia baru selama lebih dari empat dasawarsa. PBB telah mengambil banyak keputusan sehubungan dengan pemeliharaan keamanan internasional, perlucutan senjata, penghapusan kolonialisme dan pengembangan norma-norma hukum internasional yang disetujui negara-negara anggotanya. Khususnya Dewan Keamanan telah memainkan peranan penting dalam penyelesaian sejumlah sengketa internasional yang bisa mengobarkan perperangan.

Akan tetapi perlu dicatat bahwa sistem perdamaian dan keamanan PBB belum dimanfaatkan sepenuhnya, terutama karena negara-negara anggotanya tidak mempunyai kemauan politik untuk menggunakan potensinya secara penuh. Seperti kita ketahui, efektivitas PBB bergantung pada kesediaan para anggotanya untuk memenuhi kewajiban-kewajiban yang dibebankan pada mereka oleh Piagamnya untuk bekerjasama dan mencari suatu penyelesaian bilamana perdamaian dan keamanan internasional dalam taruhan. Kenyataannya, negara-negara anggota PBB tidak selalu sepakat mengenai penggunaan sarana-sarana yang digaris-

kan oleh Piagam untuk memungkinkan PBB memelihara perdamaian dan keamanan internasional secara efektif. Khususnya negara-negara besar sering kurang bersedia untuk bekerja-sama di PBB guna memperkuat keamanan internasional. Kecenderungan mereka untuk menafsirkan perkembangan-perkembangan di dunia dalam perspektif hubungan timbal-balik mereka sering mempersulit PBB menjalankan tugasnya, sehingga Dewan Keamanan tidak selalu mampu mengakhiri konflik. Selain itu banyak keputusan Dewan Keamanan tidak dilaksanakan.

ANALISIS menurunkan sejumlah karangan yang membahas isyu perdamaian dari berbagai sudut. Dalam karangan yang pertama, *Daoed Joesoef* membahas konsep perdamaian dalam sistem internasional dan strategi nasional. Kemudian *Kirdi Dipoyudo* menyoroti garis baru politik luar negeri Uni Soviet menuju ko-eksistensi damai dan kerjasama internasional. Karangan ketiga yang ditulis oleh *Bantarto Bandoro* membicarakan prospek hubungan Amerika Serikat-Jepang dan peralihan dari Pax Americana menjadi Pax Consortis yang melibatkan Amerika Serikat, Eropa Barat dan Jepang. Dalam karangan berikut, *Kirdi Dipoyudo* membahas garis-garis besar politik luar negeri Indonesia. *Endi Rukmo* dalam karangan yang terakhir membahas langkah-langkah yang diambil Indonesia menuju normalisasi hubungan dengan RRC dalam rangka usaha memperjuangkan terwujudnya tatanan dunia baru yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian dan keadilan sosial.

Sebagai kelanjutan penerbitan ANALISA April 1988 dalam nomor ini juga dimuat rangkaian ringkasan peristiwa tentang kegiatan ASEAN dari bulan Mei sampai dengan Agustus 1988. Ringkasan kegiatan ASEAN ini disusun oleh tim CSIS dibawah pimpinan *Sudibyo*, *Djokosukokartarto* dan *Yoyok Ariessusanto*.

Dengan ini kami beritahukan pula kepada pembaca dan pelanggan bahwa mulai Januari 1989 jurnal ANALISA mengalami perubahan wajah dan nama serta menggunakan logo baru CSIS: *Nalar Ajar Terusan Budi*. Penjelasan mengenai makna logo dicantumkan pada sampul bagian dalam jurnal. Perubahan perwajahan dilakukan melalui konsultasi dengan suatu biro iklan yang profesional di Jakarta, *Matari Inc*. Perubahan lain ialah bahwa jurnal ini akan terbit setiap dua bulan.

Tidak lupa kami menyampaikan penghargaan dan terimakasih atas pengertian dan bantuan para pembaca dan pelanggan selama ini.

April 1989

REDAKSI

Konsep Perdamaian dalam Sistem Internasional dan Strategi Nasional

Daoed JOESOEF

PENGANTAR

KONSEP ATAU PIKIRAN konseptual adalah citra yang dibentuk berdasarkan suatu konstruksi berpikir tertentu. Kalau pikiran konseptual ini dikaitkan dengan gagasan perdamaian atau damai tentunya diperlukan pula kejelasan tentang pengertian damai tersebut. Sedangkan pengertian ini begitu kompleks sehingga bila kita mencari definisinya kita segera terbentur pada suatu kemiskinan intelektual. Sebab bila definisi mengenai perang dengan segala variasinya telah banyak dikemukakan oleh para filosof, ahli teologi, ahli sejarah dan ahli hukum, definisi tentang damai itu sendiri sulit diketemukan.

Menurut pengamatan Geoffrey Blainey, untuk setiap penerbitan sebanyak seribu halaman tentang sebab-sebab perang terdapat kurang dari satu halaman yang langsung mengenai sebab-sebab perdamaian. Hasil pengamatan seperti ini kiranya diperkuat oleh John Lewis Gaddis yang berkesim-

pulan bahwa disiplin "peace studies" bahkan mengalami pula disproporsi yang sama: ia ternyata telah memberikan lebih banyak perhatian pada soal apa yang harus dilakukan untuk mengelakkan perang ketimbang pada soal yang sebenarnya sama pentingnya, yaitu mengapa perang sampai saat ini tidak terjadi padahal peluang untuk itu begitu banyak.

Sebenarnya soal-soal perang-tidak perang ini akan lebih mudah ditangani bila semua penelitian yang mencari sebab-sebab perang telah menghasilkan sesuatu yang mendekati konsensus tentang mengapa perang sampai terjadi. Sebab konsensus tersebut kemudian dapat diterapkan pada analisis periode pasca-1945 untuk mengetahui apa yang membuatnya berbeda dengan keadaan sebelum itu yang telah mencetuskan perang dunia sampai dua kali. Namun konsensus itu tidak pernah ada. Walaupun banyak analisis dari berbagai disiplin ilmiah telah menekuni masalah sebab-sebab perang tersebut selama bertahun-tahun, sebuah risalah yang dibuat baru-baru ini dari

semua karya tulis tersebut berkesimpulan bahwa pengertian manusia tentang perang masih tetap pada tingkat elementer. Belum ada satu pun teori sebab-sebab peperangan yang dapat diterima secara luas dan sedikit sekali persepkatan mengenai metodologi yang dapat dipakai untuk menemukan sebab-sebab tersebut.

Dalam sistem internasional sejak zaman Yunani Purba damai sudah dikaitkan dengan peperangan. "Tujuan satu-satunya dari peperangan," kata Aristoteles, "adalah perdamaian." Pada waktu itu kiranya sudah disadari bahwa "damai" adalah jauh lebih kompleks dari "perang," sebab bila untuk mencetuskan "perang" satu negara saja sudah dapat memulainya, untuk mewujudkan "damai" paling sedikitnya diperlukan dua negara. Maka itu konsepsi bangsa Rumawi mengenai perdamaian pada asasnya berupa suatu definisi perdamaian yang bersifat juridis dan politis. Bukankah perkataan Latin *pax*, yaitu damai, dekat sekali dengan ungkapan *pacisci* yang berarti *mengadakan suatu pakta*.

Baru Saint Augustinus yang mulai berusaha merumuskan sebuah definisi yang tersendiri tentang perdamaian, dalam artian tidak mengaitkannya sebagai acuan antitetis dari peperangan. "Damai," katanya, "adalah tata tertib dalam ketenteraman." Pengertian damai yang demikian ini, yang jelas sangat berbau filosofis dan etis, kiranya tidak hanya berlaku bagi perdamaian internasional tetapi juga bagi perdamaian nasional. Delapan abad kemudian pengertian damai tersebut dikemukakan kembali oleh Thomas Aquino ketika berusaha merumuskan teorinya tentang "peperangan yang adil" (a just war). Segi-segi moral dan moralitas dari perang dan damai dan dari hubungan antara keduanya mulai dikete-

ngahkan secara sistematis.

Sistem hubungan internasional pasca-Perang Dunia II yang berlaku sekarang, yang bukan merupakan hasil pendalaman pikiran dan disain dari siapa pun, yang tidak didasarkan atas tuntutan moralitas dan atas keadilan, tetapi lebih bersendikan pembagian dunia dalam berbagai lingkungan pengaruh secara artifisial dan arbitrer, dan yang tanpa peperangan mengandung antagonisme, dendam serta kebencian yang tak kunjung padam, anehnya, telah berusia lebih dari 40 tahun, jadi dua kali lebih lama dari sistem hubungan internasional pasca-Perang Dunia I. Bila demikian usianya ini hampir menyamai lamanya eksistensi sistem internasional abad-19 yang secara sadar dan sengaja dipikirkan dan didisain oleh Metternich dan Bismarck. Berbeda dengan sistem-sistem yang telah ada sebelumnya, setelah berlaku selama empat dasawarsa, sistem pasca-Perang Dunia II yang pelaku aktifnya jauh lebih banyak dan sistem kerja, kelembagaan serta masalah-masalahnya jauh lebih kompleks dari semua sistem yang pernah ada itu, anehnya, belum menunjukkan tanda-tanda desintegrasi. Keanehan ini pantas sekali, bahkan seharusnya, dijadikan bahan pemikiran kita tentang perdamaian kali ini.

Harus diakui bahwa hal ini bukan tidak pernah dipikirkan dan dibahas orang. Namun semua pembahasan dan pemikiran yang sudah-sudah pada umumnya dituntun oleh pengalaman aktual manusia yang terbatas pada operasi suatu sistem tunggal -- yaitu sistem keseimbangan kekuatan -- yang bekerja dalam rangka konfigurasi "multipolar" yang menandai politik internasional sampai Perang Dunia II atau dalam rangka konfigurasi "bipolar" yang menandai politik internasional sejak akhir Perang

Dunia II tersebut. Sistem-sistem alternatif, kalaupun ada, tetap merupakan konseptualisasi abstrak dalam pikiran para teoretisi dan karena itu kiranya kurang membantu kemajuan pengetahuan kita tentang sebab-musabab terjadi atau tidak perang atau damai dalam dunia real.

Maka itu daripada pikiran analitis kita kerahkan untuk merumuskan suatu teori tentang perdamaian guna dipakai sebagai asas penuntun dalam membangun suatu sistem hubungan internasional yang *peaceful*, mungkin kali ini jauh lebih berguna bila pikiran analitis itu kita pakai untuk menjelaskan mengapa selama 40 tahun terakhir ini sistem internasional yang berlaku tetap dilihat oleh suatu suasana damai. Memang istilah **damai** pasti bukan yang muncul terlebih dahulu dalam pikiran bila kita menelusuri sejarah dar periode 40 tahun terakhir ini. Secara jujur harus diakui bahwa selama periode ini telah terjadi pembuatan serta pemupukan senjata dalam jumlah dan daya destruksi yang paling besar dalam sejarah manusia, telah terjadi serangkaian perang terbatas yang cukup mematikan, telah terjadi banyak aksi kekerasan revolusioner yang bersifat etnik, religius dan perang saudara di samping perkembangan kasus-kasus kelaparan, bencana alam, kebodohan, ketidakadilan, dan lain-lain.

Apakah semua ini masih membenarkan kita untuk mengatakan adanya suasana **damai** dalam sistem hubungan internasional yang berlaku sekarang? Memang tidak, sebab tidak ada perperangan tidak dengan sendirinya berarti ada perdamaian. Tetapi walaupun begitu, walaupun penyelesaian pasca-Perang Dunia II ini bersifat sangat artifisial dan penuh ketidakadilan, kenyataan bahwa ia dapat bertahan selama hampir setengah abad-20, tidak mencetuskan suatu

perang dunia dan karena itu memungkinkan sebagian besar umat manusia melakukan usaha-usaha pembangunan di tempatnya masing-masing, kiranya cukup menarik untuk dikaji. Memang hal ini bukan merupakan dasar yang baik untuk bergembira, tetapi pasti merupakan hal yang pantas untuk dipelajari. Sebab biar bagaimanapun kita perlu berusaha memahami mengapa kekuatan besar yang disebut **damai** ini mampu *survive* selama lebih dari 40 tahun, mengapa perang besar-besaran (Perang Dunia III) tidak terjadi, berhadapan dengan provokasi yang begitu banyak. Dengan pemahaman tersebut kita lalu berusaha memikirkan apa-apa yang harus kita lakukan untuk meningkatkan situasi perdamaian yang diidam-idamkan.

Usaha pemahaman ini terang tidak mudah. Masalahnya pasti mengandung kesukaran-kesukaran metodologis tertentu karena biar bagaimanapun selalu relatif lebih mudah menyelami hal-hal yang memang terjadi ketimbang yang tidak terjadi.

Maka tulisan ini berturut-turut akan membahas kompleksitas sistem hubungan internasional pasca-Perang Dunia II, kemudian unsur-unsur stabilitas dalam sistem tersebut dan akhirnya pokok-pokok renungan strategi nasional.

KOMPLEKSITAS SISTEM HUBUNGAN INTERNASIONAL

Hubungan-hubungan antar negara-bangsa sejak akhir Perang Dunia II semakin lama menjadi semakin kompleks. Kompleksitas ini disebabkan oleh tiga hal pokok. Pertama, multiplikasi pelaku-pelaku di bidang

internasional, di antara mana persengketaan mungkin timbul; multiplikasi ini tidak hanya dalam artian jenis pelaku tetapi juga jumlah setiap jenis pelaku. Kedua, multiplikasi masalah yang dapat menjadi sebab dari persengketaan. Ketiga, multiplikasi cara dan peralatan yang dapat digunakan untuk memecahkan persengketaan di masa depan.

MULTIPLIKASI PELAKU

Negara-Bangsa

Sampai akhir Perang Dunia I, sebagai pelaku di bidang hubungan internasional, kita hanya mengenal apa yang kini disebut sebagai negara-bangsa yang merdeka dan berdaulat. Kalau kita batasi pada faktor ini sebagai pelaku, jumlahnya kini sudah berlipat ganda. Kalau pada akhir Perang Dunia II jumlah negara-bangsa di sekitar angka 50, dewasa ini jumlahnya tidak kurang dari 159, jadi sudah berlipat ganda menjadi tiga kali, di satu bulatan bumi yang besar dan luasnya tidak berubah.

Lembaga-lembaga Internasional

Pelaku kedua di bidang hubungan internasional adalah lembaga-lembaga internasional yang kini jumlahnya ditaksir tidak kurang dari 200 buah dan mempekerjakan kira-kira 500.000 pejabat internasional yang tidak tunduk pada hukum dan ketentuan nasional dari mana mereka datang. Mereka ini sudah merupakan satu kelas pekerja tersendiri yang hidup dan bekerja menurut ketentuan-ketentuan yang banyak sedikitnya mereka rumuskan sendiri dan kemudian mendapat sanksi dari lembaga internasional yang bersangkutan.

Badan-badan Transnasional

Pelaku yang ketiga adalah badan-badan transnasional seperti multinational corporation (MNC), gerakan politik yang mendasarkan diri pada ideologi ataupun doktrin politik yang sama, kelompok keagamaan, Amnesty International, dan lain-lain.

Lembaga-lembaga Penelitian

Pelaku yang keempat berupa lembaga-lembaga penelitian di berbagai bidang kehidupan manusia: ekonomi, bisnis, teknologi, sosial, politik, kebudayaan, yang cara bekerjanya banyak sedikitnya bersifat akademis, kalaupun tidak ilmiah, dan jumlahnya kini ditaksir tidak kurang dari 10.000 buah.

Perseorangan

Pelaku kelima adalah perseorangan, baik yang tergabung dalam gerakan revolucioner ataupun teroris sehingga, secara analitis, dapat digolongkan sebagai *sub-national actors*, tetapi aksi dan tindakannya bersifat lintas nasional, maupun yang tergabung dalam gerakan analisis dan pemikiran seperti "Club of Rome." Belakangan ini muncul "The Great Peace Journey," suatu gerakan perdamaian yang dibentuk oleh perseorangan, yang diterima oleh pejabat Dirjen Politik Deplu pada tanggal 20 Oktober 1986, untuk mendengarkan gagasan yang mereka sebut sebagai "The Five Questions."

Manusia-manusia pribadi ini bertindak atas nama dan menurut keyakinan dan pertimbangan pribadi masing-masing yang kadangkala belum tentu sejalan dan sesuai dengan pandangan dan pendirian yang dipe-

gang oleh negara-bangsa dari mana mereka berasal. Namun tindakan ataupun buah pikiran mereka langsung menyangkut hal ataupun masalah yang menjadi kepentingan negara-bangsa masing-masing. Dipandang dari sudut ini, kehadiran dan kegiatan pelaku perseorangan di bidang hubungan internasional ini telah membuat diplomasi tidak hanya berupa diplomasi etatik, diplomasi antar negara, tetapi diplomasi individual.

Pada tahun 1977, di kota Jenewa saja, menurut taksiran telah terjadi 1.026 pertemuan berupa seminar, konferensi, simposium, di bidang ilmu dan teknologi dan melibatkan tidak kurang dari 52.000 orang sarjana dan tenaga ahli. Mereka ini sesekitnya telah menyelesaikan 14.000 pertemuan kerja berupa diskusi atas dasar tanggung-jawab pribadi masing-masing, bersama-sama 20.000 pejabat lembaga internasional yang datang dari 110 lembaga internasional.

MULTIPLIKASI ISYU DAN MASALAH

Multiplikasi ini sebagian merupakan akibat dari multiplikasi pelaku yang disebut di atas tadi. Demikian rupa sehingga sebagian masalah dan isyu timbul dan berkembang sebagai akibat interaksi antara pelaku dan akibat yang ditimbulkannya.

Kekaburhan Batas

Untuk bagian lainnya, multiplikasi masalah dan isyu ini timbul, pertama, dari kenyataan bahwa batas politik sesuatu negara-bangsa, di dalam mana ia berdaulat dan mempunyai wewenang sepenuhnya, tidak lagi bersamaan dengan batas ekonomi

yang terus bergeser sampai melewati batas (ekonomi) nasional masing-masing.

Interdependensi

Multiplikasi masalah, kedua, timbul dari kenyataan bahwa manfaat yang dapat ditarik dari masing-masing negara dari perkembangan ekonomi dunia tidak sebanding; interdependensi yang semakin mendalam mengakibatkan tingkat kepekaan dan kerawanan yang berbeda-beda. Interdependensi yang asimetrik membuat derajat saling tergantungan tidak sama.

Internasionalisasi Masalah Nasional

Ketiga, timbul dari kenyataan bahwa ada isyu yang dahulu dianggap semata-mata sebagai masalah nasional, kini dijadikan masalah internasional. Misalnya masalah di bidang makanan, sumber energi, pendidikan, ilmu pengetahuan, penduduk, hutang, dan lain-lain.

MULTIPLIKASI CARA PEMECAHAN MASALAH

Aneka Ragam Cara dan Alat

Dengan multiplikasi cara dan peralatan dimaksudkan kenyataan bahwa semakin banyak negara-bangsa yang memiliki peralatan dan berkemampuan untuk menggunakan kekuatan peralatannya terhadap negara-bangsa lain sebagai cara memecahkan masalah seperti yang dikehendakinya. Di samping peralatan berupa senjata yang semakin meningkat jenisnya dan peningkatan daya menghancurkan dari setiap jenis senjata,

mereka dapat pula menggunakan sarana lain, ekonomi misalnya: dari pembatasan di bidang impor yang sudah merupakan cara tradisional untuk keperluan ini sampai pembatasan di bidang transaksi moneter dan kredit, dari embargo di bidang bahan baku dan bahan mentah sampai ke embargo bahan makanan untuk kepentingan politik dan diplomasi internasional.

Intensifikasi Kekuasaan dan Kerawanan

Alasan lain mengapa multiplikasi cara dan peralatan di bidang hubungan internasional perlu disadari adalah pertama, karena penyebaran dan intensifikasi kekuasaan yang dapat ditimbulkannya; kedua, meningkatnya kerawanan banyak negara-bangsa terhadap pengaruh ataupun tekanan dari luar dirinya. Kedua perkembangan ini memang sepantas lalu sering mengimbangi atau saling menetralisasi berhubung yang pertama memungkinkan sesuatu negara untuk menjadi lebih peka karena ia menjadi lebih tergantung pada perkembangan di luar dirinya sendiri.

UNSUR-UNSUR STABILITAS DALAM SISTEM HUBUNGAN INTERNASIONAL

Teori sistem dapat memberikan kepada kita suatu pangkal tolak yang berguna untuk merenungkan sifat dan pembawaan hubungan-hubungan internasional sejak tahun 1945. Menurut para ilmuwan politik, suatu sistem internasional terwujud bila bertemu dua kondisi. Pertama, terdapat interkoneksi antara unit-unit di dalam sistem yang bersangkutan sehingga perubahan-perubahan yang terjadi di beberapa bagiannya akan mengubah pula bagian-bagian lainnya. Ke-

dua, tingkah-laku kolektif dari sistem sebagai keseluruhan berbeda dari harapan dan prioritas dari unit-unit individual yang membentuk sistem tersebut.

Tambahan lagi teori sistem memberikan kepada kita kriteria untuk membedakan konfigurasi politik yang stabil dan yang tidak stabil. Ia kiranya dapat pula membantu menjelaskan fakta mengapa sistem-sistem internasional tertentu dapat bertahan lebih lama dari yang lain-lainnya. Karl Deutsch dan J. David Singer mendefinisikan *stabilitas* sebagai "kemungkinan bahwa sistem yang berlaku tetap memiliki semua ciri-ciri pokoknya: tidak satu pun bangsa menjadi dominan; hampir semua anggotanya terus hidup; perang besar-besaran tidak terjadi."

Ciri khas lainnya lagi dari sistem tersebut, menurut mereka, adalah bahwa ia memiliki kemampuan mengatur sendiri (*self-regulation*), yaitu kesanggupan membalikkan stimuli yang pada mulanya mengancam keselamatannya. Bekerjanya *self-regulation* ini dapat dikatakan sama dengan pembawaan *negative feedback*. Berbeda dengan *positive* atau *amplifying feedback*, *negative feedback* berkenaan dengan gejala *self-correction*, yaitu bila stimuli ke suatu arah tertentu meningkat, sistem yang bersangkutan membangkitkan respons yang menurun terhadap stimuli itu dan semakin lama semakin memperkuat kecenderungan membalikannya kembali.

Bila *self-regulating system* berkemampuan mengatur sendiri, seperti yang dilakukan oleh pilot otomatik di sebuah pesawat terbang atau oleh alat pengatur mesin uap, kebalikannya -- *self-aggravating system* -- berpembawaan membuat semakin parah keadaan, yaitu situasi yang tidak lagi terkendali seperti: kebakaran hutan, kecandu-

an narkotik, peningkatan inflasi, fissi nuklir dan perang habis-habisan. Mekanisme pengaturan sendiri akan berfungsi dengan baik bila struktur dari sistem itu memang mencerminkan cara pembagian kekuasaan yang sepadan di antara negara-negara anggotanya, bila terdapat persetujuan yang mendasar di antara negara-negara terkemuka di dalam sistem mengenai tujuan-tujuan yang ingin mereka pertahankan dengan berpartisipasi di dalamnya, bila terdapat prosedur yang telah disepakati bersama mengenai cara mengatasi perbedaan-perbedaan di antara sesama mereka.

Selain dengan stabilitas, perdamaian berkaitan pula dengan sekuriti (keamanan/kepastian), karena ia adalah dasar dari gagasan damai itu. Sekuriti ini mendorong pencarian naluriah manusia untuk menciptakan suatu suasana manusiawi dan suatu lingkungan yang melindungi. Maka itu sejak zaman prasejarah makhluk manusia telah berusaha menemukan tempat dan cara berlindung dari kebuasan binatang, dari bahaya alam dan dari gangguan-gangguan yang berasal dari sesamanya.

Menurut Ibnu Khaldun manusia adalah satu-satunya makhluk yang memerlukan suatu otoritas untuk hidupnya. Tanpa otoritas ini manusia tidak akan dapat sejahtera dan bahkan tidak akan dapat hidup, sebab peranan otoritas adalah menyelenggarakan baik pertahanan ekstern maupun tata-tertib intern.

Dalam menentang Freud, psikoanalisis Adler berpendapat bahwa lubuk jiwa manusia bukan dikuasai oleh kesenangan (libido) tetapi oleh hasrat sekuriti. Memang manusia adalah makhluk yang mencari kepuasan tetapi kepuasannya yang terbesar adalah memperoleh sekuriti. Trauma, ketakutan,

kekerasan, agresi, penghinaan, mengancam sekuriti dan pangkal dari sebagian terbesar gangguan jiwa (neurosis) dan rasa rendah diri. Rasa seperti itu menggerakkan reaksi, tingkah-laku dan kebutuhan terhadap kompensasi, perlindungan dan perbaikan.

Maka bila stabilitas dan sekuriti dianggap dasar dari gagasan perdamaian dalam hubungan antar bangsa, pengkajian kita harus dimulai dengan membedakan struktur sistem internasional yang ada dari sudut kelakuan bangsa-bangsa yang membentuk sistem itu. Sebab kelakuan saja tidak akan menjamin stabilitas jika prasyarat-prasyarat struktural yang diperlukan tidak ada, tetapi sebaliknya dalam kondisi-kondisi tertentu struktur dapat memaksakan stabilitas walaupun tingkah-laku yang diperlukan sebagai prasyarat untuk itu sangat diragukan keadaannya. Hal ini kiranya menjadi jelas bila kita bandingkan penyelesaian Perang Dunia II di tahun 1945 dengan penyelesaian yang pernah dilakukan untuk Perang Dunia I di tahun 1919.

Andaikata yang menentukan itu hanya sikap dan tingkah-laku para negarawan, maka Konferensi Perdamaian Paris 1919 pasti akan membawa Eropa memasuki suatu zaman yang stabil seperti yang pernah dilakukan hampir seabad sebelumnya oleh Kongres Wina. Semua diplomat yang datang berunding ke Paris ketika itu sudah menyadari sepenuhnya bahwa perang bukan sekali-kali merupakan wasit dalam persengketaan antar bangsa. Lebih-lebih tokoh yang paling berpengaruh di antara mereka, Woodrow Wilson, sudah bertekad untuk melangkah lebih jauh lagi dari praktik "diplomasi klasik" dengan jalan memadukan moralitas dan asas-asas keadilan pada kekuatan dan kekuasaan.

Sayangnya dalam berbuat begitu Perse-
tuan Versailles mengabaikan realitas ke-
kuatan. Persetujuan ini memecah-belah
Kerajaan Austro-Hongaria -- yang memang
sesuai benar dengan aspirasi kebangsaan
dari kelompok-kelompok tertentu yang selama
ini hidup di wilayah Kerajaan tua itu --
tetapi lalai melengkapi negara-negara peng-
gantinya seperti Polandia, Cekoslovakia,
Austria dan Hongaria, dengan kekuatan mi-
liter dan ekonomi yang diperlukan untuk
menopang kedaulatan yang baru mereka
tegakkan itu. Tambahan lagi persetujuan
tersebut tidak berusaha melayani kepenting-
an dari dua bangsa, dalam hal ini Rusia dan
Jerman, yang penduduk dan kekuatan in-
dustrinya pasti mampu memberikan kepada
mereka pengaruh yang besar atas perkem-
bangunan Eropa. Maka itu tidak mengheran-
kan bila keruntuhan sistem Versailles di
tahun 1939 adalah hasil dari tawar-menawar
dengan mengorbankan Eropa Timur oleh
kedua negara besar tersebut, yang kekuatannya
telah diabaikan 20 tahun sebelumnya
demi tegaknya keadilan.

Lain halnya dengan penyelesaian Perang
Dunia I (1919) tersebut di atas, penyelesaian
Perang Dunia II (1945) tidak berpretensi se-
bagai wujud kemenangan atas keadilan. Pe-
nyelesaian ini malah dengan seenaknya
membagi-bagi negara-negara berdaulat se-
pererti Jerman, Austria, dan Korea, bukan
karena pembagian ini dianggap tepat, tetapi
karena antara Amerika Serikat dan Uni So-
viet tidak pernah ada kata sepakat mengenai
tentara siapa yang harus ditarik lebih dahulu
dari ketiga negeri yang mereka duduki bersama-sama. Penyelesaian ini juga tidak men-
cegah dimasukkannya beberapa negeri yang
kemerdekaannya diakui oleh penyelesaian
tahun 1919 ke dalam lingkungan pengaruh
Rusia hingga saat ini, termasuk Polandia,

yang untuk mempertahankan kemerdekaan-
ya itu Inggris bersedia menghunus senjata
di tahun 1939. Sebagai imbangannya, penye-
lesaian ini membiarkan pula pembentukan
lingkungan pengaruh Amerika di Eropa
Barat, Lautan Tengah dan Lautan Teduh,
walaupun negara-negara yang tercakup di
dalarnya jauh lebih bebas, merdeka dan
berdaulat daripada yang termasuk dalam
lingkungan pengaruh Rusia.

Ternyata sistem internasional hasil pe-
nyelesaian tahun 1945 dapat bertahan sam-
pai sekarang, jadi sudah berumur dua kali
umur sistem yang diciptakan oleh penyele-
saian tahun 1919. Maka ada baiknya kita
tinjau unsur-unsur struktural dan unsur-
unsur kelakuan dari stabilitas.

UNSUR-UNSUR STRUKTURAL DARI STABILITAS

Unsur-unsur struktural dari stabilitas
dalam sistem internasional yang berlaku se-
karang ini adalah bipolaritas, kemandirian
dan pengaruh dalam negeri pada pelaksana-
an diplomasi.

Bipolaritas

Cara Perang Dunia II diselesaikan oleh
para negara pemenang di tahun 1945 mem-
buat situasi internasional "mencuat menjadi
suatu tontonan primitif dari dua raksasa
yang saling mengawasi dengan tatapan yang
penuh curiga," demikian tulis Hans Morgen-
thau di tahun 1948. "... Maka hadang atau
dihadang, kuasai atau dikuasai, hancurkan
atau dihancurkan menjadi pegangan dari
diplomasi baru."

Polarisasi kekuatan ini begitu sungguhan

sehingga dapat dikatakan yang pertama kali terjadi dalam sejarah modern. Pengalaman dunia memang agak terbatas mengenai sistem bipolar di zaman lampau. Dahulu memang ada rivalitas antara Athena dan Sparta, ada antagonisme antara Roma dan Kartago. Tetapi semua ini merupakan konflik regional, bukan global. Baru mulai tahun 1945 dapat dikatakan bahwa dunia ini terbagi antara dua lingkungan pengaruh yang saling bersaingan atau bahwa ada dua adikuasa yang mengontrol kedua lingkungan tersebut.

Sebenarnya sejak saat itu sampai sekarang ini ada yang berpendapat bahwa bipolaritas merupakan suatu cara yang berbahaya dalam mengorganisasikan politik dunia. Logika geometri yang sederhana saja dapat mengatakan bahwa suatu sistem yang bersendikan tiga atau lebih penopang akan jauh lebih stabil daripada yang hanya bertopang pada dua sendi. Namun politik bukan geometri. Perjalanan waktu dan tumpukan pengalaman ternyata mengungkapkan adanya beberapa unsur struktural dari stabilitas dalam sistem bipolar dari hubungan internasional yang tidak terdapat dalam sistem multipolar yang telah mendahuluinya sebelum Perang Dunia II dan Perang Dunia I.

Unsur-unsur tersebut adalah:

(i) Sistem bipolar pasca-1945 secara realistik mencerminkan kenyataan tentang keberadaan kekuatan militer pada akhir Perang Dunia II dan yang tetap tidak berubah hingga kini. Hal ini jelas berbeda dengan penyelesaian tahun 1919 yang hampir tidak berusaha melayani kepentingan-kepentingan Jerman dan Rusia.

(ii) Struktur bipolar yang ada ini relatif begitu sederhana sehingga untuk mempertahankan

hankannya tidak memerlukan kepemimpinan yang canggih. Runtuhnya sistem besar multipolar dari abad-19 justru karena keadaannya yang serba ruwet. Untuk mempertahankan keutuhannya diperlukan seorang Metternich atau seorang Bismarck. Begitu tokoh-tokoh sekaliber ini tidak ada lagi, sistem yang ruwet itu menjadi berantakan.

(iii) Karena strukturnya yang relatif sederhana, persekutuan dalam sistem bipolar cenderung menjadi lebih stabil ketimbang aliansi yang pernah ada di abad-19 dan di periode 1919-1939. Organisasi Persekutuan Atlantik Utara (NATO), misalnya, ternyata dapat menyamai usia aliansi yang terlama dari semua aliansi sebelum Perang Dunia I, yaitu antara Jerman dan Austro-Hongaria. Usianya sekarang ini bahkan telah lebih dari dua kali usia aliansi Perancis-Rusia yang dahulu dan pasti mengatasi usia semua persekutuan yang pernah dibentuk antara Perang Dunia I dan Perang Dunia II. Usia lawan pokoknya, Pakta Warsawa, dapat dikatakan sama saja. Kemantapan ini kiranya disebabkan oleh kenyataan bahwa aliansi adalah produk dari ketidakamanan (insecurity). Selama Amerika Serikat dianggap merupakan sumber ketidakamanan dunia oleh dan bagi Uni Soviet atau sekutu-sekutunya dan demikian pula sebaliknya, maka kedua adikuasa tidak akan mengalami kesulitan untuk mempertahankan keutuhan aliansi masing-masing. Di dalam suatu sistem multipolar, sumber ketidaksamaan dapat berubah dengan cara yang sangat kompleks. Maka itu kita lihat aliansi berubah-ubah demi penyesuaian diri pada variasi yang ada.

(iv) Bipolaritas tidak menutup kemungkinan pembelotan anggotanya. Sejauh yang mengenai Amerika Serikat: Cina, Kuba, Vietnam, Iran, dan Nikaragua. Yang mem-

belot dari Uni Soviet: Yugoslavia, Albania, Mesir, Somalia dan Cina. Mungkin karena stabilitas yang menyeluruh dari sistem persekutuan pokok ini pembelotan-pembelotan dari masing-masing kubu, yang memang ada terjadi selama berlangsungnya Perang Dingin, dibiarkan saja karena tidak terlalu mengganggu seperti halnya pada suatu sistem multipolar yang keseimbangannya relatif rawan.

Bila struktur bipolaritas dalam dirinya mendorong stabilitas, ada ciri-ciri inheren dari hubungan bilateral Amerika-Soviet yang kiranya tambah memperkuat dorongan itu, yaitu mengadakan hubungan tanpa menjadi saling tergantung dan adanya kaitan antara struktur dalam negeri dan diplomasi.

Hubungan Amerika-Soviet merupakan suatu hubungan dengan tetap mempertahankan kemandirian masing-masing dan bukan untuk menjadi saling tergantung satu dengan lainnya, walaupun kedua negarabangsa ini begitu luas terlibat dengan seluruh bagian dunia. Jadi yang mereka pupuk dan jaga adalah suatu hubungan dalam independensi dan bukan hubungan dalam interdependensi.

Bentuk hubungan yang seperti itu kiranya berkaitan dengan tempat kedudukan kedua negeri di sisi yang berlainan dari bumi ini: jarak pemisah geografis yang relatif jauh di antara mereka memberikan sedikit sekali kemungkinan untuk mempersengketakan wilayah perbatasan seperti yang pernah terjadi mengenai Alsas-Lorraine, Korridor Polandia, Tepian Barat (Sungai Jordan), Gaza Strip dan Yerusalem. Di daerah-daerah di mana tentera Rusia dan Amerika, atau dari sekutu masing-masing, langsung saling berhadapan, mereka mendirikan

batas-batas artifisial, seperti zona militer di Korea dan Tembok Berlin. Di bidang ekonomi, walaupun Uni Soviet mengimpor sejumlah besar bahan makanan dari Amerika, tetapi tidak dapat dikatakan bahwa hidupnya menjadi sangat tergantung pada komoditi tersebut. Dipandang dari sudut stabilitas internasional kiranya baik sekali bahwa kedua bangsa yang paling kuat di dunia ini adalah juga yang paling berswasembada.

Ada hubungan antara struktur dalam negeri dengan tingkah-laku terhadap luar negeri atau diplomasi. Di Amerika Serikat ada kehendak yang disebut *open door expansionism*, yaitu mengaitkan struktur ekonomi nasional dengan politik luar negeri mengingat kehidupan kapitalisme menuntut kegesitan mencari bahan-bahan baku, pasar dan kesempatan-kesempatan investasi di luar negeri. Sejalan dengan ini ada pula usaha-usaha komplementer berupa "corporatism," yaitu kerjasama antara dunia usaha, tenaga kerja dan pemerintah untuk menciptakan suatu lingkungan, atau paling sedikitnya suasana, yang sepadan di luar negeri. Bila diteliti lebih dalam *open door expansionism* ternyata mengelakkan konfrontasi militer. Gagasan kerjanya merupakan suatu cara meluaskan sistem internal Amerika ke seluruh penjuru dunia tanpa kekerasan dan tanpa inefisiensi dari kolonialisme tradisional. Dengan perkataan lain, ia dirumuskan dan didisain untuk meraih kemenangan tanpa perang. "What is good for General Motor is good for the United States, what is good for the United States will be good for the whole world," demikian pemeonya. Sejalan dengan pikiran ini "corporatism" menitikberatkan akibat-akibat yang *stabilizing* dan bukan yang *destabilizing* dalam setiap intervensi Amerika di Eropa.

Di Uni Soviet struktur internalnya dibentuk begitu rupa untuk mendukung kehendak pimpinan nasional menciptakan musuh-musuh eksternal agar ia tetap didukung untuk berkuasa karena diperlukan demi *survival* negara-bangsa. Namun pelembagaan kecurigaan dan kewaspadaan nasional ini kiranya datang dari kelemahan dan bukan dari kekuatan. Berhubung dengan itu struktur dalam negeri Rusia, walaupun diarahkan untuk menanggapi dunia dengan citra yang seburuk-buruknya, dari dirinya sendiri mungkin tidak akan (mampu) mencetuskan perpeperangan. Bila demikian Kremlin tidak akan memulai aksi militer terhadap kubu lawan utamanya.

Hubungan internasional, sama dengan hidup dan kehidupan itu sendiri, keadaan yang sebenarnya jauh lebih kompleks dari yang sanggup digambarkan oleh berbagai model teoretis. Namun sejauh yang menge-nai hubungan antara kedua adikuasa, usaha kedua belah pihak untuk mengaitkan struktur internal dengan tingkah-laku eks-ternal kiranya tidak menunjukkan kecenderungan untuk menempuh risiko berperang. Struktur internal mereka sama-sama me-ngandung suatu *military-industrial complex*, tetapi keseluruhan *theory of deterrence* sebe-narnya didasarkan pada hipotesa bahwa *paranoia* dan *prudence* dapat hadir berdam-pingan.

Walaupun terdapat perbedaan-perbedaan yang betul-betul mendasar, baik struktur dalam negeri Amerika maupun Uni Soviet kelihatannya tidak mengajukan hambatan-hambatan yang lebih besar bagi usaha-usaha mempertahankan suatu sistem internasional yang stabil daripada yang dikandung oleh struktur bipolaritas itu sendiri atau oleh ciri-ciri khas dari hubungan bilateral Amerika-Rusia. Walaupun perbedaan-perbedaan

struktur internal masing-masing begitu me-nyolok, bila perlu sesekali melaksanakan diplomasi usir-mengusir diplomat, ia ternyata mampu membedakan kemungkinan permuuhan dengan kemungkinan peperangan.

UNSUR-UNSUR KELAKUAN DARI STA-BILITAS

Sebagaimana telah dikatakan sedikit sebelum ini, stabilitas dalam sistem internasio-nal hanya sebagian saja yang merupakan fungsi dari struktur. Sebagian lainnya ditentukan oleh kelakuan yang sadar dari bangsa-bangsa yang membentuk sistem itu. Walau-pun penyelesaian Perang Dunia II sudah di-sesuaikan dengan pembagian kekuatan yang ada di dunia, walaupun hubungan Amerika-Rusia merupakan hubungan interdependensi yang seminimal mungkin, walaupun kenda-la-kendala dalam negeri tidak menciptakan kesulitan-kesulitan, stabilitas di masa pasca-perang sekarang ini tidak akan ada bila di kalangan pemegang kekuasaan yang mendo-minasi sistem memiliki kemauan berperang yang sama seperti yang terjadi di sistem lain yang pernah ada di masa lampau.

Maka ada baiknya kita kaji unsur-unsur kelakuan yang *condusive* bagi stabilitas, yaitu senjata nuklir, revolusi pengamatan, pelunakan ideologi dan aturan permainan adikuasa.

Senjata Nuklir

Para negarawan dari negara-negara adikuasa pasca-1945, bila dibandingkan dengan para pendahulu mereka di periode sebelum-nya, ternyata sangat berhati-hati dalam mengambil keputusan memerangi lawannya.

Seusai Perang Dunia II hingga saat ini dalam hubungan Amerika-Soviet sebenarnya tidak sedikit terbuka "kesempatan" yang menantang kedua belah pihak untuk segera bertarung: Iran (1946); Yunani (1947); Berlin dan Cekoslovakia (1948); Korea (1950); kerusuhan di Berlin Timur (1953); pemberontakan Hongaria (1956); krisis Berlin lagi (1958-59); insiden pesawat U-2 (1960); Berlin lagi (1961); krisis peluru kendali Kuba (1962); lagi-lagi Cekoslovakia (1968); perang Yom Kippur (1973); Afghanistan (1979); Polandia (1981); insiden pesawat terbang Korea (1983); sekarang ini usir-mengusir diplomat (1986).

Maka kalaupun sampai sekarang perang besar belum pecah pasti bukan karena masing-masing negara adikuasa kurang pengalaman dalam berperang. Amerika Serikat antara 1815-1980 telah turut aktif dalam delapan peperangan internasional yang melibatkan kira-kira seribu pertempuran sengit di medan yang mematikan. Selama periode yang sama Uni Soviet mengalami sembilan belas kali peperangan. Kiranya bukan pula karena mutu yang luar biasa dari kepemimpinan di kedua belah pihak, mengingat wawasan dan kemampuan para negarawan pasca-perang dari Amerika dan Uni Soviet kelihatannya tidak banyak berbeda daripada pendahulu mereka. Mestinya bukan pula karena kedua belah pihak sudah terlalu lelah untuk mengangkat senjata. Sebab dalam periode pasca-perang ini kedua bangsa tersebut telah mati-matian menggunakan kekuatan militer masing-masing menghantam pihak ketiga: Amerika menggunakan kekuatannya di Korea dan Vietnam, sedangkan Uni Soviet di Afghanistan.

Tentu ada alasan-alasan lain yang lebih menentukan mengapa kedua negara adikuasa tidak begitu gegabah menempuh risi-

ko perang. Alasan itu, menurut hemat saya, adalah mekanisme "gertakan nuklir" (nuclear deterrence). Kehadiran senjata ampuh ini kiranya membuat setiap keputusan untuk berperang tidak optimis. Optimisme dalam menyiapkan peperangan inilah yang dahulu telah merintis jalan yang mudah untuk berperang. Sedangkan kehadiran senjata nuklir membuat pessimisme menjadi pengiring yang permanen dalam pemikiran perang dewasa ini. Bukan kebetulan kalau seorang pengamat dan analis politik internasional, Geoffrey Blainey, sampai mengatakan bahwa segala sesuatu yang menekan optimisme dan mengembangkan pessimisme itulah yang merupakan sebab dari perdamaian.

Pessimisme ini merupakan dorongan kuat bagi negara-negara adikuasa untuk mengontrol krisis yang ditimbulkan oleh pengambilan risiko dari pihak ketiga. Perang Dunia I pecah karena ketidakmampuan mengelola situasi yang tidak diciptakan dan tidak pula dikehendaki oleh pelaku-pelaku terkemuka di sistem internasional yang berlaku. Ketika itu tidak ada mekanisme yang menyetop eskalasi, yang dalam dirinya dapat memaksa setiap bangsa untuk membandingkan hasrat jangka pendek memanfaatkan kesempatan dengan bahaya jangka panjang berupa krisis-krisis yang tidak terkendalikan. Gertakan nuklir kini memberikan mekanisme yang diperlukan itu sehingga Amerika Serikat dan Uni Soviet dapat mengelola serangkaian krisis, terutama yang terjadi di Timur Tengah, yang timbul dari tindakan-tindakan pihak lain tetapi dapat melibatkan kedua adikuasa.

Maka tidak berlebihan bila dikatakan bahwa perkembangan senjata nuklir telah menimbulkan suatu *stabilizing effect* pada jalannya sistem internasional pasca-perang dewasa ini.

Revolusi Pengamatan

Di samping gertakan nuklir, yang dalam dirinya memang merupakan mekanisme tingkah-laku yang paling penting dalam menunjang sistem internasional pasca-Perang Dunia II, ada faktor lain lagi yang juga cukup ampuh dalam menegakkan stabilitas atau mencegah meletusnya perang. Teknologi yang telah memungkinkan pengangkutan senjata nuklir sehingga ia dapat diterapkan di mana saja di muka bumi ini ternyata mampu juga mengurangi sebesar-besarnya bahaya serangan mendadak. Dengan begitu ia menambah kesanggupan mengatur sendiri dari gertakan nuklir dengan kepastian yang berasal dari kemampuan mengetahui lebih banyak dari yang dapat diketahui di masa lampau tentang kesanggupan lawan. Kemampuan ini disebut oleh John Lewis Gaddis sebagai "revolusi pengamatan" (reconnaissance revolution), suatu kemajuan yang kepentingan artinya dapat menyaingi "revolusi nuklir," tetapi yang selama ini kurang diperhatikan sebagaimana mustinya di dalam analisis.

Dengan adanya revolusi pengamatan bukan berarti bahwa kedua negara adikuasa sekarang lebih mampu membaca *niat* masing-masing. Bagi Uni Soviet serbuan Amerika ke Grenada tetap merupakan suatu kejutan; sama halnya dengan Amerika yang juga kaget, karena tidak menduga sebelumnya, tentang serbuan Rusia ke Afghanistan. Namun berkat revolusi pengamatan ini kedua pihak sekarang sanggup saling menilai *kemampuan* masing-masing dengan tingkat ketepatan yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam hubungan antar negara-negara besar. Kesanggupan menilai ini dimungkinkan oleh satelit-satelit pengamatan, yaitu alat pengintai yang kata orang dapat

membaca nomor plat mobil atau *headlines* surat kabar dari jarak ketinggian 200 km atau lebih dan berkat "toleransi" negara-negara adikuasa itu sendiri untuk membiarkan satelit-satelit tersebut terbang melintasi wilayah nasionalnya masing-masing tanpa diganggu.

Maka masing-masing pihak sekarang ini dapat mengetahui secara lebih tepat data tentang kemampuan militer -- dan sampai tingkat tertentu juga kemampuan ekonomi -- dari lawannya, yang dalam sejarah spionase dapat diberikan hanya oleh kawanan spion ulung. Revolusi pengamatan sampai tingkat tertentu mengoreksi pula asimetri dalam hubungan Amerika-Soviet yang didesakkan oleh bentuk-bentuk organisasi politik dan sosial yang sangat berbeda dari kedua negara-bangsa tersebut. Selama periode Perang Dingin ini Uni Soviet dapat betul-betul memanfaatkan ketertutupan masyarakatnya dalam menyembunyikan semua kemampuannya dari pemantauan Barat. Sebaliknya Amerika Serikat, dan sekutu-sekutunya, mengalami kesulitan dalam menutup-nutupi terlalu lama segala sesuatu yang wajar dirahasiakan dalam keadaan tegang seperti itu.

Jadi inovasi teknologis tidak selalu merupakan kekuatan yang *destabilizing* dalam hubungan Amerika-Soviet. Sudah ada, dan pasti akan terus ada, hal-hal di mana kemajuan teknologi dapat mengurangi bahaya perang dan bukan meningkatkannya. Memang semua itu akan tergantung pada penggunaan teknologi yang bersangkutan dan alternatif-alternatif dari penggunaan itu sungguh tak mudah meramalkannya. Dalam *jargon* militer kedua adikuasa revolusi pengamatan ini disebut *warfare in the fourth dimension*.

Pelunakan Ideologi

Jika teknologi mempunyai potensi untuk memantapkan atau merusak stabilitas sistem internasional, ideologi kiranya juga berpotensi begitu. Bila kita pelajari sejarah panjang dari gerakan kemerdekaan nasional, atau revolusi melawan tata sosial yang mapan, atau konflik rasial dan religius, akan terungkap betapa gagasan mempunyai kemampuan untuk terus-menerus menggerakkan bangsa-bangsa atau kelompok-kelompok di dalam suatu bangsa guna bertarung satu terhadap lainnya.

Hubungan Amerika Serikat dan Uni Soviet tidak bebas dari persaingan, bahkan permusuhan ideologi. Betapa tidak. Kedua adikuasa dapat dikatakan merupakan bangsa yang paling berideologi di muka bumi ini. Ideologi mereka sejak awal pembentukan negara-bangsa masing-masing secara fundamental sudah antithetic mengingat pernyataan niat mereka untuk saling menjatuhkan. Namun sejak tampil sebagai adikuasa, kedua bangsa ini telah menunjukkan kearifannya untuk mengsubordinasikan kepentingan ideologis yang antagonis pada suatu tujuan bersama berupa pemantapan tata internasional.

Tentunya ada berbagai hal yang menyebabkan pergeseran pendirian (posisi) tersebut. Pertama, bipolaritas itu sendiri, yang merupakan ciri khas dalam sistem internasional pasca-perang, sebenarnya mengandung pengakuan yang sulit dibantah terhadap Uni Soviet sebagai suatu kekuatan besar; pengakuan implisit ini tidak dianggap remeh oleh pimpinan negeri ini. Kedua, situasi internasional di tahun 1950 dan awal 1960 kelihatannya membantu perluasan pengaruh Rusia di dunia, terutama karena runtuhan kolonialisme dan tampilnya bangsa-

bangsa yang baru merdeka yang tetap mencurigai Barat. Ketiga, proliferasi kemampuan nuklir memperkuat kesimpulan Malenkov bahwa dalam peperangan masa depan di antara negara-negara besar tidak akan ada pemenang, baik kapitalis maupun komunis. Yang ada hanya kehancuran bagi keduanya. Kesimpulan Malenkov tersebut kiranya terus dipegang hingga saat ini oleh kepemimpinan Uni Soviet, walaupun terus ditentang oleh pihak militer. Angkatan bersenjata Rusia yakin bahwa secara teknis Uni Soviet dapat keluar sebagai pemenang dalam suatu perang nuklir melawan Amerika Serikat. Marsekal Nikolay Ogarkov yang mewakili pendapat pihak militer ini, pada tanggal 6 September 1984, oleh kepemimpinan Rusia dibebaskan dari jabatannya sebagai Kepala Staf Umum angkatan bersenjata.

Pertimbangan-pertimbangan ideologis secara tradisional kurang berperan dalam membentuk politik luar negeri Amerika. Namun bukan berarti kehadirannya tidak ada samasekali, walaupun tidak terlalu ditonjol-tonjolkan seperti halnya pada Uni Soviet. Selama Perang Dunia II di Amerika tumbuh kebencian yang luar biasa pada "totalitarianisme" pada umumnya. Maka itu kepemimpinan di situ berpendapat bahwa pemerintahan yang bersendikan kekuatan untuk mempertahankan kekuasaannya tidak perlu ditenggang bila kekuatan perlu diterapkan di mana pun di dunia ini. Tunutan supaya "menyerah tanpa syarat" kepada Jerman dan Jepang jelas mencerminkan posisi ideologis ini. Dengan perkataan lain tidak ada kompromi dengan rezim yang menggunakan kesewenang-wenangan sebagai pandangan hidup.

Dipandang dari sudut ideologi demokrasi Amerika, Uni Soviet kiranya dapat dianggap sebagai suatu rezim totaliter, sama se-

perti yang di Jerman dan Jepang sebelum Perang Dunia II. Walaupun begitu teriakan "menyerah tanpa syarat" tidak pernah di-alamatkan kepada Uni Soviet. Memang Amerika belum pernah berperang langsung dengan Soviet tetapi ketegangan antara kedua adikuasa sudah dimulai sejak akhir tahun 40-an begitu rupa sehingga rencana perang dalam keadaan terpaksa sudah disiapkan baik di Washington maupun di Moskwa. Namun yang pertama di antara rencana-rencana yang disetujui oleh Presiden Truman di akhir tahun 1948 tegas mengatakan bahwa bila perang memang tidak dapat dielakkan, tidak akan ada niat menuntut penyerahan tanpa syarat kepada Uni Soviet.

Alasan-alasan mengapa Amerika tidak ingin memerangi totaliterisme Rusia dengan tekad yang sama tegasnya seperti yang pernah dilakukannya terhadap totaliterisme Jerman dan Jepang, kiranya adalah: pertama, gambaran yang cukup mengerikan bila kelak harus menduduki wilayah Rusia yang jauh lebih luas dari wilayah musuh-musuh yang pernah didudukinya selama Perang Dunia II; kedua, walaupun permusuhan terhadap Uni Soviet sudah dimulai sejak tahun 1945, kepemimpinan Amerika tidak menganggapnya sebagai tidak dapat diubah. Maka itu tujuan hadangannya (containment) adalah mengubah *psikologi* kepemimpinan Rusia dan bukan mengubah kepemimpinan itu sendiri; akhirnya, anggapan bahwa tekad untuk memukul habis-habisan Jerman dan Jepang sebenarnya telah merusak keseimbangan kekuatan pasca-perang. Pendapat ini berasal dari kelompok "geopolitisi realis" yang memandang stabilitas internasional dalam artian toleransi disertai kewaspadaan terhadap lawan dan tidak dalam artian melenyapkannya dari peta bumi.

Tanpa pelunakan tujuan-tujuan ideologis, sulit dibayangkan adanya stabilitas yang telah menjadi ciri khas dalam hubungan negara-negara kuat sejak akhir Perang Dunia II. Di pihak lain, semua hal yang telah memungkinkan terwujudnya stabilitas itu kiranya memperkuat pendapat bahwa kepentingan sistemik kini semakin cenderung mengatasi kepentingan ideologis.

Aturan Main Para Adikuasa

Keadaan sistem internasional pasca-Perang Dunia II sepantas lalu cukup mengherankan: bagaimana mungkin tata-tertib dapat terwujud sejak tahun 1945 tanpa kehadiran suatu otoritas supranasional yang efektif berupa apa pun?! Betapa tidak mengherankan: sedangkan suatu *self-regulating mechanism*, seperti pilot otomatis atau pengatur mesin, tidak mungkin bekerja tanpa digerakkan oleh seseorang. Maka itu hal yang mengherankan ini mengundang para pengamat politik internasional untuk menyelidiki sebab-sebabnya.

Di balik paradox tata-tertib tanpa kehadiran hierarki ini ternyata terdapat "aturan main" yang menetapkan batas-batas dari tingkah-laku yang dapat diterima oleh bangsa-bangsa yang hanya mengakui dirinya sendiri sebagai hakim tingkah-laku itu. Aturan main ini tentunya lebih bersifat implisit ketimbang eksplisit. Ia berkembang dari rumusan unsur-unsur kebiasaan, preseden dan kepentingan bersama dan bentuk perkembangan ini terpisah samasekali dari bidang retorika umum, diplomasi dan hukum internasional. Untuk menjadi efektif ia memerlukan waktu dan anggapan dari satu generasi kepemimpinan ke generasi selanjutnya tentang kegunaannya. Adapun aturan

main tersebut, yang antara lain disimpulkan oleh John Lewis Gaddis berdasarkan pengamatannya atas sistem internasional yang berlaku sekarang, adalah seperti berikut:

(i) Hormati lingkungan pengaruh lawan. Baik Amerika maupun Uni Soviet secara resmi tentu tidak mengaku mempunyai lingkungan seperti itu tetapi keseluruhan sejarah Perang Dingin sesudah Perang Dunia II sebenarnya dapat ditulis dalam artian usaha-usaha kedua adikuasa untuk terus-menerus memperluas dan memantapkan lingkungan pengaruh masing-masing tersebut. Walau pun setiap adikuasa tidak pernah mengakui di depan umum hak lawannya atas lingkungan pengaruh itu, ia juga tidak pernah secara langsung dan terbuka menggugat hal tersebut.

Pembelotan dari lingkungan pengaruh satu adikuasa akan dimanfaatkan sepenuhnya oleh adikuasa lawannya hanya bila adikuasa yang pertama tidak mampu atau tidak mau mengontrol pembelot itu. Amerika Serikat, misalnya, memanfaatkan pembelotan Yugoslavia dan RRC dari kubu Uni Soviet, tetapi tidak berusaha berbuat begitu dalam peristiwa Hongaria (1956), Cekoslovakia (1968) dan Polandia (1981). Demikian juga Uni Soviet, ia telah memanfaatkan pembelotan Kuba dari lingkungan pengaruh Amerika sesudah tahun 1959, tetapi tidak berusaha menentang usaha Amerika menegakkan kembali pengaruhnya di Iran di tahun 1953, di Guatemala pada tahun 1954, di Republik Dominika pada tahun 1965 dan di Grenada pada tahun 1983.

(ii) Mengelakkan konfrontasi militer langsung. Selama sejarah panjang Perang Dingin pasukan Amerika dan Uni Soviet tidak pernah melibatkan diri secara langsung dalam persengketaan yang berlarut-larut.

Kedua negara adikuasa memang telah melakukan tiga perang besar terbatas sejak tahun 1945, tetapi tidak pernah antara mereka berdua. Kemungkinan terbesar pertarungan militer langsung antara Amerika dan Uni Soviet terbuka selama Perang Korea, tetapi perang itu tidak pernah terjadi. Demikian pula ketika kesempatan datang lagi di Vietnam dan kemudian di Afghanistan. Dalam berbagai keadaan di mana pasukan kedua pihak sudah langsung saling berhadapan -- blokade Berlin di tahun 1948, konstruksi Tembok Berlin di tahun 1961 dan krisis peluru kendali Kuba di tahun berikutnya -- kedua belah pihak berusaha keras mencegah timbulnya perang langsung antara mereka.

(iii) Senjata nuklir baru dipakai kalau betul-betul terpaksa. Sejak tahun 1945 telah diadakan perbedaan yang tegas antara senjata konvensional dan senjata nuklir. Selanjutnya penggunaan militer dari senjata nuklir ini hanya dibenarkan pada tingkat terakhir dari suatu peperangan total. Pemerintahan Eisenhower memang pernah mengungkapkan kesediaannya menggunakan senjata nuklir di dalam suatu peperangan terbatas. Henry Kissinger mendukung sepenuhnya penggunaan tersebut di tahun 1957 agar komitmen persekutuan tetap dipercaya. Di pihak lain para ahli strategi Uni Soviet tetap bertekad akan menggunakan baik senjata konvensional maupun senjata nuklir di dalam peperangan. Namun kenyataannya, sejak Hiroshima dan Nagasaki 41 tahun yang lalu belum pernah ada ledakan bom nuklir dalam setiap perang yang pernah ada hingga kini. Jadi ada penyimpangan antara praktik bangsa-bangsa dari doktrin resmi yang diumumkan dan penyimpangan seperti ini memang jarang terjadi.

(iv) Lebih baik keanehan yang sudah dikenal ketimbang rasionalitas yang sulit

diduga. Selama berlangsungnya Perang Dingin kedua adikuasa, atau para sekutunya, kelihatannya membiarkan saja berbagai cara penyelesaian yang aneh, artifisial dan sepintas lalu tidak stabil, seperti: pembagian Jerman dan Korea, Tembok Berlin, posisi Berlin Barat di dalam Jerman Timur, kehadiran satelit Rusia kira-kira 90 km dari pantai Florida dan tetap berfungsinya sebuah basis yang penting dari angkatan laut Amerika di situ. Semua pengaturan ini sungguh merupakan improvisasi yang tidak logik dan memang tidak satu pun di antaranya merupakan hasil disain yang telah masak dipikirkan sebelumnya. Namun karena nyatainya semua itu masih tetap berlaku tentu mempunyai "logikanya" sendiri, yaitu: keengganan para adikuasa untuk menukar apa yang sudah dikenal dengan sesuatu yang sulit diramalkan sebelumnya.

(v) Jangan mengganggu kepemimpinan lawan. Sejak akhir Perang Dunia II hingga saat ini baik Amerika maupun Uni Soviet sudah berkali-kali mengalami krisis kepemimpinan. Namun kedua belah pihak bukan saja tidak berusaha tambah mempersulit krisis tersebut, tetapi bahkan sungguh-sungguh ikut prihatin terhadap kesulitan kepemimpinan yang sedang diderita oleh lawannya itu. Dipandang dari sudut "teori permainan," pengakuan terhadap keabsahan kepemimpinan kedua belah pihak terang mempunyai dasar yang kuat, yaitu: agar permainan dapat berlangsung diperlukan adanya pemain-pemain pilihan masing-masing.

STRATEGI NASIONAL MENGENAI PERDAMAIAIN

Strategi nasional mengenai perdamaian sebenarnya merupakan satu tema yang cu-

kup kompleks dan luas untuk dibahas secara tersendiri. Hal ini bukan berarti mengabaikan adanya hubungan timbal-balik antara perkembangan perdamaian di luar negeri dengan perkembangan perdamaian di dalam negeri. Yang sebaiknya kita lakukan sekarang adalah memanfaatkan kestabilan relatif yang ada dalam sistem hubungan internasional, melalui diplomasi yang lebih bebas dan lebih aktif, untuk membangun dan memantapkan perdamaian intern. Selama pemerintahan Orde Baru kita banyak sedikitnya sudah melakukan itu dan kebijakan seperti ini kiranya perlu terus ditingkatkan.

Dalam mengembangkan perdamaian intern melalui suatu strategi hendaknya disadari bahwa strategi perdamaian ini tidak berdiri sendiri. Ia merupakan bagian dari strategi besar pembangunan nasional melalui faktor stabilitas yang menjadi salah satu dasarnya dan yang sudah termasuk program pembangunan nasional. Ia berkaitan pula dengan strategi hankamnas melalui faktor sekuriti yang merupakan pula salah satu dasarnya dan yang telah merupakan urusan strategi hankamnas itu. Adapun kaitan-kaitan fungsional antara ketiga strategi ini yang begitu kompleks tidak akan dibahas di sini mengingat ruangan. Juga tidak akan dikaji apa isi dari strategi perdamaian intern pada setiap tahap perkembangan strategiknya (perumusan, pemutusan, pelaksanaan, pernilaian akhir), dan aspek ekstern dari isi strategi, betapapun pentingnya semua faktor itu.

Yang akan diajukan di sini untuk direnungkan adalah beberapa pokok sasaran antara dari strategi perdamaian intern yang pencapaiannya diperlukan demi realisasi dari perdamaian itu. Pengertian perdamaian itu sendiri sebaiknya didekati dari sudut kebudayaan. Bila demikian yang dimaksud-

kan dengan perdamaian (secara nasional) adalah keadaan sekelompok manusia (bangsa) yang puas karena telah berkesempatan menghayati nilai-nilai atau setelah ada kepastian/harapan yang meyakinkan bahwa penghayatan tersebut akan terlaksana, sedangkan kematian biologis tidak mengan dung unsur bunuh diri kolektif yang terorganisasi, terpimpin dan terpaksa.

Pengertian perdamaian yang seperti ini dapat dikatakan identik dengan pengertian sekuriti karena yang terakhir disebut ini memang merupakan dasar dari "rasa damai" dan kedua-duanya juga didekati dari sudut kebudayaan, berhubung kebudayaan adalah sistem nilai yang dihayati. Jadi menurut pendekatan budaya terhadap (masalah) perdamaian ini, pada asasnya perdamaian tidak diartikan secara negatif, yaitu tidak adanya ancaman atau gangguan, tetapi diartikan secara positif, yaitu berupa kepuasan berkat adanya kemungkinan untuk menghayati dan mengamalkan nilai-nilai atau berupa keyakinan bahwa penghayatan dan pengamalan tersebut dapat dilaksanakan. Dengan perkataan lain, tidak akan ada "rasa damai" bila untuk mencegah kehancuran fisik karena serangan dari luar (ancaman ekstern), atau demi "ketenteraman nasional" (ancaman intern), seluruh kesatuan hidup (masyarakat dan bangsa) harus berkompromi menerima nilai-nilai yang lain dari yang selama ini dihayati dan diamalkan dengan penuh kepuasan. Untuk bangsa Indonesia sebagai satu kesatuan hidup, nilai-nilai yang dihayati untuk diamalkan itu adalah Pancasila, di samping kemerdekaan dan kedaulatan nasional, UUD 1945 dan kebudayaan nasional pada umumnya.

Pengertian perdamaian seperti yang disebut di atas tadi hendaknya tidak ditanggapi sebagai suatu definisi yang lazim dalam pe-

nyajian sesuatu teori. Pengertian tersebut lebih banyak merupakan deskripsi tentang keadaan ideal yang seharusnya dapat diwujudkan oleh strategi nasional mengenai perdamaian intern. Keadaan tersebut disebut **ideal** karena ia menggambarkan sekaligus keadaan hidup dan keadaan matinya bangsa. Keadaan hidupnya ditandai oleh adanya kepuasan karena dimungkinkan menghayati nilai-nilai yang diyakininya dan keadaan matinya tidak merupakan bunuh diri kolektif yang banyak sedikitnya terpaksa.

Dengan pengertian perdamaian yang seperti ini, maka sasaran-sasaran-antara yang seharusnya (turut) dipikirkan dan diurus oleh strategi perdamaian intern itu adalah:

Pertama, sebagai bagian dari strategi besar pembangunan nasional, turut mensukseskan pembangunan sebagai pengamalan Pancasila karena keberhasilan pembangunan memberikan dasar material bagi perdamaian.

Kedua, karena berkaitan fungsional dengan strategi hankamnas, meningkatkan pengintegrasian tanah air real, tanah air formal dan tanah air mental begitu rupa sehingga menjadi satu kesatuan citra yang terpadu dalam pikiran dan perasaan (sanubari) setiap warga negara (*métastrategi*).

Ketiga, turut menampung dan mengelola akibat-akibat sampingan dari pelaksanaan pembangunan (perubahan, kepenuhsesakan dan ketidaksamaan), sebab bila diabaikan akibat-akibat sampingan ini dapat mengganggu perdamaian melalui *destabilizing effects* yang dikandungnya.

Paus Paulus dalam ensiklik *Popularum Progressio* mengatakan bahwa "pembangunan adalah nama baru dari perdamaian

an." Memang benar pembangunan, terutama bagi bangsa-bangsa yang baru merdeka, merupakan tumpuan harapan yang mempunyai arti luar biasa besarnya. Namun justru karena ini pula ia dapat berubah menjadi kekecewaan yang luar biasa hingga menjurus ke tingkah-laku yang mengganggu ketenteraman bila akibat-akibat sampingan pembangunan yang disebut di atas tidak ditinggali sebagaimana mustinya.

Keempat, membina kekuatan nalar dengan pembentukan tipe ideal "pekerja otak" melalui proses pendidikan nasional. Perkembangan kekuatan nalar diperlukan karena: (i) nalar sebagai dasar yang kukuh dari demokrasi; (ii) pembangunan sebagai pengamalan Pancasila yang masih harus ditafsirkan setiap perwujudannya; (iii) demi kelancaran stabilitas yang dinamik dalam masyarakat yang terus berkembang (skena tetragram: order, disorder, interaksi organisasi); (iv) memperkuat *stabilizing capacity* dari pola berpikir masyarakat (generalisasi ilmiah [konvergen]), fakta-fakta empiris, pengertian mitologis dan religius, gagasan politik dan etik (divergen); (v) dialog antar bagian-masyarakat; dan (vi) partisipasi aktif dalam pembentukan ekonomi dunia.

Sasaran yang keempat ini, yaitu yang berurusan dengan (pembinaan) nalar, kiranya perlu penjelasan lebih lanjut karena bila tidak, besar kemungkinan diabaikan oleh strategi perdamaian intern. Diabaikan karena hal ini sepintas lalu merupakan bidang garapan kebijakan pendidikan semata-mata. Memang pembinaan ini termasuk bidang pendidikan, tetapi ia juga seharusnya disadari merupakan unsur penentu bagi ada atau tidak-adanya perdamaian intern. Paling sedikitnya kini jelas betapa erat pula kaitan antara strategi pendidikan dengan strategi

perdamaian intern.

Semua unsur yang disebut dalam sasaran keempat, dipandang dari sudut perkembangan perdamaian intern, merupakan sebab-sebab sekunder. Ibarat gunung es yang terapung di lautan, ia adalah bagian daripadanya yang terdapat di bawah permukaan air, tidak kelihatan dan karena itu bisa luput dari pandangan. Padahal potensi bahaya lebih banyak datang dari bagian yang tidak kelihatan itu. Maka itu terlalu risikan bila strategi perdamaian intern sampai mengabaikan sebab-sebab sekunder tersebut. Sedangkan perhatian analisis kebijakan ternyata kerap kali mengabaikan berbagai sebab sekunder dalam membuat pengkajian sebab-akibat. Hal ini bisa terjadi karena tanpa disadari sisa-sisa *mentalitas sihir* (magic mentality) masih terdapat dalam cara berpikir ilmiah atau dalam pembentukan logika pengambilan keputusan.

Sisa-sisa mentalitas sihir itu terutama berupa perluasan secara berlebih-lebihan dari cara hubungan dan cara komunikasi institusional -- yaitu hal-hal yang bersifat hierarkis, juridis dan politis -- ke dunia gejala-gejala. Bila yang pertama disebut tadi termasuk dalam bidang kekuasaan, komando, paksaan dan sanksi, yang terakhir disebut itu merupakan bidang yang tunduk pada hukum-hukum alam yang terbentuk dari pembawaan alami benda/hal yang ada.

Setelah mentalitas sihir dicampakkan dari ilmu-ilmu alam dan ilmu biologi karena cukup lama mengganggu perkembangan yang murni dari disiplin-disiplin ilmiah tersebut, ia menyusup ke dalam tubuh ilmu-ilmu sosial dan manusiawi yang kini banyak dipakai dalam studi perdamaian. Untuk mendapatkan tempat dan bertahan dalam kelompok disiplin-disiplin ilmiah yang

kedua ini, mentalitas sihir membelai-beliai kepekaan perasaan dan menyanjung-nyanjung bobot ketidaksabaran manusia.

Bentuk modern dari kecenderungan mentalitas sihir dalam berbagai disiplin ilmiah itu adalah pengacauan antara teori dengan doktrin. Teori mengelompokkan fakta-fakta dan berhubungan dengan itu mengajukan penjelasan, tafsiran, hipotesis, kaitan serta hubungan fungsional dan hukum-hukum. Doktrin adalah sistem ideologis yang berpretensi jauh mengatasi fakta-fakta, tetapi secara esensial menyatakan preferensi pribadi, estetis atau wawasan dari para perumusnya.

Walaupun antara teori dan doktrin ter-dapat interaksi dan mungkin saling mengisi, kedua metode itu tetap sangat berbeda satu dari lainnya dan merupakan dua jalan yang sangat berlainan dalam mencapai sasaran. Imajinasi kreatif, hipotesis penalaran, penalaran melalui analogi, dan tujuan normatif merupakan sumber-sumber dari an-juran serta dorongan bagi penelitian ilmiah asalkan semua itu ditanggapi sebagaimana adanya. Sebab imajinasi mengajukan pertanyaan-pertanyaan dan merumuskan hipote sis-hipotesis. Ia memberi bentuk pada ketidak-tahuan manusia, membangkitkan ke-inginan untuk mengetahui dan menyiapkannya untuk menghadapi masalah-masalah, membantunya mengubah masalah (fakta) menjadi permasalahan (teori). Aristoteles memang pernah mengatakan bahwa ilmu pengetahuan lahir dari keheranan. Tetapi jawaban-jawaban terhadap keheranan tersebut hanya diperoleh melalui observasi, pengalaman, penalaran dan uji-coba.

Maka itu mencampuradukkan kedua metode hanya semakin mengaburkan ilmu-ilmu sosial dan manusiawi serta memperlamb-

bat perkembangannya. Ketinggalan yang dialami kedua kelompok disiplin ilmiah ini baik terhadap kemajuan disiplin-disiplin ilmiah yang membidangi materi maupun terhadap kemajuan teknologi yang dilahirkan oleh ilmu-ilmu pengetahuan tersebut merupakan bahaya besar yang mengancam kemanusiaan dan perdamaian. Dewasa ini senjata-senjata yang mematikan menjadi tersedia bagi doktrin dan ideologi yang ra-sionale perumusannya telah dibantu dan dikukuhkan oleh ilmu pengetahuan sosial dan manusiawi tertentu.

Bentuk modern yang lain lagi dari men-talitas sihir, seperti yang dahulu sudah di-ingatkan oleh Auguste Comte dan Stuart Mill, adalah kecenderungan bereaksi terhadap gejala-gejala melalui penyebab primer-nya tanpa memperhitungkan samasekali sebab-sebab sekunder yang ada. Ia juga berupa kecenderungan untuk menganggap bahwa hukum dari pikiran dan logika manusia adalah sama saja dengan hukum-hukum alam.

Ada kecenderungan, misalnya meng-anggap perpanjangan rata-rata usia manusia Indonesia sebagai petunjuk sintetis dari keberhasilan pembangunan semata-mata dan karena itu segala pujian hanya un-tuk yang memimpin pembangunan itu. Tidak disadari atau, lebih buruk lagi, senga-ja diabaikan rupanya keterlibatan kemajuan ilmu-ilmu dan teknologi medis, ilmu gizi, il-mu olahraga, pertanian, industri, sistem distribusi, dan lain-lain dalam perpanjangan usia rata-rata itu. Bila semua sebab sekunder tersebut belum mengalami kemajuan jauh sebelum diadakannya pembangunan, baik kebijakan, peraturan, ketentuan, undang-undang dan tindakan hukuman apa saja maupun pembangunan itu sendiri dalam dirinya tidak cukup ampuh untuk memper-

panjang harapan hidup rata-rata tersebut.

Memusatkan perhatian semata-mata pada sebab-sebab primer selalu berarti membatasi analisis atau pengambilan keputusan pada sophisme kausalitas yang mengarah ke tuduhan dan illusionisme juridis. Cara yang begitu mudah dan berdasarkan pemikiran yang begitu dangkal inilah di masa yang lalu, misalnya, telah mengasingkan para penderita lepra, melihat epidemi sebagai akibat suatu kutukan, menganggap erupsi gunung berapi sebagai pertanda kemarahan dewa. Dewasa ini cara itu pula yang kiranya telah menuduh spekulasi sebagai penyebab krisis ekonomi, menyalahkan sesuatu berita sebagai penyebab kegelisahan masyarakat. Tidak disadari bahwa sebab-sebab sekunder krisis ekonomi sudah lama ada, seperti salah urus, inefisiensi, pungutan-pungutan tak resmi, keputusan-keputusan yang simpang-siur, dan lain-lain. Demikian pula, tidak disadari bahwa sebab-sebab sekunder dari kegelisahan masyarakat sebenarnya sudah bertumpuk di bawah permukaan, seperti ketidakpastian, kemunafikan, ketidakadilan, kesenjangan yang semakin menyolok antara yang kaya dan yang miskin. Dari dahulu sampai sekarang ini ternyata memang selalu mudah menggantikan penjelasan ilmiah dengan tuduhan moral atau dengan tudingan kekuasaan.

Karena tidak mampu menjelaskan penalaran dari kebijakannya, penguasa lalu menggunakan kekuasaan untuk melindunginya dari pandangan-pandangan kritis masyarakat dengan dalih artifisial demi kestabilan dan ketenteraman (perdamaian intern) masyarakat. Teguran-teguran dan pencabutan SIUPP terhadap media massa tertentu baru-baru ini adalah contoh yang jelas dari kehadiran mentalitas sihir berupa perluasan secara berlebih-lebihan dari cara hubungan

dan cara komunikasi institusional -- hierarkis, juridis, politis -- ke dunia gejala-gejala.

Betapa besarnya arti nalar -- sebagai sebab sekunder -- bagi perkembangan perdamaian intern, misalnya, terlihat pada pola berpikir masyarakat. Pada umumnya pola berpikir dalam sesuatu masyarakat, seperti telah disebut di atas, dibentuk oleh suatu ramuan dari: generalisasi ilmiah (nalar), fakt-fakta empiris, pengertian mitologis dan religius serta gagasan politik dan etik. Di antara unsur-unsur yang membentuk pola berpikir tersebut, hanya generalisasi ilmiah yang pembawaannya mendekat (*converge*). Yang lainnya semua bersifat menjauh (*diverge*). Sejarah keintelektualan dari kelompok-kelompok manusia, untuk sebagian besar, merupakan cerita tentang konflik dari aspek-aspek yang mendekat dan menjauh itu.

Maka sejarah manusia mengatakan bahwa tidak ada masyarakat yang mampu mengatasi konflik, apalagi *survive* dalam kedamaian, kecuali bila pola berpikirnya mengandung sebanyak mungkin unsur nalar, karena **generalisasi ilmiah** inilah yang merupakan satu-satunya unsur yang berpembawaan mendekat, yang berfungsi sebagai *stabilizing factor*. Sebaliknya bila pola berpikir masyarakat sudah dikuasai sepenuhnya oleh aspek-aspek yang berpembawaan menjauh, satu kejadian atau berita saja sebagai sebab primer sudah mampu menggerakkan sebab-sebab sekunder untuk mengubah tata-tertib (order) menjadi kekacauan umum (disorder). Selanjutnya apakah kekacauan umum ini akan berlangsung berlarut-larut, atau tidak lama kemudian akan "terorganisasi" begitu rupa sehingga menjurus ke arah tata-tertib kembali, tergantung sekali pada kehadiran faktor nalar itu. Sebab nalar inilah yang menuntun dialog. Sedangkan per-

damaian tidak akan ada selama tidak ada kesediaan berdialog yang serius, yang berpenalaran (reasonable) dan yang berkelanjutan. Dan sejauh konflik mempertengkarkan "kebenaran," kebenaran ini pun memerlukan dialog yang berpenalaran. Jadi nalar ini perlu dipupuk sebagai cara mencapai perdamaian, melalui penanganan dan pengelolaan sebab-sebab sekunder. Dengan ini kiranya menjadi jelas hubungan antara strategi pendidikan dengan strategi perdamaian intern karena (pengembangan) nalar merupakan urusan dari kedua kegiatan budaya tersebut.

STUDI PERDAMAIAIN

Sebagai sambutan atas seruan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk menjadikan tahun 1986 sebagai "Tahun Perdamaian," ada lembaga dan akademisi yang bermaksud mendirikan Pusat Studi dan Pengembangan Perdamaian (PSPP). Sesuai dengan adat orang beradab, memang ada keharusan supaya kata berjawab, gayung bersambut. Namun sebelum mulai mewujudkan niat luhur ini ada baiknya kita renungkan lebih dahulu kejelasan mengenai langkah yang akan diambil dan tindakan yang akan dibuat. Kejelasan ini kiranya perlu agar PSPP tidak sampai mengacaukan antara analisis ilmiah, doktrin dan khotbah perdamaian, di satu pihak, dan dapat membuat tahapan yang tepat tentang jenis-jenis penelitian yang dilakukan, di lain pihak. Yang terakhir ini penting mengingat dana dan tenaga yang relatif terbatas dan karena itu diperlukan pengumpulan literatur serta data yang tepat dan rekrutering serta pembinaan staf peneliti yang sesuai untuk setiap tahap studi.

Dalam setiap studi perdamaian pada dasarnya dapat dibedakan dua jenis penelitian pokok yang berbeda walaupun tetap berkaitan satu dengan lainnya, yaitu: **penelitian perdamaian** (peace research) dan **penelitian tentang perdamaian** (research on peace).

PENELITIAN PERDAMAIAIN

Penelitian ini mengumpulkan fakta-fakta dan tingkah-laku yang benar-benar ada dan telah terjadi sepanjang sejarah, protosejarah dan bahkan prasejarah. Deskripsi dan analisis yang dibuatnya: (i) menunjukkan bagaimana manusia memahami dan menghayati perdamaian menurut peradaban masing-masing, peralatan dan mentalitas yang berpadanan dengan itu; (ii) mengurai cara dan jalan yang ditempuh serta peralatan (teknis, pengetahuan, perlembagaan) yang dipakai sehingga berhasil atau gagal dalam membina atau mengorganisasikan perdamaian; dan (iii) memaparkan cara dan jalan yang ditempuh oleh manusia untuk mempertahankan perdamaian sekaligus terhadap nafsu angkara murka mereka sendiri dan terhadap serangan bersenjata dari kelompok-kelompok asing.

Bila disimpulkan, penelitian ini mengungkapkan bagaimana setiap kelompok manusia (masyarakat), besar atau kecil, berusaha secara empiris memperkuat diri guna menghadapi ambivalensi agressivitas, baik yang berasal dari dalam (auto-aggressivity) maupun yang datang dari luar. Studi bentuk-bentuk oleh penelitian perdamaian ini dilakukan atas tingkah-laku yang konkret. Studi ini memaparkan kenyataan-kenyataan yang dialami, kejadian-kejadian,

mentalitas dan perlembagaan. Karena itu selain merupakan suatu langkah historis-anthropologis, studi ini merupakan pula suatu langkah ethno-sosiologi deskriptif dan komparatif.

PENELITIAN TENTANG PERDAMAIAN

Jenis penelitian yang ini meliputi dua pendekatan pokok:

Pertama, bersifat pengetahuan (cognitive) dan penjelasan (explicative). Pada studi deskriptif dari gejala perdamaian dalam semua bentuknya di masa lalu dan masa kini, seperti disebut di atas, penelitian yang kedua ini menambahkan tafsiran-tafsiran dan pelajaran-pelajaran yang dapat disimpulkan dari kejadian-kejadian dengan segala bentuknya tersebut. Ia selanjutnya mengembangkan teori dan merumuskan hipotesis eksplikatif. Semua yang dilakukannya ini merupakan langkah-langkah ilmiah yang murni, yaitu sambil tetap dekat dengan kenyataan berusaha menjelaskannya, mencari sebab dan akibatnya, keseimbangan dan hukum-hukumnya.

Kedua, pendekatan yang bersifat spekulatif dan normatif. Ia cenderung merumuskan doktrin-doktrin (perdamaian). Pada umumnya ia ingin membentuk masa depan, baik dengan meramalkannya maupun melalui pembuatan model-model perdamaian. Pokoknya metode ini tidak membatasi dirinya pada pengembangan hipotesis-hipotesis eksplikatif, tetapi lebih jauh lagi: meramalkan dan memformalkan. Maka itu

kadangkala ia kelihatannya berpembawaan dogmatik dan eksklusif.

PERTANYAAN-PERTANYAAN MENDASAR

Peralihan dari ilmu kognitif ke ilmu terapan di bidang ini hampir selalu terjadi menurut skema penalaran yang sama, yaitu bila diyakini telah diketemukan suatu sebab dari masalah yang dihadapi maka melenyapkan sebab tersebut dianggap merupakan pemecahan dari masalah yang bersangkutan. Jika yang dianggap sebab ini adalah tindakan dari sekelompok pengacau, pemecahan yang akan dilakukan adalah melenyapkan pengacau-pengacau tersebut. Dengan demikian orang beralih dari yang eksplikatif dan kognitif ke yang normatif yang paling tegas dan ke keyakinan agresif yang dapat menjurus ke fanatisme.

Semua renungan spekulatif ini dan bahkan setiap penelitian tentang perdamaian dapat dikatakan dirangsang oleh suatu rangkaian pertanyaan-pertanyaan mendasar yang sejak ribuan tahun yang lalu sudah dirumuskan oleh para pemikir seperti Heraklitos (540-480 B.C.), yaitu: Mengapa giliran damai dan perang yang begitu fatal sampai sekarang silih berganti tak terelakkan? Apa arti dari semua ini? Apakah peranan dan fungsi respektif dari kedua gejala alternatif tersebut? Sisi lainnya dari pertanyaan-pertanyaan ini kiranya lebih historis ketimbang filosofis: Bagaimana terjadinya pergantian damai-perang-damai-perang ... ini ? Bagaimana ritme kejadian-kejadian yang bergiliran silih berganti itu? Bagaimana proses mental dan material, baik individual maupun sosiologis, melalui mana terjadi rangkaian pergantian tersebut?

DARI SEDERHANA KE SERBA KOMPLEKS

Evolusi yang terjadi di bidang ini sama saja dengan yang terjadi pada disiplin-disiplin ilmiah lainnya. Apa yang pada mulanya kelihatan sederhana dan dalam beberapa hal dapat dikatakan monolitis, ternyata semakin lama menjadi semakin kompleks. Semua ilmu pengetahuan dalam pertumbuhannya bercabang dan beranting, mengikuti asas-asas yang berasal dari Descartes: setiap masalah dibelah-belah menjadi bagian-bagian yang memudahkan pemecahannya dan ditangani dari berbagai penjuru. Maka itu penelitian-penelitian tentang perdamaian dan peperangan yang sampai sekarang dapat disimpulkan ke dalam berbagai doktrin serta diskusi religius, metafisis dan filosofis, kini mulai bercabang ke sejumlah masalah yang semakin meningkat banyaknya.

Penelitian-penelitian ini sekaligus saling menjauh (*diverge*) karena perbedaan-perbedaan metode dan cara pendekatannya dan saling mendekat (*converge*) karena persamaan tujuan-tujuan dan keprihatinannya. Berhubung dengan itu kalaupun bidang penelitian perdamaian dan tentang perdamaian ini memerlukan seorang spesialis demi perkembangannya yang efektif, dia seharusnya adalah orang yang mengkhususkan diri dalam membuat suatu perumusan yang menyeluruh, dalam membentuk suatu keseluruhan, *a specialist in the construction of the whole*.

PENUTUP

Sistem hubungan internasional semakin lama menjadi semakin kompleks. Kompleksitas ini disebabkan oleh berbagai multi-

plikasi, baik mengenai pelaku aktifnya, masalah yang ditimbulkannya, maupun cara dan alat yang dipakai untuk memecahkannya.

Sistem yang menjadi semakin kompleks ini adalah hasil cara penyelesaian Perang Dunia II sejak tahun 1945. Ia sebenarnya bukan merupakan hasil dari satu pemikiran dan disain yang mendalam dengan memperhitungkan tuntutan moral dan asas-asas keadilan. Ia bahkan penuh dengan pengaturan-pengaturan yang serba aneh dan artifisial serta memperhitungkan sepenuhnya kehadiran faktor-faktor kekuatan seperti yang terdapat pada akhir Perang Dunia II. Tanpa terlalu disengaja ia mengembangkan dalam dirinya satu struktur bipolar yang cukup mengandung unsur-unsur stabilitas, baik secara struktural maupun secara behavioral, dengan kemampuan *stabilizing* yang lebih besar dari yang *destabilizing*.

Dalam rangka bipolaritas ini, kenyataan bahwa Amerika Serikat dan Uni Soviet lebih "independen" ketimbang "interdependent" satu terhadap lainnya, kenyataan bahwa begitu sedikit terjadi *leverage* ekonomi antara keduanya, kenyataan bahwa kedua bangsa yang begitu berbeda dalam ideologi berkesempatan begitu sedikit untuk saling berhubungan, kenyataan ini semua dalam dirinya merupakan satu penopang struktural bagi stabilitas hubungan kedua negeri tersebut, apa pun yang dilakukan oleh pemerintahnya masing-masing.

Dan stabilitas ini, bersama-sama dengan faktor sekuriti, kiranya merupakan dasar dari perdamaian dalam sistem hubungan internasional. Namun stabilitas ini rupanya sudah disadari lebih secara relatif ketimbang secara absolut: bahwa sekuritinya sendiri tidak tergantung hanya pada tindakan-tin-

dakan yang diambil demi sekuritinya sendiri itu, tetapi juga pada sejauh mana tindakan-tindakan tersebut menimbulkan rasa terganggu pada diri bangsa lain mengenai sekuritinya. Dan semua inilah yang kiranya telah membantu sistem hubungan internasional yang artifisial ini tidak runtuh, walaupun sudah berjalan selama lebih dari 40 tahun, tidak menimbulkan perang dunia dan memberikan suasana damai relatif.

Kita harus mampu memanfaatkan perdamaian relatif di lingkup internasional ini demi perkembangan perdamaian intern dengan suatu strategi yang betul-betul fungsional dalam rangka pembangunan nasional sebagai pengamalan Pancasila. Sebab perdamaian itu, per definisi, berkaitan erat dengan kemungkinan penghayatan nilai-

nilai yang dikandung oleh Pancasila itu. Maka kalaupun pimpinan dan para spesialis di bidang hankam ada mengatakan bahwa sampai tahun 2000 ancaman terhadap negeri kita lebih banyak akan berasal dari dalam ketimbang datang dari luar, ancaman itu kiranya akan berupa gangguan bukan terhadap kemerdekaan Indonesia tetapi terhadap Pancasila dan penghayatannya oleh seluruh warga kita. Bila demikian strategi perdamaian intern itu perlu, antara lain, memantapkan keterpaduan antara tanah air real, tanah air formal dan tanah air mental serta memantau dengan teliti semua sebab sekunder untuk kemudian dikelola begitu rupa sehingga tidak berfungsi lagi sebagai faktor-faktor *de-stabilizing* dan *self-aggravating* terhadap perdamaian intern.

BAHAN BACAAN

Curt Gasteyer, *New Dimensions of Conflict and Order* (Geneve: Sijthoff, 1977).

John Lewis Gaddis, "The Long Peace: Elements of Stability in the Postwar International System," *International Security*, Spring 1986.

Gaston Bouthoul, *La Paix* (Paris: PUF, 1974).

Raymond Aron, *Paix et Guerre* (Paris: Calmann-Levy, 1962).

Daoed Joesoef, "Some Reflection on the Problem of Peace in the International System" (Seoul: UNESCO Conference on Peace, 1975).

Floyd D. Kennedy Jr., "The Evolution of Soviet Thought on Warfare in the Fourth Dimension,"

Naval War College Review (March/April, 1984).

UNESCO, *Peace on Earth: A Peace Anthology* (Paris: UNESCO, 1980).

Geoffrey Blainey, *The Causes of War* (London: Macmillan, 1973).

Karl W. Deutsch dan J. David Singer, "Multipolar Power Systems and International Stability," dalam James N. Rosenau (ed.), *International Politics and Foreign Policy: A Reader in Research and Theory* (New York: Free Press, 1969).

David F. Trask, "Woodrow Wilson and International Statecraft: A Modern Assessment," *Naval War College Review*, Vol. XXXVI, no. 2, March-April, 1983.

Garis Baru Politik Luar Negeri Uni Soviet Menuju Ko-Eksistensi Damai dan Kerjasama

Kirdi DIPOYUDO

DI BAWAH GORBACHEV terjadi suatu perubahan penting dalam politik luar negeri Uni Soviet. Berbagai pertimbangan telah mendorong negara itu untuk meninjau kembali kebijaksanaan luar negerinya dan menganut suatu garis baru. Hal itu bisa mempunyai dampak positif yang penting dalam percaturan politik internasional jika ditanggapi secara positif oleh Amerika Serikat dan sekutu-sekutunya. Bukan saja ketegangan Timur-Barat bisa mereda, tetapi peluang untuk menyelesaikan sengketa-sengketa regional yang mempunyai dimensi Timur-Barat juga menjadi lebih besar.

Pemikiran Baru Realistik

Perubahan dalam politik luar negeri Soviet itu berpangkal pada *suatu pemikiran baru* yang merupakan suatu kombinasi antara pragmatisme dan revisionisme ideologi untuk mengakomodasi kenyataan dan oleh sebab itu bersifat *realistik*. Ia berkisar pada kesadaran bahwa opsi militer yang minta

biaya tinggi dari segi ekonomi dan prestise politik tidak lagi mungkin. Oleh sebab itu cara-cara politik-diplomatik kini dianggap lebih baik, terutama karena hal itu memungkinkan Uni Soviet memancarkan citra suatu negara adidaya yang bertanggungjawab dan bersedia melibatkan diri dalam usaha untuk menciptakan stabilitas internasional. Kalau di bawah Brezhnev, Uni Soviet berusaha keras untuk memajukan komunisme di Dunia Ketiga dengan memberikan bantuan militer dan kadang-kadang juga mengirimkan pasukan, kini ia lebih berhati-hati, menghindari konfrontasi dan menggunakan cara-cara yang lebih halus untuk mencapai sasaran-sasaran politik luar negerinya. Ia tidak mau lagi memainkan permainan negara kuat dalam variasi-variasi yang mahal. Dan ia kecewa dengan penampilan kaum Marxis di Dunia Ketiga yang gagal melaksanakan sistem komunis. "Brezhnev mengira bahwa 'korelasi kekuatan' di dunia bergeser demi keuntungan Soviet," kata ahli politik Harvard Joseph S. Nye. "Gorbachev tidak begitu optimis."¹

¹Lihat *Newsweek*, 25 April 1988.

Seperti dikatakan oleh Menlu Soviet Eduard Shevardnadze, pemikiran baru itu telah menghasilkan Perjanjian Perdamaian Afghanistan yang ditandatangani bulan yang lalu dan membuka jalan bagi penarikan 115.000 pasukan Soviet. Gorbachev menyatakan harapannya bahwa perjanjian itu "akan memberi dorongan pada proses penyelesaian sengketa-sengketa regional."

Faktor-faktor Pendorong

Faktor-faktor berikut telah mendorong Uni Soviet untuk menganut garis baru itu. Pertama, terjadinya *stalemate* atau kematangan militer di mana tiada pihak yang akan keluar sebagai pemenang. Uni Soviet sampai pada kesimpulan bahwa situasi-situasi semacam itu tidak dapat banyak diubah dengan sarana-sarana militer. Afghanistan, Angola, Kampuchea dan Nikaragua menggambarkan keterbatasan opsi militer dan tingginya biayanya. Rezim-rezim yang didukung oleh Uni Soviet di negara-negara itu tidak berhasil menundukkan lawan-lawan mereka. Secara demikian opsi politiknya tampak lebih menarik.

Kedua, pembicaraan dengan AS mengenai sengketa-sengketa regional. Strategi baru Uni Soviet itu menekankan perlunya stabilitas dan ketenangan di gelanggang internasional. Bertahun-tahun isyu krisis-krisis regional merupakan suatu ganjalan dalam hubungan Soviet-Amerika. Tetapi kebutuhan Uni Soviet untuk memperbaiki hubungannya dengan AS minta kepadanya untuk menyingkirkan ganjalan itu.

Ketiga, keadaan ekonomi di Uni Soviet. Pada waktu Uni Soviet memperluas kehadirannya di dunia, menjadi jelas bahwa beban ekonomi untuk memancarkan citra suatu

negara adidaya menjadi lebih berat. Menurut suatu perkiraan, pada tahun 1985 misalnya bantuan ekonomi Uni Soviet bagi Dunia Ketiga mencapai US\$7,7 miliar. Jelaslah bahwa dilanjutkannya komitmen Soviet kepada Dunia Ketiga akan mengurangi alokasi sumber daya untuk pembangunan dan modernisasi ekonomi Soviet itu sendiri. Sejak Gorbachev melancarkan *Perestroika*, diperkirakan bahwa Uni Soviet akan mengurangi komitmennya kepada Dunia Ketiga dalam rangka membebaskan sebanyak mungkin sumber daya bagi pembangunan dalam negeri. Hal itu memerlukan suatu strategi baru mengenai sengketa-sengketa regional.

Keempat, akibat-akibat positif penyelesaian sengketa-sengketa regional. Uni Soviet sadar akan biaya yang harus ditanggungnya dari segi kekuasaan dan prestise politik akibat keterlibatannya dalam sengketa-sengketa regional itu. Misalnya penyelesaian sengketa di Afghanistan bisa memperbaiki kerugian yang diderita Uni Soviet di Dunia Muslim (Arab). Penarikan pasukan Soviet dari Afghanistan juga bisa meratakan jalan bagi perbaikan hubungan dengan AS dan Cina. Menemukan suatu penyelesaian bagi krisis Kampuchea merupakan syarat bagi perbaikan hubungan Uni Soviet dengan Cina maupun ASEAN. Suatu penyelesaian di Nikaragua juga bisa merupakan suatu terobosan bagi hubungan Uni Soviet dengan Amerika Latin dan perbaikan hubungan Soviet-Amerika.

Kelima, perbaikan citra Uni Soviet. Uni Soviet di bawah Gorbachev lebih menyadari pengaruhnya atas pendapat umum di dunia Barat. Kesadaran ini mendorong dilakukannya usaha sistematis untuk mempengaruhi pendapat umum dengan memancarkan citra suatu negara adidaya yang lebih senang

dengan koeksistensi damai dan stabilitas daripada subversi dan ekspansi.

Sifat Usul-usul Soviet

Usul-usul Soviet belakangan ini untuk menyelesaikan sengketa-sengketa regional mempunyai sejumlah sifat umum. Pertama, Uni Soviet percaya bahwa *opsi militer telah lenyap*. Namun ia ingin menghindari kesan mengalah di bawah tekanan dan menciptakan preseden kekalahan militer. Kegiatan militer di pusat-pusat sengketa memungkinkan Uni Soviet berunding dari kedudukan kuat.

Kedua, dari segi ideologi Uni Soviet cenderung untuk menganggap negara-negara yang dilanda perang saudara sebagai negara-negara berkembang *non-sosialis*. Secara demikian Uni Soviet bersedia menerima rezim-rezim banyak partai dan pemerintah-pemerintah koalisi di mana rezim Marxis yang berkuasa merupakan salah satu komponennya, kalau bisa komponen yang dominan.

Ketiga, Uni Soviet secara terang-terangan mendukung *politik rujuk nasional* dan bahkan berusaha membujuk rezim-rezim Marxis pro-Soviet agar menganut pendekatan itu. Kebijaksanaan rujuk nasional mencakup komponen-komponen berikut: pencatan senjata di medan tempur; amnesti umum dan pertukaran tawanan; perundingan resmi dengan pemberontak; perluasan dasar pemerintah dengan memprakarsai suatu proses demokratisasi dan inkorporasi oposisi dalam pemerintahan. Proses demokratisasi dan inkorporasi itu sudah barang tentu suatu fungsi kekuatan bawah tanah dan kelemahan rezimnya.

Penegasan dan Elaborasi

Garis baru politik luar negeri Soviet itu mendapat penegasan dalam pidato dramatis yang disampaikan Gorbachev di PBB pada tanggal 7 Desember 1988. Dalam pidato itu Gorbachev melukiskan *suatu hari depan* di mana *ancaman kekuatan militer bukan lagi alat politik luar negeri dan ideologi tidak lagi memainkan suatu peranan dominan dalam hubungan antara negara*. Ia mengajak semua anggota PBB khususnya negara adidaya Amerika Serikat untuk bersama-sama membangun dunia baru.²

Visinya yang memikat dan berani itu diresapi impian pedang-dilebur-menjadi-bajak waktu peralihan dari ekonomi persenjataan menjadi ekonomi perlucutan senjata. Di dalamnya termasuk prakarsa-prakarsa yang menggiurkan mengenai berbagai soal seperti masalah Afghanistan, emigrasi, hak-hak asasi manusia dan pengendalian senjata. Di atasnya terdapat suatu keputusan sepihak untuk mengurangi 10% angkatan bersenjata Soviet dalam waktu 2 tahun, menarik 50.000 pasukan dari Eropa Timur dan mengurangi separuh jumlah tank Soviet yang digelar di Jerman Timur, Hongaria dan Cekoslovakia.

Kalau George Bush sebagai Presiden AS dapat membangun di atasnya, pengumuman yang benar-benar mengejutkan itu dapat memperkuat perundingan pengendalian senjata konvensional, yang pada gilirannya dapat menolong AS mengatasi defisit anggarannya dan meredakan ketegangan dalam tubuh NATO mengenai cara bagaimana membagi beban mempertahankan suatu per-

²Lihat "The Gorbachev Challenge," *Time*, 19 Desember 1988 dan "Brave New World," *Newsweek*, 19 Desember 1988. Untuk versi Inggris pidato Gorbachev lihat *Jakarta Post*, 12-14 Desember 1988.

tahanan konvensional dan *nuklir* yang kokoh. Namun ajakan Gorbachev itu juga mengandung bahaya bagi AS. Pengurangan kekuatan militer yang diumumkannya itu cukup besar untuk membuat negara-negara Barat puas, tetapi terlalu kecil untuk mengurangi keunggulan dalam pasukan, senjata dan geografi yang dinikmati blok Soviet atas NATO. Lagipula, dengan usul-usulnya yang sekali lagi mengejutkan dunia, pemimpin Soviet yang percaya diri itu menunjukkan pesonanya yang bisa membujuk Eropa Barat untuk mengambil sikap netral dalam sengketa Timur-Barat sehingga aliansi NATO pecah.

Tetapi boleh jadi bahaya yang lebih besar ialah bahwa AS tidak mampu mengambil alih inisiatif atau memberikan tanggapan yang penuh imaginasi. Pidato Gorbachev di PBB itu adalah juga suatu *elaborasi* pemikiran barunya dalam politik luar negeri yang berpotensi untuk menghasilkan suatu pergeseran yang paling dramatis sejak AS membangun aliansi NATO sebagai benteng demokrasi.

Ajakan Mengakhiri Perang Dingin

Yang kiranya akan diingat mengenai pidato Gorbachev di PBB pada 7 Desember 1988 itu bukanlah semata-mata usul-usul spesifiknya -- beberapa telah diajukan sebelumnya -- tetapi juga cara usul-usul itu cocok bersama-sama di suatu forum dunia untuk *mengatasi dogma-dogma ideologi* yang telah mendorong politik luar negeri Soviet selama 70 tahun. Gorbachev memuji "dorongan besar sekali terhadap kemajuan umat manusia" yang datang dari revolusi-revolusi Perancis dan Rusia. "Tetapi," ia menambahkan, "dewasa ini kita menghadapi suatu dunia yang berbeda, untuk mana

kita harus mencari suatu jalan yang berbeda ke hari depan."

Selanjutnya Gorbachev menyenggung *perang dingin*: "Biarlah para historisi berdebat siapa yang lebih banyak dan siapa yang lebih sedikit disalahkan untuk itu." Kenyataannya, pemahaman alasan-alasan bagi pertarungan yang lama itu adalah krusial untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan paling penting yang diajukan oleh pemikiran baru Moskwa: Haruskah AS dengan gembira menerima ajakan Gorbachev yang menggoda untuk menyatakan perang dingin selesai? Secara berarti dengan kata-kata dan tindakan-tindakan ia menangani satu demi satu *sebab-sebab inti* pertarungan itu:

- (1) Alasan yang paling konkret untuk persaingan Barat selama 40 tahun dengan Uni Soviet adalah *sifat imperium yang mengancam dan agresif*. Ekspansionisme Rusia yang historis, ideologi Marxis-Leninis mengenai pertarungan kelas global, dan keyakinan Moskwa bahwa keamanan hanya bisa dijamin dengan ketidakamanan lawan-lawan telah bergabung untuk menciptakan suatu bangsa yang *naluri pertahanannya hanya dapat bersifat ofensif* secara menakutkan. Dalam pidatonya itu Gorbachev mengusulkan untuk *mengesampingkan segala penggunaan kekuatan yang berorientasi ke luar*, suatu kalimat yang dengan baik mengungkapkan esensi kebijaksanaan militer Soviet sejak Perang Dunia II. Lebih penting adalah pengurangan pasukan yang dijanjikannya, bukan saja jumlahnya tetapi juga sifatnya. Barat sejak lama menegaskan bahwa segala persetujuan kekuatan konvensional menuntut agar Uni Soviet menempatkan pasukan-pasukannya dalam posisi defensif. Gorbachev berjanji akan bergerak ke arah itu dengan menarik mundur satuan-satuan serbu, peralatan menyebe-

rangi sungai dan tank-tank yang mengancam suatu *blitzkrieg* (perang kilat) di Eropa Tengah. *Menangkal serangan semacam itu* adalah alasan inti eksistensi NATO.

2. Pasukan-pasukan itu juga telah berfungsi sebagai alat untuk mengendalikan bangsa-bangsa Eropa Timur dan *penaklukan bangsa-bangsa itu merupakan sebab lain perang dingin*. Pengurangan pasukan yang diusulkan Gorbachev itu belum tentu menyingkirkan Tirai Besinya, tetapi pidatonya di PBB itu menjanjikan bahwa "kebebasan memilih adalah suatu asas universal yang tidak mengijinkan adanya suatu kekecualian," dan ia menambahkan "Ini berlaku baik untuk sistem kapitalis maupun sistem komunis."

3. Sasaran Gorbachev menggeser sumber-sumber daya dari kebutuhan militer ke kebutuhan domestik tepat mengena *jantung sumber ketegangan Timur-Barat* yang berkaitan: *militarisasi masyarakat Soviet*. Sejak Gorbachev berkuasa, ahli-ahli AS memperkirakan bahwa uang yang dibelanjakan untuk pertahanan terus meningkat, suatu tanda bahwa perang dingin belum mencapai gencatan senjata. Tetapi dalam pidatonya itu Gorbachev mengumumkan bahwa Moskwa akan mengumumkan rencananya untuk mengubah beberapa pabrik militer untuk pemakaian sipil. Jika dilakukan, hal itu akan merupakan pelengkap usul pengendalian senjatanya, yang didasarkan atas doktrin "kecukupan masuk akal" yang baru dan tak jelas batasannya. Menurut doktrin ini, kemampuan Soviet tidak perlu mempunyai potensi untuk melancarkan suatu serangan mendahului tetapi semata-mata memadai untuk menanggapi suatu serangan terhadap Uni Soviet dan sekutu-sekutunya.

4. Perselisihan yang paling mendalam antara Barat dan Uni Soviet adalah bahwa *sistem totaliternya menindas individu*. Tetapi Gorbachev menandaskan maksud Uni Soviet untuk menciptakan suatu "masyarakat negara-negara dunia yang berdasarkan *rule of law*." Ia kedengaran lebih mirip dengan Jefferson daripada Lenin, ketika ia mengatakan "menjamin hak-hak individu," menjamin "kebebasan kata hati" dan melarang pengejaran atas dasar "kepercayaan politik atau religius."

5. Mengenai masalah *emigrasi*, Gorbachev berjanji akan mengatasi soal para pembelot dengan merevisi UU Kerahasiaan yang mencegah banyak warga Soviet meninggalkan Uni Soviet. Ia berjanji bahwa sesudah waktu tertentu setiap orang yang ingin beremigrasi atau bepergian akan dapat melakukannya. Secara lebih luas, ia bicara tentang kesia-siaan mempertahankan restriksi-restriksi yang dimaksud untuk menutup Uni Soviet dari dunia luar. "Dewasa ini, hampir tak mungkin mempertahankan jenis masyarakat tertutup," katanya. Menjelang kedinarnya di AS, pengangguan Radio Liberty dihentikan.

6. Komponen lain perang dingin adalah *kecurigaan*, termasuk kepercayaan Barat bahwa Uni Soviet menuntut hak untuk "berdusta dan menipu" seperti dikatakan Reagan 8 tahun yang lalu, bila perlu untuk kepentingannya. Gorbachev yang membalik kebijaksanaan lama Kremlin dengan menyertuji diadakannya pemeriksaan instalasi-instalasi militer di tempat, berusaha dalam pidatonya itu menyingkirkan suatu isyu kepatuhan dengan Perjanjian Rudal Antibalistik: Stasiun Radar Krasnoyarsk. Ia mengatakan bahwa Moskwa akan menerima "pembongkaran dan penyesuaian" komponen-komponen tertentu, dan menempatkan fasi-

litas itu di bawah pengawasan PBB. Pada acara makan siang dengan Reagan dan Bush sesudah pidato itu, seorang Amerika bertanya: "Kami mendengar kata pembongkaran itu tepat?" Gorbachev menjawab: "Saya, itulah kata yang saya gunakan."

Setelah pidato itu selesai, Shultz menemui Raisa dan mengatakan kepadanya: "Suatu pidato yang sangat baik dan penting." Seperti diketahuinya, hal itu bergantung apakah kenyataan-kenyataan Soviet sesuai dengan retorika Gorbachev itu. Bila demikian halnya, ramifikasinya luar biasa. Bila Gorbachev berhasil *mengurangi ancaman ekspansionis Moskwa terhadap Barat, mengendorkan dominasinya atas Eropa Timur dan mengubah hubungan represifnya dengan warganya, maka alasan-alasan fundamental untuk pertarungan global antara Timur dan Barat -- dan rationale untuk politik pembendungan yang membentuk pendekatan AS selama 40 tahun -- akan lenyap.*

Sikap skeptis sudah barang tentu dapat dibenarkan dan bijaksana. Visi Gorbachev memiliki suatu *keberanian yang timbul dari keharusan*: ia mampu membungkus sebagai hadiah keharusannya untuk menggeser investasi Soviet ke arah barang-barang konsumsi dan memperkenalkannya sebagai suatu paket diplomasi yang menahan nafas. Sebagai seorang politikus ia berusaha melindungi kekuasaannya dengan menghasilkan kemenangan-kemenangan di panggung dunia dan hasil perestroika dalam negeri. Dengan menawarkan suatu pengurangan pasukan yang terbatas yang akan menyingsirkan hal-hal yang tidak perlu dari angkatan bersenjata ia mencapai kedua tujuan itu.

Semboyan Gorbachev *glasnost* dan *pere-*

stroika juga mengandung bahaya bahwa ia hanya mencari suatu ruang bernafas dengan mengadakan akomodasi sementara agar revolusinya dapat bergerak maju dengan semangat baru.

Perubahan Fundamental Sistem Soviet

Tetapi bahaya yang lebih besar adalah kemungkinan bahwa suatu sikap terlalu berhati-hati dapat membuat AS *mengabai-kan suatu titik-balik bersejarah dalam per- caturan dunia*. Mereka yang mencerca langkah-langkah Gorbachev belakangan ini, tahun yang lalu mengusulkan agar banyak dari langkah-langkah itu -- mengenai emigrasi, konfigurasi pasukan, hak-hak individu, mengendorkan kontrol di Eropa Timur -- digunakan sebagai batu ujian maksud-maksud Soviet. Dengan setiap langkah Gorbachev, semakin banyak bukti bahwa ia tidak semata-mata mencari ruang bernafas tetapi *suatu perubahan fundamen-tal dalam sistem Soviet*.

Soal kunci mengenai Gorbachev di masa lampau adalah apakah ia jujur. Pertanyaan itu sudah tidak relevan. Seperti diketahui AS ketika ia akhirnya memutuskan untuk memberikan jawaban positif mengenai perjanjian senjata nuklir jarak sedang, kata-kata Gorbachev mempunyai konsekuensi-konsekuensi.

Jauh lebih relevan adalah soal *apakah ia akan berhasil*. Pengunduran Marsekal Akhromejev secara tiba-tiba merupakan peringatan bahwa ada kemungkinan birokrasi militer yang mendukung penyingkiran Khruschev menyusul usahanya untuk mengurangi angkatan bersenjata dapat berbuat yang sama terhadap Gorbachev. Tidaklah

jelas apa yang terjadi dengan Akhromejev dan apakah peranannya di hari depan, tetapi diketahui bahwa seperti kebanyakan birokrat militer Soviet ia tidak mendukung pengurangan pasukan secara sepah.

Pada KTT di Washington tahun yang lalu, Akhromejev menggunakan suatu pepatah Rusia kuno dengan Penasihat Keamanan Nasional Colin Powel "Amatilah apa yang kami lakukan, tidak apa yang kami katakan." Para skeptisi Barat menggunakan kalimat yang sama untuk memperingatkan bahaya dibujuk oleh Gorbachev. Kritisisme bahwa ia hendaknya dinilai berdasarkan tindakan-tindakannya dan bukannya berdasarkan kata-katanya dalam kenyataan merupakan suatu kesaksian tak langsung bahwa apa yang dikatakannya itu luas pengaruhnya. Pengumuman gagasan-gagasan itu di forum PBB berfungsi sebagai acuan yang dapat digunakan di Uni Soviet untuk menekan birokrasi. Seperti dikatakan oleh seorang pejabat Deplu minggu yang lalu: "Anda tidak dapat tampil dalam forum seperti ini, menjajikan hal-hal dan tidak menepatinya. Hal itu tak terbayangkan."³

Tantangan Bagi Presiden Bush

Dengan menyampaikan gagasan-gagasan pada waktu AS tidak mampu menjawab, Gorbachev menjamin bahwa ia mempertahankan inisiatif moralnya yang membuatnya menjadi pemimpin paling populer di sebagian besar Eropa Barat. Dengan demikian Bush akan mulai dalam posisi yang tak pernah dihadapi Presiden lain manapun: sampai jaman Gorbachev, ASlah yang mengambil inisiatif dan Uni Sovietlah yang

menggerutu dan mengulur waktu dan akhirnya memberikan jawaban setengah hati. Sekarang koreografinya dibalik.

Tantangan Bush sekarang ini adalah menyelamatkan kesatuan NATO di hadapan permusuhan yang berkurang. Demikian pun tantangan Gorbachev adalah melihat sejauh mana ia dapat bergerak di Eropa Timur menuju suatu sistem yang berdasarkan "kebebasan memilih," dan bukannya "ancaman kekerasan" tanpa memecah Pakta Warsawa.

Tetapi ada *tantangan yang bahkan lebih rumit* yang disampaikan oleh Gorbachev kepada Bush dengan pidatonya di PBB itu: pertempuran jangka panjang untuk Eropa akan menguasai dasawarsa 1990-an. Pada akhir 1992, integrasi Eropa Barat menjadi suatu pasaran bersama akan formal sekali pun belum lengkap; hasilnya bukan saja suatu sistem ekonomi tetapi juga seorang pelaku politik yang kuat. Demikian pun, sementara negara Eropa Timur kiranya akan melebarkan sayap ekonominya dan belajar terbang dari sarangnya di Moskwa, mungkin bahkan sebagai rekan terbatas dalam Masyarakat Eropa.

Gorbachev yang menandaskan pahamannya bahwa kompetisi untuk pengaruh di Eropa akan kurang lebih bergantung pada kekuatan militer daripada kekuatan ekonomi, mengajukan klaimnya di bawah bendera *rumah bersama* dari pegunungan Ural sampai samudera Atlantik, yang dimiliki bersama bangsa Soviet dan Eropa Barat. Dengan mengadakan perdagangan, membuka pasaran dan mencari kredit (maupun dengan mengurangi pasukan secara sepah) Gorbachev mengharap membujuk Eropa Barat untuk ikut memiliki visi rumahnya.

³Time, 19 Desember 1988.

Bush tidak pernah mempunyai visi dan calon Menlu James Baker belum menunjukkan bahwa ia bisa menjadi konseptor tujuan-tujuan strategis. Tetapi inisiatif Gorbachev menciptakan suatu peluang besar bagi tim baru itu: untuk membatasi kembali peranan AS di dunia dengan suatu keberanian yang bisa menjauhkan Bush dari bayangan Gorbachev maupun Reagan.

Untuk menandingi "rumah bersama" Gorbachev, Bush bisa menekankan "cita-cita bersama" -- pasaran bebas, perdagangan bebas dan rakyat bebas yang telah menjadi basis positif bagi persahabatan Amerika dengan Eropa Barat yang lahir dengan rencana Marshall. Suatu aliansi yang pernah didasarkan atas suatu keharusan akan menjadi suatu aliansi berdasarkan *nilai-nilai bersama*.

Bush juga dapat menyajikan suatu visi tujuan-tujuan Barat yang mengatasi pertarungan perang dingin. Keharusan membendung pengaruh Soviet sering mendorong para pembuat kebijaksanaan AS untuk menahan idealisme alami Amerika dan mendukung rejim-rejim yang satu-satunya sifat baiknya adalah sikap anti-komunisnya. Sejauh pemikiran baru Gorbachev membuatnya kurang penting, AS dan Eropa Barat bebas untuk mengejar tujuan-tujuan yang lebih positif. Di antaranya menangani masalah-masalah lingkungan yang tidak dapat ditangani atas dasar nasional, menyusun metode-metode baru untuk membendung penyebaran senjata nuklir, senjata kimia dan biologi, mengurangi kelaparan dan kemiskinan dunia, menyelesaikan sengketa-sengketa regional.

Gorbachev telah mengambil inisiatif dalam sejumlah isyu itu dan berusaha menjadi pemimpin. Masing-masing isyu itu me-

rupakan suatu peluang bagi Timur dan Barat untuk *bekerjasama*. Tetapi tidak kalah pentingnya, masing-masing memberi Bush peluang untuk *menegakkan visi dan nilai-nilai yang ditawarkan AS dan sekutu-sekutunya kepada dunia*. Pada jaman Gorbachev pemikiran baru menjadi monopoli Soviet. Kalau Bush ingin menentukan jaman sendiri, ia harus mulai dengan mengingatkan dunia bahwa pemikiran baru juga merupakan spesialitas Amerika.

Penutup

Dari apa yang diuraikan di atas itu dapat ditarik kesimpulan bahwa garis baru dalam politik luar negeri Soviet yang mempunyai dasar yang kuat dan konsisten dengan seluruh program pembaruan Uni Soviet di bawah Gorbachev itu merupakan suatu perkembangan penting yang positif. Garis baru itu mengungkapkan bahwa Uni Soviet demi kepentingan nasionalnya bertekad untuk memajukan *koeksistensi damai dan stabilitas internasional*. Dengan demikian terbuka jalan baginya untuk memperbaiki hubungannya dengan AS dan sekutu-sekutunya maupun dengan RRC dan negara-negara ASEAN. Peluang untuk menyelesaikan sengketa-sengketa regional juga menjadi lebih besar. Diperkirakan bahwa Uni Soviet akan bekerjasama dengan AS dan lain-lain negara untuk menyelesaikan perang saudara di Angola, pemberontakan Eritrea, masalah Kampuchea, sengketa Arab-Israel, masalah Nikaragua dan lain-lain. Secara demikian Uni Soviet akan tampil sebagai suatu negara adidaya yang bertanggungjawab dan mampu membebaskan lebih banyak sumber daya

bagi pembangunan dan modernisasi ekonominya. Oleh sebab itu negara-negara lain khususnya AS dan sekutu-sekutunya dapat menyambut baik garis baru Soviet ini dan

menanggapinya secara positif. Terwujudnya dunia yang lebih aman dan lebih baik untuk sebagian besar bergantung pada saling pengertian dan kerjasama Timur-Barat.

DAFTAR BACAAN

- Rashda Anwer, "Asia Pacific Region: Impact of Gorbachev's Peace Initiatives," dalam *Pakistan Horizon*, April 1988, hal. 69-95.
- Seweryn Bialer, "'New Thinking' and Soviet Foreign Policy," dalam *Survival*, XXX/4 (Juli-Agustus 1988), hal. 291-309.
- "Brave New World," dalam *Newsweek*, 19 Desember 1988. Ulasan tentang pidato Gorbachev di PBB pada 7 Desember 1988.
- "The Gorbachev Challenge," dalam *Time*, 19 Desem-

ber 1988. Analisa prakarsa Gorbachev untuk mengakhiri Perang Dingin.

Paul Harantz, "Soviet 'New Thinking' and East-West Relations," dalam *Current History*, 87/153 (1988), hal. 309-312.

"The World Is Radically Different Today," dalam *Jakarta Post*, 12-14 Desember 1988. Versi Inggris pidato Gorbachev di PBB pada 7 Desember 1988.

"This Is Not Just a Matter of Tactics," dalam *Newsweek*, 19 Desember 1988. Komentar atas prakarsa Gorbachev untuk mengakhiri Perang Dingin.

Amerika Serikat - Jepang: Dari Pax Americana ke Pax Consortis?

Bantarto BANDORO

DENGAN ALASAN-ALASANNYA sendiri Jepang, setelah Perang Dunia II, memutuskan untuk memusatkan diri pada Amerika Serikat di tiga bidang penting, yaitu politik, militer dan ekonomi dan hal ini telah berlangsung lebih dari tiga dasawarsa. Dengan mengurung diri dengan Amerika Serikat, Jepang telah menciptakan suatu potensi untuk kejengkelan dan konflik-konflik. Hubungan Amerika Serikat-Jepang dalam dua-tiga tahun terakhir menggambarkan keadaan itu dan masih banyak lagi persoalan yang dihadapi dalam hubungan antara kedua negara. Meskipun demikian, hubungan antara Amerika Serikat dan Jepang tetap mempunyai arti penting.

Diskusi mengenai hubungan antara kedua negara akhir-akhir ini semakin meluas terutama karena perubahan-perubahan dalam situasi internasional yang mempunyai dampak langsung pada hubungan itu maupun pada negara-negara itu secara individu. Dalam diskusi itu muncul pandangan me-

ngenai perlunya penyesuaian dalam peranan internasional dan pembagian beban dan tanggungjawab antara Amerika Serikat dan Jepang. Lebih lanjut, Jepang memang harus dipaksa belajar menanggung bebananya secara mandiri setelah sekian lama menikmati keuntungan sebagai pembonceng (*free rider*) dalam perkembangan politik internasional.

Akhir-akhir ini muncul suatu spekulasi bahwa dalam abad mendatang akan muncul pengaturan baru sistem internasional yang didasarkan atas peranan dominan Jepang. Banyak yang meramalkan Jepang, yang dianggap sebagai pesaing utama Amerika Serikat dalam bidang-bidang tertentu, akan menggantikan era *Pax Americana* yang dianggap mulai memudar. Ada pula yang meramalkan bahwa Amerika Serikat dan Jepang akan bersatu dan membangun era tersendiri. Pertanyaan yang muncul di sini adalah apakah pengaturan-pengaturan baru itu akan membuat situasi internasional menjadi lebih stabil daripada sebelumnya?

Akhir Era Pax Americana?

Siklus panjang, menurut George Modelski dalam artikelnya "The Long Cycles of Global Politics and the Nations State" (*Comparative Studies in Society and History*, 1978), adalah suatu proses perubahan dalam struktur politik pada tingkat global. Esensinya adalah berkembangnya suatu negara ke posisi kepemimpinan dunia dan kompetisi ke arah itu. Kepemimpinan dunia dapat diartikan sebagai pelaksanaan oleh suatu negara suatu fungsi pengaturan dan mempertahankan interaksi dalam tingkat global. Fungsi itu mempunyai dua dimensi penting, yaitu politik dan ekonomi. Dimensi politik mencakup tindakan-tindakan untuk menciptakan tata dunia baru dengan menggeser tata yang lama; sedangkan signifikansi dari dimensi ekonomi adalah bahwa porsi terbesar dari interaksi global yang harus ditata menyangkut perdagangan internasional dan masalah-masalah ekonomi lainnya.

Fungsi semacam itu telah pernah dilaksanakan dan dicapai melalui suatu suksesi negara-negara yang memiliki karakteristik tertentu, yaitu kesiapan akses ke laut, kemampuan menguasai laut, dan memiliki sumber daya ekonomi dan organisasi politik yang memadai. Menurut Modelski, negara-negara yang dapat memainkan peranan semacam itu disebut kekuatan dunia.

Dunia memang pernah menyaksikan munculnya kekuatan-kekuatan seperti itu. Portugal, misalnya, adalah kekuatan yang menonjol dalam abad-16 karena mampu memperlihatkan kepemimpinannya dengan menggerakkan sistem dunia kepada tingkat kompleksitas yang tinggi dengan mempelopori rute Cape ke Asia dan menguasai laut dunia sampai berakhirknya abad itu. Persa-

tuan Propinsi Belanda (UPN - *The United Province of Nederlands*) muncul sebagai kekuatan dunia dalam abad berikutnya dengan mengalahkan Spanyol yang berusaha menguasai sistem dunia. Kemudian Inggris menggeser supremasi UPN dan menjadi kekuatan baru selama hampir dua abad. Inggris tidak hanya berhasil menjamin keamanan interaksi di laut tetapi juga menentukan struktur umum hubungan internasional dan transformasi pola hubungan ekonomi internasional dalam abad-19. Abad yang didominasi oleh peranan dan pengaruh Inggris ini dikenal sebagai *Pax Britanica*.

Meskipun mampu bertahan selama kurang lebih dua abad, era *Pax Britanica* akhirnya pudar. Penyebab utamanya, menurut Robert Keohane dan Joseph S. Nye (*Power and Interdependence*, 1977), adalah pergeseran besar-besaran dalam perimbangan kekuatan secara keseluruhan karena tamplinya kekuatan ekonomi dan militer baru dan ketidakmampuan negara pemimpin dunia sebelumnya (Inggris) untuk menjamin tujuan-tujuan ekonomi dan politik negaranya. Amerika Serikat, yang karena inovasi strategi, militer dan diplomatik berhasil menciptakan keamanan dan melaksanakan aturan-aturan tata ekonomi internasional liberal, muncul sebagai kekuatan dunia baru dalam abad-20 menggantikan Inggris. Era *Pax Americana* dianggap mulai muncul dalam abad itu dan sejak tahun 1945 Amerika Serikat memainkan peranan kekuatan dunia dalam siklus kelima politik global (Modelski, 1982). Amerika Serikat telah memberi sumbangan berarti bagi terpeliharanya tata internasional yang telah mendatangkan kestabilan relatif bagi dunia.

Akan tetapi dalam beberapa tahun belakangan ini telah muncul anggapan bahwa Amerika Serikat bukan lagi kekuatan do-

minan dalam arti ekonomi dan politik. Menurunnya kredibilitas Amerika Serikat mendorong timbulnya pandangan-pandangan sinis terhadap posisinya di dunia. Modelski menggambarkan keadaan ini sebagai "krisis legitimasi." Era *Pax Americana* yang didasarkan atas keunggulan kekuatan politik, ekonomi dan militer Amerika Serikat dianggap telah memperlihatkan tanda-tanda kepudaran. Pemerintah Amerika Serikat dibawah Reagan memang berusaha keras memulihkan vitalitas ekonomi Amerika Serikat dan memperkuat kemampuan militernya. Tetapi baik Eropa maupun Jepang mungkin tidak dapat berharap untuk kembali kepada era di mana mereka mampu memusatkan perhatian pada soal-soal ekonomi.

Sehubungan dengan itu banyak yang meramalkan bahwa awal abad mendatang akan muncul beberapa kekuatan yang memiliki kekuatan sama dalam peringkat atas. Bekas Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, Henry Kissinger, misalnya, mengatakan bahwa Jepang memiliki potensi untuk menjadi negara pertama di antara negara-negara kuat yang sudah ada dengan "kekuatan militer dan finansial yang berarti." Dengan kekuatan industri dan finansialnya, Jepang, yang jika ditempatkan dalam kerangka analisa Modelski dapat dianggap sebagai pesaing utama dari negara kuat yang sudah ada, akan merupakan faktor baru dalam ekuasi kekuatan. Jadi, pada saat muncul pandangan-pandangan mengenai menurunnya kredibilitas Amerika Serikat secara relatif, perhatian terhadap Jepang, yang mulai muncul ke permukaan percaturan politik internasional, semakin besar.

Paul Kennedy, penulis *The Rise and Fall of the Great Powers* (1987) mengatakan tidak ada alasan bagi Jepang untuk berhenti berkembang. Sementara itu, Clyde Presto-

witz, bekas Wakil Asisten Menteri Perdagangan dalam pemerintahan Reagan dan penulis *Trading Places: How We Allow Japan to Take a Lead?* (1987), menganggap era Amerika Serikat telah berakhir dan berpendapat bahwa perkembangan besar dalam akhir abad ini adalah munculnya Jepang sebagai negara superpower. Sejalan dengan semakin luasnya anggapan itu, ahli strategi Barat mulai membayangkan suatu skenario bagi Jepang, yaitu dari *superrich ke superpower*, jika mendiskusikan meningkatnya pengaruh Jepang. Pertanyaan yang muncul di sini adalah apakah dunia akan menyaksikan *Pax Nipponica* 25 tahun mendatang, atau apakah Jepang, yang dianggap sebagai bankir, akan membangun persahabatan baru dengan Amerika Serikat guna menciptakan *Pax Amerippon*?

Pax dan Stabilitas

Dalam bahasa Latin *Pax* berarti perdamaian, suatu keadaan yang menggambarkan era-era tertentu dalam tiga abad terakhir yang diciptakan oleh negara-negara yang telah disebutkan di atas, yaitu Portugal, Belanda, Inggris dan Amerika Serikat. Walaupun dua negara yang disebut pertama betul-betul menciptakan perdamaian melalui dominasi mereka terhadap perdagangan dunia, dominasi kedua negara itu terhadap sistem internasional tidak dapat menyamai Inggris dan Amerika Serikat. Menurut Robert Gilpin (*War and Change in World Politics*, 1983) hanya Inggris dan Amerika Serikat yang dapat disebut sebagai pencipta stabilitas dan perdamaian dalam politik dunia.

Teori stabilitas atau teori neo-realism yang dikembangkan oleh penulis-penulis seperti Charles Kindleberger, Robert Keohane,

Robert Gilpin dan Richard Rosecrance, ini berpendapat bahwa stabilitas dalam politik internasional dimungkinkan karena kelancaran suplai *public goods* dari negara terkuat ke negara-negara kurang kuat. Kestabilan, untuk sementara, bisa goncang jika terjadi pergeseran dari satu era yang didominasi oleh satu kekuatan ke era lain yang di dominasi oleh kekuatan lain yang lebih kuat. Menurut teori itu, pergeseran itu biasanya terjadi melalui peperangan. Tetapi hal ini tidak mutlak. *Pax Britanica* berakhir tanpa melalui suatu peperangan dan tidak pula langsung digantikan oleh *Pax Americana*. Pada waktu itu terdapat masa peralihan selama dua puluh tahun yang oleh E.H. Carr (*The Twenty Years' Crisis, 1919-1939*, 1951) disebut "Krisis dua puluh tahun."

E.H. Carr sendiri pernah meramalkan bahwa jika kepemimpinan Inggris di dunia memudar, Amerika Serikat, dan bukan Jepang, akan menggantikan mantel kepemimpinan dunia. Era yang muncul kemudian memang dianggap sebagai era Amerika Serikat. Tetapi tidak ada yang meramalkan sebelumnya bahwa *Pax Americana* akan memperlihatkan tanda-tanda kepuddaran seperti yang dewasa ini diakui oleh banyak pengamat. Mereka mengakui apa yang dihadapi oleh *Pax Americana* sekarang ini sama dengan keadaan awal yang dihadapi oleh *Pax Britanica* sebelum ia pudar samasekali. *Pax Americana* sekarang ini sesungguhnya belum sepenuhnya memperlihatkan tanda-tanda kepuddaran. Meskipun demikian, diskusi mengenai pengganti era itu seperti *Pax Nipponica*, *Pax Americana* atau *Pax Consortis* telah mulai berkembang di kalangan pengamat masalah-masalah internasional.

Era yang disebut terakhir (*Pax Consortis*) adalah konsep yang digunakan oleh pe-

nulis Jepang Inouuchi Kuniko, dalam bukunya *Posto-haken shisutemu to Nihon no sentaku*, 1987 (Sistem Paska Hegemoni dan Opsi Jepang), untuk membahas pergeseran paradigma abad sekarang ke abad mendatang dan kemungkinan partisipasi Jepang dalam paradigma baru itu. Konsepnya itu merupakan jawaban terhadap persoalan yang kini ramai dibicarakan oleh para ahli hubungan internasional Jepang, yaitu apakah yang akan terjadi jika era *Pax Americana* itu betul-betul berakhir. Apakah menuju kredibilitas Amerika Serikat akan menimbulkan "perang hegemoni" dengan Jepang? Atau apakah *Pax Americana* dengan sengaja akan memberikan jalan kepada *Pax Nipponica*? Oleh karena terdapat keragu-raguan di pihak Jepang bahwa Amerika Serikat tidak dapat diharapkan bersedia berkorban untuk bangsa Jepang, maka Jepang, yang menurut hasil studi di Jepang, mempunyai kemampuan untuk menyumbang pada masyarakat internasional, sekarang ini mencoba membayangkan apa yang ia dapat lakukan.

Potensi Dasar dan Kemampuan Eksekutif Menuju Pax Nipponica?

Apa yang dipikirkan pemimpin-pemimpin Jepang dewasa ini mengenai apa yang ia dapat lakukan sangat berkaitan dengan potensi dasar dan kemampuan eksekutif Jepang. Dalam arti bagaimana mereka dapat memobilisasi potensi mereka guna menyumbang kepada masyarakat internasional. Unsur-unsur penting dalam potensi dasar adalah kemampuan ekonomi, kekuatan finansial dan kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi; sedangkan dalam kemampuan eksekutif termasuk kekuatan fiskal, konsensus kebijakan luar negeri dan kemampu-

an untuk bertindak dalam masyarakat internasional. Ramalan bahwa Jepang akan muncul sebagai negara *superpower* mungkin didasarkan atas potensi dasar itu. Karena potensinya itu, muncul pandangan bahwa berdasarkan kebolehan bangsa Jepang mengadakan penyesuaian-penyesuaian terhadap perkembangan-perkembangan baru, maka probabilitas ke arah itu cukup tinggi.

Selanjutnya, meskipun proses pengambilan keputusan di Jepang, di mana diungkapkan tinggi kaidah "multi konsensus," berjalan lambat, tidak dapat diingkari bahwa seketika dihasilkan kesepakatan *ala* Jepang itu, dengan cepat dan seringkali secara diam-diam suatu prakarsa dapat diterjemahkan dalam rencana dan pelaksanaannya dengan hasil yang bisa mengejutkan tidak hanya pihak-pihak luar tetapi juga bangsa Jepang sendiri. Ini berarti ia mampu membuktikan kemampuan eksekutifnya. Jika pemimpin-pemimpin Jepang mengakui potensi-potensi tadi dan memperlihatkan kemauan politik yang keras tanpa perhitungan apa-apa untuk memainkan peranan dan mengambil sikap yang lebih aktif dalam percaturan politik internasional, maka, dengan menggeser posisi dominan dan kepemimpinan Amerika Serikat meskipun tidak perlu melalui peperangan seperti dinyatakan oleh teori di atas, *Pax Nipponica*, seperti diramalkan banyak orang, mungkin akan muncul dan Jepang tidak akan lagi dianggap kerdil dalam percaturan politik.

Pertanyaan yang muncul di sini adalah apakah Jepang dapat menjadi negara yang betul-betul kuat untuk menciptakan *Pax Nipponica* tanpa memiliki kapabilitas militer yang tinggi? Menurut Modelske, kekuatan militer adalah salah satu dasar utama kekuatan dunia. Suatu hasil studi yang pernah dilakukan oleh Badan Perencana Jepang

(1987) menunjukkan bahwa Jepang tidak mempunyai pengaruh internasional yang besar karena ia tidak memiliki kekuatan militer untuk memaksakan kehendaknya. Tidak hanya itu. Jepang, karena kebrutalannya dalam masa perang (*Newsweek*, 12 September 1988), dianggap tidak memiliki dasar moral yang tinggi untuk bertindak sebagai pemimpin bangsa-bangsa yang bebas. Bangsa-bangsa ini, terutama di Asia, tidak menganggap Jepang sebagai pemimpin, karena masih banyak kecurigaan yang besar mengenai intensi Jepang di kawasan.

Dari sudut pandangan Asia, agaknya penting bagi Jepang untuk menunjukkan bahwa ia tidak memiliki intensi untuk mendominasi kawasan. Kesungguhan Jepang itu perlu dipahami oleh semua orang dan setelah mereka memahami mungkin Jepang akan lebih bebas menjalankan pengaruhnya. Tetapi jika kita berbicara mengenai kekuatan nasional Jepang secara keseluruhan, Jepang tidak akan pernah menjadi negara nomor satu di dunia, apalagi hegemoni. Bagi Jepang demokrasi adalah konsep pinjaman dan oleh sebab itu ia segan untuk bertindak sebagai "penjelajah" dalam percaturan politik internasional. Seorang akademisi Jepang dari Universitas Tokyo berpendapat bahwa Jepang harus memiliki pandangan dan visi sendiri jika ingin dianggap sebagai negara pemimpin yang berpengaruh. Agaknya Jepang tidak memiliki inisiatif semacam itu.

Ramalan bahwa *Pax Nipponica* akan menggantikan *Pax Americana* dalam abad mendatang tampaknya didasarkan atas penilaian yang terlalu berlebihan atas potensi dasar itu. Ingatan bangsa-bangsa di dunia, terutama di Asia, mengenai tingkah-laku Jepang dalam masa perang, dan faktor-faktor lainnya adalah kendala-kendala

konstan bagi kemungkinan tindakan-tindakan baru Jepang. Hal ini sudah tentu membatasi sejauh mana Jepang dapat berkembang menjadi negara *superpower* dan "pemimpin dunia" menggantikan mantel *Pax Americana*. Belum banyak negara-negara yang bersemaing melihat Jepang memainkan peranan ekonomi, politik apalagi militer yang lebih besar daripada apa yang bisa ia lakukan sekarang. Sebab hal itu hanya akan membangkitkan kembali ketakutan, dan mungkin juga antagonisme, bangsa-bangsa di dunia.

Apabila sejarah Jepang sendiri dapat diambil sebagai panduan, akan terdapat indikasi bahwa Jepang sesungguhnya sangat mengutamakan kerukunan internnya. Tindakan drastis Shogun Ieyaso pada tahun 1610 untuk memberlakukan "hambatan perdagangan" yang telah membawa Jepang pada pengucilannya, terutama dimaksudkan untuk memelihara perdamaian dan kerukunan intern Jepang.

Selanjutnya, mengingat pengalaman Jepang dalam bidang politik internasional masih minimal, kemungkinan membuat kesalahan diperkirakan cukup besar. Dalam keadaan dunia seperti dewasa ini suatu kegagalan diplomasi-politik bisa mempunyai akibat yang parah bagi perekonomian Jepang. Jadi dalam rencana dan pemikiran itu, jika memang ada, terkandung suatu dilema.

Pax Amerippon atau Pax Consortis?

Tampaknya telah menjadi suatu kesepakatan umum untuk menganggap abad-20 sebagai era *Pax Americana*, karena kemampuan Amerika Serikat mencapai fungsi-fungsi global. Tetapi era itu dewasa ini dianggap mulai memudar. Jepang, pesaing utama Amerika Serikat dalam bidang-bi-

dang tertentu, dianggap memiliki potensi untuk menggantikan era *Pax Americana*. Tetapi selain karena kendala-kendala seperti disebutkan di atas, berkembangnya Jepang ke arah itu terutama akan sangat tergantung pada kemauan politik pemimpin-pemimpin Jepang dan, lebih penting lagi, kesediaan dan kematangan politik masyarakat Jepang untuk menerima peranan semacam itu. Pernyataan Perdana Menteri Jepang, Takeshi, bahwa "kepemimpinan" merupakan kata yang arogan (*South*, Oktober 1988) mungkin dapat dianggap sebagai petunjuk sementara bahwa pemimpin Jepang tidak mau membiarkan negaranya berkembang ke arah kepemimpinan dunia. Mungkin orang akan menginterpretasikan pernyataan ini sebagai suatu sikap yang membiarkan Amerika Serikat memainkan peranan seperti sekarang ini.

Setiap pemerintah Amerika Serikat menyatakan bahwa hubungan dengan Jepang merupakan salah satu hubungan yang paling penting. Jepang pun melihat hubungannya dengan Amerika Serikat sebagai salah satu pilar utama politik luar negerinya. Lalu, dalam keadaan dunia seperti dewasa ini, bagaimana Jepang melihat hubungannya dengan Amerika Serikat yang kredibilitasnya dianggap relatif menurun? Pendapat umum yang dianut oleh politikus dan para ahli hubungan internasional Jepang adalah bahwa Jepang dan Amerika Serikat perlu memikul tanggungjawab bersama dalam mengelola politik dan tata ekonomi internasional, dan bahwa Amerika Serikat harus terus mengadakan tukar pikiran dengan Jepang dan sehubungan dengan keputusan-keputusan mengenai kebijakan yang mempengaruhi Jepang, Amerika Serikat harus berkonsultasi dengan Jepang.

Hal itu berarti bahwa Jepang tidak

hanya membutuhkan kerjasama yang erat dan luas dengan Amerika Serikat, tetapi juga harus bersedia memperluas kontribusinya dalam bidang bantuan ekonomi dan kegiatan diplomatik untuk mencapai tingkat pembagian beban yang adil dengan Amerika Serikat. Hubungan yang dikembangkan ke arah itu akan memberikan kesan dibangunnya bentuk hubungan baru seperti diramalkan banyak pengamat, yaitu *Pax Amerippon*, di mana Jepang, yang dianggap sebagai bankir dan pemasok teknologi maju, akan membentuk persahabatan dengan Amerika Serikat yang mengurusi masalah-masalah keamanan. Spekulasi yang semakin meluas mengenai era itu seakan-akan mengingatkan kita pada koalisi yang pernah dibentuk dalam abad-17 antara Inggris dan kelompok anti-Perancis.

Apa yang terlihat dalam hubungan Amerika Serikat - Jepang dewasa ini sesungguhnya belum menggambarkan kecenderungan itu dan tampaknya tidak ada prospek bagi munculnya *Pax Amerippon*. Ketegangan-ketegangan sering terjadi dalam hubungan itu, misalnya karena kasus Toshiba yang terjadi tahun 1987. Ketegangan itu bisa berasal dari kesenjangan persepsi atau perbedaan-perbedaan pokok lainnya dalam bidang-bidang kebijakan substantif. Semua ini membuat hubungan kedua negara pasang surut. Banyak yang menganggap Amerika Serikat dan Jepang sebagai *trouble partnership* dan sifat hubungan semacam itu tampaknya akan terus terlihat dalam abad-abad mendatang. Dilihat dari perspektif itu, kemungkinan kolaborasi kebijakan Amerika Serikat dengan Jepang sangat kecil dan *Pax Amerippon* tidak mungkin dikembangkan dengan kondisi semacam itu. Meskipun Amerika Serikat bersedia memperbesar dan memperkuat komitmen keamanan, opsi *Pax*

Amerippon mungkin akan menggugah kontroversi yang cukup besar dari berbagai kalangan di Jepang.

Kalangan industri teknologi di Jepang, misalnya, mungkin akan menolak kolaborasi teknologi dengan Amerika Serikat karena hal itu berarti membiarkan masuknya komponen-komponen penting teknologi Jepang ke dalam industri teknologi Amerika Serikat dan hal ini dapat mempengaruhi keunggulan teknologi Jepang atas Amerika Serikat.

Bagi Jepang opsi yang memungkinkan adalah mengembangkan hubungan kerjasama segitiga antara Amerika Serikat, Jepang dan mungkin juga negara-negara Eropa Barat untuk mencegah atau mengatasi ketidakstabilan dalam sistem internasional yang mungkin timbul dalam abad mendatang. Kerangka kerjasama semacam ini memang memungkinkan Amerika Serikat, Jepang dan negara-negara Eropa, yang mempunyai seperangkat nilai yang sama, secara bersama-sama melaksanakan peranan dan tanggungjawab internasional dalam kerangka *Pax Consortis*, suatu tata internasional yang didesentralisasi yang didasarkan atas kerjasama kebijakan dan koordinasi kepentingan-kepentingan secara kontinyu di antara negara-negara tadi.

Bagi Jepang, munculnya orde semacam itu berhubungan erat dengan pemikiran penulis Jepang tersebut di atas, yaitu bahwa sementara nilai politik dalam abad-19 dan abad-20 masing-masing adalah mencari cara hidup yang beradab dan keadilan sosial, nilai politik yang akan menonjol dalam abad-21 adalah mencari perdamaian dan non-kekerasan.

Apakah Amerika Serikat, Jepang dan negara-negara Eropa akan membangun orde

semacam itu akan sangat tergantung pada persepsi mereka mengenai nilai-nilai yang menonjol dalam abad berikutnya, pada konsensus di antara mereka, pada kondisi-kondisi di ketiga entitas pada saat itu, dan, paling penting, pada jawaban mereka sendiri atas pertanyaan apakah pengaturan baru

yang akan dibangun itu akan membuat sistem internasional menjadi lebih stabil dari pada sebelumnya? Yang jelas, persoalan "sukses" era akan tetap menempati urutan teratas dalam agenda politik dunia dalam dasawarsa-dasawarsa berikutnya.

DAFTAR BACAAN

- Carn, E.H., 1951, *The Twenty Years' Crisis, 1919-1939*. London: MacMillan.
- George, Matheus K. dan Melvyn West Lake, 1988, "Which Way Japan." South, 10: hal. 9-13.
- Gilpin, Robert, 1983, *War and Change in World Politics*. New York: Cambridge University Press.
- Inouguchi, Kuniko, 1987, *Posto-Haken Shisutemu To Nihon No Sentaku*. Tokyo: Chikuma Shobo.
- Inouguchi, Kuniko, 1987, "Prosperity without Amenities. *Journal of Japanese Studies*. 13:1, hal. 125-134.
- "Japan Reaches Out, 1988." *Newsweek*, 12 September, hal. 10-15.
- Kennedy, Paul, 1987, *The Rise and Fall of the Great Powers*. New York: Random House.
- Keohane, Robert O. dan Joseph S. Nye, 1977, *Power and Interdependence: World Politics in Transition*. Boston: Little Brown.
- Modelska, George, 1978, "The Long Cycles of Global Politics and the Nations States." *Comparative Studies in Society and History* (April) 20: 214-235.
- Modelska, George, 1982, "Long Cycles and the Strategy of U.S. Internasional Economic Policy." Dalam Avery dan Rapkin, eds., *America in A Changing World Political Economy*.
- Sakuma, Takashi, 1987, "How Strong A Japan." *Journal of Japanese Trade and Industry*, No. 6, hal. 48-51.

Garis-garis Besar Politik Luar Negeri Indonesia

Kirdi DIPOYUDO

POLITIK LUAR NEGERI suatu negara adalah bagian dari politik nasionalnya dan oleh sebab itu mempunyai landasan dan tujuan-tujuan yang sama. Dengan demikian dapat dikatakan, bahwa landasan dan tujuan-tujuan politik nasional Indonesia adalah juga landasan dan tujuan-tujuan politik luar negeri negara kita. Karena politik nasional kita adalah seluruh kegiatan dan proses dari segala struktur dan fungsi negara dalam rangka mencapai tujuan-tujuan negara sesuai dengan landasannya, maka untuk memahami politik luar negeri Indonesia dan mengetahui garis-garis besar haluannya, kita harus bertolak dari landasan dan tujuan-tujuannya. Sebagai bagian politik nasionalnya, politik luar negeri harus diarahkan pada tujuan-tujuan negara kita sesuai dengan landasan negara.

Garis-garis besar politik luar negeri Indonesia itulah tema ulasan ini. Secara ber-

turut-turut akan dibahas landasan, tujuan-tujuan, sifat-sifat dan asas-asas politik luar negeri negara kita serta pedoman-pedoman pelaksanaannya. Dengan sendirinya pembahasan ini akan bersifat fundamental dan membatasi diri pada pokok-pokok politik luar negeri negara kita.

Landasan Politik Luar Negeri Indonesia

Seperti politik nasional Indonesia politik luar negeri negara kita mempunyai *landasan idil* dan *landasan konstitusional*. Yang pertama adalah Pancasila, yaitu pandangan hidup bangsa Indonesia yang dalam Pembukaan UUD 1945 ditetapkan sebagai dasar falsafah negara Republik Indonesia. Yang kedua ialah UUD 1945 dan Pembukaannya serta ketetapan-ketetapan MPR, khususnya ketetapan No. IV/MPR/1978 tentang Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) yang berlaku sekarang ini. Kedua landasan itu erat berkaitan satu sama lain. Pembukaan UUD 1945 menetapkan Pancasila sebagai

Karangan ini sebagian pernah dimuat dalam *Gema Angkatan 45*, No. 44-50 (Juli 1980-Januari 1981) dengan judul "Politik Luar Negeri Berdasarkan Pancasila."

dasar falsafah negara, sedangkan pasal-pasalnya merupakan penuangan atau pelaksanaan pertamanya. Pada gilirannya Pancasila dan UUD 1945 menjadi dasar penyusunan Garis-garis Besar Haluan Negara. Dalam menyusun strategi politik luar negeri Indonesia dan melaksanakannya kita harus selalu berpegangan pada keduanya.

Landasan idil politik luar negeri Indonesia adalah *Pancasila* seperti ditetapkan dalam Pembukaan UUD 1945. Untuk mencapai tujuan-tujuan negara kita "maka disusulah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia, yang berkeadilan rakyat dengan berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia."

Pancasila terdiri dari *lima pokok pikiran* yang merupakan suasana kebatinan (geistliche Hintergrund) atau aliran yang menjadi dasar UUD 1945 dan mewujudkan cita-cita hukum (rechtsideen) yang menguasai hukum dasar negara, baik yang tertulis (Undang-undang Dasar) maupun hukum yang tidak tertulis. Undang-undang Dasar menciptakan pokok-pokok pikiran itu dalam pasal-pasalnya sebagai jiwanya.

Penetapannya sebagai dasar negara berarti bahwa Republik Indonesia dibangun atas dasar Pancasila, sehingga negara kita harus tunduk kepadanya, menjunjungnya tinggi dan melaksanakannya dalam perundang-undangannya dan kebijaksanaan-kebijaksanaan pemerintah, termasuk kebijaksanaan-kebijaksanaan luar negeri. "Oleh

karena itu Undang-undang Dasar harus mengandung isi yang wajibkan Pemerintah dan lain-lain penyelenggara Negara untuk memelihara budi pekerti kemanusiaan yang luhur dan memegang teguh cita-cita moral rakyat yang luhur," demikian ditegaskan dalam Penjelasan Umum UUD 1945.

Dengan itu dijelaskan bahwa Negara RI dan kehidupannya harus mempunyai watak moral. Moral yang dimaksud di sini ialah budi pekerti kemanusiaan yang luhur dan cita-cita moral rakyat yang luhur. Yang pertama ialah moral universil yang berlaku di manapun, sedangkan yang kedua ialah cita-cita moral rakyat yang luhur, bukan segala asas-asas moral yang dianut di Indonesia. Dengan demikian kita tidak hanya harus memegang teguh moral rakyat Indonesia yang luhur, tetapi juga memelihara nilai-nilai moral umat manusia yang luhur. Kita harus terbuka dan bersedia mengambil-alih nilai-nilai moral dari manapun yang sesuai dan dapat memperkaya moral bangsa kita. Pancasila itu sendiri sebagai filsafat ketatanegaraan Indonesia yang modern adalah hasil akulturasi serupa itu.

Landasan konstitusional politik luar negeri kita yang pertama ialah UUD 1945, khususnya *Pembukaan* yang berbunyi seperti berikut:

"Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perkeadilan.

Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentusa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan Negara Indonesia, yang *merdeka, bersatu, berdaulat, adil*

dan makmur.

Atas berkat rahmat Allah yang maha kuasa dan dengan didorong oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya.

Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang *melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial*, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia, yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan, dalam permusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.”

Yang kami garisbawahi kami anggap paling relevan untuk keperluan kita. Alinea yang pertama menyatakan bahwa kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa dan oleh sebab itu penjajahan harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan. Sebagai konsekuensinya bangsa Indonesia tidak hanya berjuang untuk mendapatkan dan mempertahankan kemerdekaannya, tetapi juga harus ikut memperjuangkan kemerdekaan bangsa-bangsa lain yang masih dijajah dan dalam rangka itu melawan segala bentuk penjajahan, baik politik maupun ekonomi, ideologi dan kebudayaan.

Dalam alinea yang kedua dinyatakan bahwa yang menjadi sasaran perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia adalah terbentuknya Negara Indonesia, yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Politik luar negeri negara kita harus juga memperjuangkannya.

Dalam alinea yang keempat dinyatakan bahwa ”(1) tujuan Negara Indonesia adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum serta mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial; dan (2) Negara Indonesia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.”

Landasan konstitusional yang kedua adalah ketetapan-ketetapan MPR/MPRS, khususnya ketetapan No. II/MPR/1988 tentang Garis-garis Besar Haluan Negara. Dari ketetapan ini yang paling relevan untuk politik luar negeri Indonesia adalah ketentuan-ketentuan berikut:

Dalam bidang politik luar negeri yang bebas aktif diusahakan agar Indonesia dapat terus meningkatkan peranannya dalam memberikan sumbangannya untuk turut serta menciptakan perdamaian dunia yang abadi, adil dan sejahtera. (Bab III sub B.c)

Politik luar negeri yang bebas dan aktif dilaksanakan secara konsekuensi dan diabdikan untuk kepentingan nasional, terutama untuk kepentingan pembangunan di segala bidang. Sehubungan dengan itu dan sesuai dengan kemampuan nasional, perlu terus ditingkatkan usaha untuk ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, melalui kerjasama

di berbagai forum, baik bilateral, regional maupun internasional seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa, ASEAN, Gerakan Non-Blok, Organisasi Konperensi Islam dan sebagainya. Dalam rangka mewujudkan tatanan dunia baru, terutama Tata Ekonomi Dunia Baru, perlu terus ditingkatkan usaha untuk menggalang dan memupuk solidaritas dan kesatuan sikap serta kerjasama antara negara-negara berkembang, guna meningkatkan kemandirian bersama negara-negara tersebut. Khususnya di wilayah Asia Tenggara, kerjasama antara negara-negara anggota ASEAN perlu terus diperluas dan ditingkatkan dalam rangka memperkokoh ketahanan nasional masing-masing negara anggotanya serta memperkuat ketahanan regional, menuju terwujudnya kawasan Asia Tenggara yang damai, bebas, netral dan sejahtera. (Bab IV)

Di bagian lain mengenai hubungan luar negeri, ditegaskan:

- a. Hubungan luar negeri dilandasi prinsip politik luar negeri bebas dan aktif yang diabdikan kepada kepentingan nasional, terutama untuk kepentingan pembangunan di segala bidang, dalam rangka untuk ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.
- b. Pengembangan hubungan luar negeri ditujukan pada peningkatan persahabatan dan kerjasama internasional dan regional melalui berbagai forum, baik multilateral maupun bilateral sesuai dengan kepentingan dan kemampuan nasional. Dalam hubungan ini perlu dikembangkan citra Indonesia yang positif di luar negeri antara lain melalui pengenalan kebudayaan.
- c. Peranan Indonesia dalam usaha menyelesaikan berbagai masalah dunia, khususnya yang mengancam perdamaian dan yang bertentangan dengan rasa keadilan dan kemanusiaan, perlu dilanjutkan dan ditingkatkan sesuai dengan semangat Dasasila Bandung.
- d. Setiap perkembangan, perubahan dan gejolak dunia, perlu terus diikuti dengan seksama agar dapat diketahui sedini mungkin setiap kemungkinan dan dampak yang dapat mempengaruhi stabilitas nasional dan menghambat pelaksanaan pembangunan, sehingga dapat diambil langkah-langkah yang tepat untuk mengamankannya. Selanjutnya, perkembang-
- e. an dunia yang mengandung peluang yang dapat menunjang serta mempercepat pelaksanaan pembangunan perlu selalu dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kepentingan nasional.
- f. Peranan Indonesia di dunia internasional dalam membina dan mempererat persahabatan dan kerjasama yang saling bermanfaat antara bangsa-bangsa perlu diperluas dan ditingkatkan. Demikian pula perlu ditingkatkan perjuangan Indonesia di dunia internasional mengenai hal-hal yang menyangkut kepentingan nasional, seperti upaya lebih memantabkan pelaksanaan Wawasan Nusantara serta memperluas pasar ekspor Indonesia.
- g. Dalam usaha memperjuangkan terwujudnya tatanan dunia baru, yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, perlu ditingkatkan upaya penggalangan dan pemupukan solidaritas dan kesatuan sikap, serta kerjasama di antara negara-negara yang sedang berkembang, dengan memanfaatkan forum-forum seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa, ASEAN, Gerakan Non-Blok, Organisasi Konperensi Islam dan sebagainya.
- h. Khususnya dalam rangka mewujudkan Tata Ekonomi Dunia Baru perlu dilanjutkan langkah-langkah, bersama-sama negara-negara berkembang lainnya, untuk mempercepat terwujudnya perjanjian internasional mengenai komoditi, melenyapkan hambatan serta pembatasan yang dilakukan oleh negara-negara industri terhadap ekspor negara-negara berkembang, serta meningkatkan kerjasama ekonomi dan teknik antar negara berkembang, di samping usaha-usaha lainnya. Demikian pula harus diusahakan terwujudnya Tata Informasi dan Komunikasi Dunia Baru.
- i. Kerjasama antara negara-negara anggota ASEAN, baik antar pemerintah maupun antar masyarakat, terutama di bidang ekonomi, sosial dan kebudayaan, perlu terus ditingkatkan dalam rangka memperkokoh ketahanan nasional masing-masing negara anggotanya serta memperkuat ketahanan regional, menuju terwujudnya kawasan Asia Tenggara yang damai, bebas, netral dan sejahtera. Selanjutnya perlu ditingkatkan pula kerjasama di antara negara-negara di kawasan Asia Tenggara dan Pasifik Barat Daya. (Bab IV)

Dari landasan idil dan konstitusionil politik luar negeri Indonesia itu dapat diambil sebagai kesimpulan atau penjabaran baik

tujuan-tujuan, sifat-sifat dan asas-asasnya maupun pedoman-pedoman pelaksanaannya.

Tujuan-tujuan Politik Luar Negeri Indonesia

Politik luar negeri Indonesia sebagai bagian politik nasionalnya dimaksudkan untuk mewujudkan tujuan-tujuan negara kita seperti ditetapkan dalam Pembukaan UUD 1945, yaitu "melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial."

Secara demikian dinyatakan bahwa tujuan Negara Indonesia terdiri atas tiga pokok, yaitu: (1) melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia; (2) memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa; dan (3) ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Yang pertama dan kedua merupakan tujuan intern, yang ketiga tujuan ekstern.

Dicantumkannya tujuan ekstern itu mengungkapkan kesadaran bahwa negara, termasuk Negara Indonesia, tidak dapat hidup dan mengemban tugasnya mewujudkan tujuan-tujuan internnya ataupun berkembang sewajarnya sesuai dengan perkembangan umat manusia dan kemajuan di segala bidang secara sendirian, lepas dari negara-negara lain. Lagipula sila kemanusiaan yang adil dan beradab serta keadilan sosial mewajibkan Indonesia untuk ikut

memperhatikan kesejahteraan seluruh umat manusia dan dalam rangka itu memberikan sumbangannya sesuai dengan kemampuannya.

Oleh sebab itu tujuan politik luar negeri negara kia bukanlah semata-mata "ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial," seperti anggapan semestinya orang, tetapi juga meliputi kedua tujuan intern tersebut. Sesuai dengan itu dalam GBHN 1978 tidak hanya ditegaskan bahwa "Dalam bidang politik luar negeri yang bebas aktif diusahakan agar Indonesia dapat terus meningkatkan peranannya dalam memberikan sumbangannya untuk turut serta menciptakan perdamaian dunia yang abadi, adil dan sejahtera," tetapi juga bahwa "Pelaksanaan politik luar negeri yang bebas aktif harus diabdikan untuk kepentingan nasional, terutama untuk kepentingan pembangunan di segala bidang."

Dengan demikian tugas utama politik luar negeri kita adalah *mengabdi kepentingan nasional*, tetapi kepentingan nasional ini harus diambil dalam arti yang luas, sehingga tidak hanya meliputi *keamanan nasional* dan *kesejahteraan umum* di Indonesia, melainkan juga *tata dunia baru* yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Dalam hubungan ini perlu diingat bahwa terwujudnya tata dunia serupa itu akan memungkinkan Indonesia seperti negara-negara lainnya menikmati hak-haknya dengan aman dan mengemban tugasnya memajukan kesejahteraan umum, yaitu kesejahteraan lahir batin bagi semua dan setiap warganya. Terwujudnya tata ekonomi dunia baru misalnya akan memberikan bagian yang lebih besar dari kekayaan dan pendapatan dunia kepada Indonesia dan negara-negara berkembang lainnya.

Sifat Politik Luar Negeri Indonesia

Sesuai dengan itu maka politik luar negeri Indonesia harus bersifat *bebas aktif* dan *anti penjajahan*. *Bebas* karena mencerminkan tekad bangsa untuk mempertahankan kemerdekaannya dan menentukan nasib dan hari depannya sendiri; dan *aktif* sebagai manifestasi hasrat untuk ikut dalam batas-batas kemampuannya memberikan sumbangsih dalam mengatasi masalah-masalah dunia sebagai anggota keluarga bangsa-bangsa demi terciptanya perdamaian, persaudaraan dan kesejahteraan di dunia. Dengan demikian politik luar negeri Indonesia tidak dapat menerima keterikatan dengan blok-blok ideologis yang bermusuhan, dengan pakta-pakta militer yang saling berhadapan, dengan pengelompokan-pengelompokan lain berdasarkan ras atau keyakinan agama. Sebaliknya Indonesia menyambut baik tiap kerjasama baik bilateral maupun regional dan global yang berdasarkan perdamaian, kemanusiaan, saling menghormati demi tercapainya kesejahteraan umat manusia.

Sesuai dengan itu Pemerintah Indonesia pada 2 September 1948 menyatakan untuk pertama kalinya kepada Badan Pekerja KNIP untuk menentukan sikap sehubungan dengan ancaman pemberontakan PKI sebagai berikut:

"Apakah bangsa Indonesia yang memperjuangkan kemerdekaannya harus memilih antara pro-Rusia dan pro-Amerika? Apakah tak ada pendirian lain yang harus diambil dalam mengejar cita-cita bangsa? Pemerintah berpendapat bahwa pendirian yang harus diambil ialah supaya Indonesia jangan menjadi obyek dalam pertarungan politik internasional, melainkan ia harus tetap menjadi subyek yang berhak menentukan sikap

sendiri ... Politik Indonesia harus ditentukan oleh kepentingannya sendiri dan dijalankan menurut keadaan dan kenyataan yang kita hadapi ... Garis politik Indonesia tidak dapat ditentukan oleh haluan politik negara lain yang berdasarkan negara itu sendiri."

Dalam hubungan ini perlu diingat bahwa politik bebas itu sejak semula ditentang oleh oposisi golongan kiri yang waktu itu dipimpin oleh PKI dan yang berusaha agar Indonesia mengikatkan diri dengan negara-negara blok komunis di bawah pimpinan Uni Soviet yang menjalankan semacam perang dingin terhadap negara-negara Barat di bawah pimpinan Amerika Serikat. Akan tetapi Pemerintah Indonesia tetap pada pendiriannya itu dan tidak memihak salah satu blok.

Dalam karangannya "Indonesia's Foreign Policy," dalam *Foreign Affairs* tahun 1953, Bung Hatta menjelaskan politik bebas aktif itu dan memaparkan alasan-alasan mengapa Pemerintah Indonesia memilih untuk tidak memihak dalam persaingan dan permusuhan antara Uni Soviet dan Amerika Serikat, namun tidak tinggal sebagai pihak pasif dalam percaturan politik dunia melainkan sebagai subyek aktif yang mempunyai pendiriannya sendiri:

"Politik (luar negeri) Republik Indonesia bukanlah politik kenetralan, karena tidak dibangun dalam referensi pada negara-negara yang berperang tetapi dengan mak-sud untuk memperkuat dan menjunjung tinggi perdamaian. Indonesia tidak pilih kasih antara kedua blok yang berhadapan dan menempuh jalannya sendiri mengenai berbagai masalah internasional. Dia menamakan politik ini 'bebas,' dan lebih lanjut melukiskannya sebagai bebas dan 'aktif.'

Yang dimaksud dengan aktif ialah usaha untuk giat bekerja guna mempertahankan perdamaian dan peredaan ketegangan yang disebabkan oleh kedua blok, lewat usaha-usaha yang kalau mungkin didukung oleh mayoritas anggota PBB ... Ini menerangkan mengapa Republik Indonesia tidak memihak blok Amerika atau blok Rusia dalam konflik sekarang ini, dan mengapa dia tidak bersedia ikut dalam blok ketiga manapun yang dimaksud untuk mengimbangi kedua blok raksasa itu. Melakukan hal itu hanya akan menimbulkan kecurigaan-kecurigaan baru dan permusuhan-permusuhan baru.”

Pernyataan Pemerintah tanggal 2 September 1948 dan penjelasan Bung Hatta itu mengungkapkan *dalil-dalil dasar* dari apa yang kemudian dikenal sebagai *azas non-blok* dalam politik luar negeri, suatu azas yang kini merupakan *dasar bersama bagi kebanyakan negara Asia, Afrika dan Amerika Latin* dalam politik luar negeri mereka. Pernyataan itu menjadi *garis besar* politik luar negeri Indonesia sampai sekarang karena erat berkaitan dengan tujuan nasional “ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.”

Selain bebas aktif, politik luar negeri Indonesia adalah *anti penjajahan*. Sejak semula Indonesia dengan tegas *menolak kolonialisme dan imperialisme* seperti ditetapkan dalam Pembukaan UUD 1945: ”Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perkeadilan.” Sikap ini diperkuat dengan penetapan persatuan Indonesia yang seperti ditegaskan oleh Bung Hatta adalah identik dengan *nasionalisme* sebagai salah satu di antara lima sila dasar negara. Dengan

demikian Indonesia Merdeka tidak hanya dibangun atas dasar nasionalisme tetapi juga wajib memperjuangkannya di forum dunia.

Dengan kekuatan-kekuatan anti kolonial lain, Indonesia harus *memperjuangkan kemerdekaan politik maupun ekonomi* segala bangsa dan dalam rangka itu berjuang untuk menghapus kolonialisme dan imperialism dalam segala bentuk dan manifestasinya, termasuk sistem ekonomi internasional ciptaan jaman kolonial yang memeras negara-negara berkembang dengan menguras sumber-sumber daya mereka dengan harga murah. Sebagai gantinya harus diperjuangkan pembentukan suatu sistem ekonomi dunia baru yang benar-benar suatu tata atau orde.

Sesuai dengan itu Indonesia bukan saja berjuang mati-matian untuk *membela kemerdekaan* yang sudah dinyatakan terhadap usaha negara penjajah untuk menguasainya kembali, tetapi juga *ikut memperjuangkan kemerdekaan bangsa-bangsa yang masih dijajah* baik di forum PBB maupun di forum-forum lain. Antara lain dia ikut menggoalkan deklarasi dekolonialisasi PBB tahun 1960 dan resolusi-resolusi anti kolonial yang diluarkan oleh PBB untuk melaksanakannya.

Indonesia juga *ikut memelopori gerakan non blok* yang sejak semula menjauahkan diri dari sengketa Timur-Barat dan dengan gigih memperjuangkan dekolonialisasi bangsa-bangsa yang masih dijajah secara formal atau dikuasai minoritas-minoritas kulit putih seperti Rhodesia, Namibia dan Afrika Selatan. Kemudian Indonesia ikut membentuk Kelompok 77, yang secara lebih terarah memperjuangkan *kemerdekaan ekonomi negara-negara berkembang* lewat pembagian kembali kekayaan ekonomi dunia, perubahan pola hubungan ekonomi global, perbaikan ”*terms of trade*,” perubahan sistem pem-

bagian kerja internasional dan lain sebagainya. Dengan perkataan lain Indonesia ikut memperjuangkan pembentukan Tata Ekonomi Internasional Baru sebagai ganti yang lama.

Asas-asas Politik Luar Negeri Indonesia

Dalam politik luar negerinya negara kita hendaknya menunjukkan kemauan baik dan mengambil sikap toleran terhadap negaranegara lain dan *hidup bersama dengan mereka dalam perdamaian sebagai tetangga baik* dan bekerjasama dengan mereka dalam suasana persahabatan, bukan saja untuk kepentingan mereka bersama melainkan juga demi terwujudnya tata dunia baru yang lebih baik.

Asas-asasnya telah dituangkan dalam *Dasasila Bandung* hasil Konferensi Afro-Asia di Bandung tahun 1955 (lihat Lampiran 1). Asas-asas ini kemudian dikukuhkan oleh PBB dalam resolusi dekolonialisasi tahun 1960 (lihat Lampiran 2), dipertegas oleh Konferensi Nonblok di Beograd tahun 1961, dikembangkan lebih lanjut oleh Konferensi Nonblok di Lusaka tahun 1970, dan dipertegas lagi serta dilengkapi oleh PBB dalam Deklarasi Pembentukan Suatu Tata Ekonomi Internasional Baru dan Program Aksinya tahun 1974 (lihat Lampiran 3).

Kerjasama antar negara secara persahabatan berdasarkan asas-asas itu akan dapat memberikan sumbangan yang efektif kepada usaha *mempertahankan dan memantabkan perdamaian serta keamanan internasional*, sedangkan kerjasama dalam bidang-bidang ekonomi, sosial dan budaya akan dapat memberikan sumbangan bagi tercapainya *kemakmuran bersama*. Terwujudnya

tata dunia baru yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial akan memungkinkan negara-negara besar maupun kecil, termasuk Indonesia, menikmati hak-haknya dengan aman dan mendapatkan bagian yang wajar dari kekayaan dan pendapatan dunia, sehingga mampu memajukan kesejahteraan umum rakyat mereka masing-masing.

Pedoman-pedoman Pelaksanaan

Dalam politik luar negerinya negara kita harus berpegangan pada asas-asas itu tetapi juga memperhatikan kenyataan-kenyataan yang ada. Dalam percaturan politik dunia masih banyak terjadi politik kekuatan (power politics) dan kita tidak mempunyai kemampuan untuk menegakkan asas-asas tersebut, sedangkan PBB sejauh ini sering impoten karena tidak mempunyai kekuasaan yang diperlukan. Dengan lain kata, dalam dunia internasional masih banyak berlaku *hukum pihak yang lebih kuat* alias *hukum rimba*. Dalam situasi serupa ini asas-asas itu tidak selalu dapat dilaksanakan, paling tidak secara penuh. Pembatasan politik sebagai "the art of the possible" berlaku pula untuk politik internasional. Tidaklah selalu mungkin mencapai tuntutan maksimal kita, tetapi kita sering harus puas dengan tuntutan minimum kita.

Selain itu tidak semua asas itu sama bobotnya. Dalam bentrokan yang bisa terjadi antara asas-asas itu, kita harus *mendahulukan asas yang lebih penting*. Demikianpun bila terjadi bentrokan antara kepentingan-kepentingan nasional kita, *kepentingan yang lebih besar harus didahulukan*. Bahkan kerap kali soalnya ialah memilih antara pilihan-pilihan buruk, sehingga kita harus

puas dengan pilihan yang kurang buruk (minus malum). Sehubungan dengan itu kita harus dapat membedakan antara asas-asas dan kepentingan-kepentingan yang lebih penting dan kurang penting.

Dengan demikian dalam memperjuangkan asas-asas itu kita harus realis dan pragmatis, akan tetapi kita tidak boleh menjadi oportunis semata-mata seperti Machiavelli. Kita harus menolak pendapat bahwa "tujuan menghalalkan segala sarana" karena ini bertolak-belakang dengan Pancasila yang telah ditetapkan sebagai dasar negara kita.

Pada prinsipnya kita harus *menjalin hubungan baik dengan semua negara*, akan tetapi dalam melakukan hal ini kita boleh dan bahkan harus menganut *suatu urut-urutan*. Kita dahlulukan negara-negara yang menjadi tetangga kita, bersahabat dengan kita dan yang dapat membantu kita mewujudkan kepentingan-kepentingan nasional kita. Misalnya kita lebih dahulu mendekati negara-negara yang mampu dan bersedia membantu kita dalam pembangunan nasional, dan menjalin hubungan erat dengan negara-negara yang bersahabat dengan kita dan membantu kita. Kepentingan nasional kita, khususnya kepentingan pembangunan nasional kita, menuntutnya. Demikianpun kita lebih dekat dengan negara-negara yang sependapat dan sekepentingan dengan kita. Namun terjadi pula bahwa dalam hal yang satu kita sekepentingan tetapi dalam hal lain kita lawan negara tertentu. Lagipula dalam politik internasional lawan bisa menjadi kawan dan kawan menjadi lawan. Dalam hubungan ini kita mengenal ucapan "tiada sekutu atau musuh abadi" dan "yang abadi hanyalah kepentingan nasional kita."

Dalam rangka pelaksanaan politik luar negeri Indonesia demi kepentingan nasional kita, Presiden Soeharto menganjurkan pada pelantikan beberapa Duta Besar tanggal 12 September 1978 agar para Duta Besar tidak hanya melaksanakan diplomasi rutin, melainkan juga *diplomasi perjuangan* yang dibatasinya sebagai berikut:

"Diplomasi perjuangan bukanlah sikap gagah-gagahan atau radikal-radikalan. Diplomasi perjuangan adalah keuletan dan kelincahan dalam memperjuangkan aspirasi-aspirasi, cita-cita dan kepentingan nasional. Diplomasi perjuangan mengharuskan diplomat kita tidak hanya mengikatkan diri pada kebiasaan-kebiasaan resmi dan keprotokolan saja, melainkan harus dapat menemukan dan mengembangkan cara-cara lain yang efektif. Untuk itu diperlukan para pelaku diplomasi -- para Duta Besar dan Staf yang memiliki keyakinan perjuangan dan kemampuan untuk melakukan diplomasi yang aktif dinamis. Untuk itu semua diplomat kita harus: (1) yakin akan kebenaran jalan yang ditempuh negara dan pemerintahnya, karena jalan itu telah ditentukan sendiri oleh rakyat melalui MPR; (2) menghayati dan mampu memantulkan cara hidup serta alam pikiran dan alam perasaan Indonesia; (3) menguasai seluk-beluk masalah yang dihadapi oleh negara dan bangsanya; (4) menguasai masalah-masalah internasional serta memahami pengaruhnya terhadap Indonesia; (5) mampu menangkis pandangan dan tindakan negatif terhadap Indonesia, dan sanggup merebut hati, pengertian, dukungan dan kerjasama pihak lain; (6) memahami perilaku masyarakat Indonesia di luar negeri sehingga mampu membina dan menggerakkan mereka dalam satu irama pengabdian kepada kepentingan bangsanya."

LAMPIRAN

Lampiran 1

DASA SILA BANDUNG

1. Menghormati hak-hak dasar manusia dan tujuan-tujuan serta asas-asas Piagam PBB.
2. Menghormati kedaulatan dan keutuhan wilayah semua bangsa.
3. Mengakui persamaan segala ras dan persamaan se-gala bangsa besar maupun kecil.
4. Tidak melakukan intervensi atau campur-tangan dalam soal-soal dalam negeri negara lain.
5. Menghormati hak tiap-tiap bangsa untuk membela diri secara sendirian atau secara kolektif sesuai dengan Piagam PBB.
6. (a) Tidak menggunakan perjanjian-perjanjian pertahanan kolektif untuk bertindak bagi kepentingan-kepentingan khusus salah satu dari negara-negara besar.
 (b) Tidak melakukan tekanan terhadap negara-negara lain.
7. Tidak melakukan tindakan-tindakan atau ancaman-ancaman agresi maupun menggunakan kekerasan terhadap keutuhan wilayah atau kemerdekaan politik suatu negara.
8. Menyelesaikan segala perselisihan internasional dengan cara-cara damai, seperti perundingan, rekonsiliasi, arbitrase atau penyelesaian pengadilan atau lain-lain cara damai menurut pilihan pihak-pihak yang bersangkutan sesuai dengan Piagam PBB.
9. Memajukan kepentingan bersama dan kerjasama.
10. Menghormati keadilan dan kewajiban-kewajiban internasional.

Bandung, 24 April 1955

Lampiran 2

DEKLARASI DEKOLONISASI MAJELIS UMUM PBB

Resolusi 14 Desember 1960, No. 1514

"Majelis Umum,

Memperhatikan tekad yang dinyatakan oleh rakyat-rakyat dunia dalam Piagam PBB untuk mengukuhkan

kepercayaan mereka akan hak-hak asasi manusia, akan harkat dan martabat pribadi manusia, akan persamaan hak pria dan wanita serta bangsa-bangsa besar maupun kecil dan untuk memajukan kemajuan sosial dan taraf-taraf hidup yang lebih baik dalam kebebasan yang lebih besar,

Sadar akan perlunya menciptakan kondisi stabilitas dan kesejahteraan serta hubungan-hubungan yang damai dan bersahabat atas dasar hormat terhadap asas-asas persamaan hak dan penentuan diri semua rakyat, dan hormat universal terhadap dan pelaksanaan hak-hak manusia dan kebebasan-kebebasan dasar untuk semua tanpa membedakan ras, kelamin, bahasa atau agama,

Mengakui adanya aspirasi yang kuat akan kebebasan pada semua rakyat yang bergantung dan peranan menentukan rakyat-rakyat itu dalam perjuangan kemerdekaan mereka,

Sadar akan meningkatnya konflik yang berakar pada penolakan atau hambatan-hambatan terhadap kebebasan rakyat-rakyat itu, yang merupakan suatu ancaman serius bagi perdamaian dunia,

Mengingat peranan penting PBB dalam membantu gerakan kemerdekaan di Wilayah-wilayah Perwalian dan Non-Swa-Praja,

Mengakui bahwa rakyat-rakyat dunia sangat menginginkan agar kolonialisme dalam segala manifestasinya diakhiri,

Yakin bahwa terus berlangsungnya kolonialisme mencegah berkembangnya kerjasama ekonomi internasional, menghambat perkembangan sosial, budaya dan ekonomi rakyat-rakyat jajahan dan bertentangan dengan cita-cita perdamaian universal PBB,

Mengukuhkan bahwa rakyat-rakyat, untuk tujuan-tujuan mereka sendiri, dapat leluasa memakai kekayaan dan sumber-sumber daya alam mereka tanpa merugikan kewajiban-kewajiban yang timbul dari kerjasama ekonomi internasional, atas dasar asas saling menguntungan, dan hukum internasional,

Percaya bahwa proses pembebasan tak dapat dita-han dan bahwa, untuk menghindari krisis-krisis serius, kolonialisme dan segala praktik segregasi dan diskriminasi yang berkaitan harus diakhiri,

Menyambut munculnya pada tahun-tahun belakangan ini sejumlah besar wilayah jajahan ke arah ke-

bebasan dan kemerdekaan, dan mengakui meningkatnya trend-trend yang kuat menuju kebebasan di wilayah-wilayah yang belum mencapai kemerdekaan,

Yakin bahwa semua rakyat mempunyai hak yang tidak dapat dipindahkan atas kebebasan penuh, pelaksanaan kedaulatan mereka dan atas keutuhan wilayah nasional mereka, secara *khidmat menyatakan* perlunya segera mengakhiri tanpa syarat kolonialisme dalam segala bentuk dan manifestasinya,

Dan dengan maksud itu

Menyatakan bahwa:

1. Penaklukan, penguasaan dan pemerasan rakyat-rakyat oleh kekuasaan asing itu melanggar hak-hak asasi manusia, bertentangan dengan Piagam PBB, dan merupakan suatu hambatan bagi usaha memajukan perdamaian dan kerjasama dunia.
2. Semua rakyat mempunyai hak penentuan diri; berdasarkan hak itu mereka leluasa menentukan status politik mereka dan mengusahakan perkembangan ekonomi, sosial dan budaya mereka.
3. Kurang memadainya persiapan politik, ekonomi, sosial atau pendidikan tidak boleh menjadi dalih untuk menunda kemerdekaan.
4. Segala aksi bersenjata atau segala macam tindakan represif terhadap rakyat-rakyat jajahan harus dihentikan agar mereka dapat melaksanakan hak mereka atas kemerdekaan penuh secara damai, dan keutuhan wilayah mereka harus dihormati.
5. Di Wilayah-wilayah Perwalian dan Non-Swa-Praja atau semua wilayah lain yang belum mencapai kemerdekaan harus segera diambil tindakan-tindakan untuk memindahkan seluruh kekuasaan kepada rakyat-rakyat wilayah-wilayah itu, tanpa syarat atau reservasi apapun, sesuai dengan kemauan dan keinginan mereka yang dinyatakan secara bebas, tanpa membedakan ras, kepercayaan atau warna kulit, agar mereka dapat menikmati kemerdekaan dan kebebasan sepenuhnya.
6. Setiap percobaan yang bertujuan merusak secara parsial atau total kesatuan dan keutuhan wilayah suatu negara adalah tidak selaras dengan tujuan-tujuan dan asas-asas Piagam PBB.
7. Semua Negara harus melaksanakan secara lengkap dan tepat ketentuan-ketentuan Piagam PBB, Deklarasi Universal Hak-hak Asasi Manusia dan Deklarasi ini atas dasar persamaan, tidak mencampuri urusan intern semua negara, dan hormat terhadap

hak-hak kedaulatan segala rakyat dan keutuhan wilayah mereka.”

Diambil dari Ian Brownlie, *Basic Documents on Human Rights* (Oxford, 1971), hal. 114-115.

Lampiran 3

DEKLARASI PEMBENTUKAN SUATU TATA EKONOMI INTERNASIONAL BARU

Resolusi Sidang khusus Majelis Umum PBB VI, 3201 (S-VI)

Majelis Umum

Menerima Deklarasi berikut:

DEKLARASI PEMBENTUKAN SUATU TATA EKONOMI INTERNASIONAL BARU

Kami, anggota-anggota PBB,

Setelah mengundang suatu sidang khusus Majelis Umum untuk mempelajari untuk pertama kalinya masalah-masalah bahan-bahan mentah dan pembangunan, yang dimaksud untuk membahas masalah-masalah ekonomi paling penting yang dihadapi masyarakat dunia,

Memperhatikan semangat, tujuan dan asas-asas Piagam PBB untuk memajukan kemajuan ekonomi dan kemajuan sosial segala bangsa,

Dengan khidmat menyatakan tekad kami bersama untuk bekerja secara mendesak bagi

PEMBENTUKAN SUATU TATA EKONOMI INTERNASIONAL BARU berdasarkan keadilan, persamaan kedaulatan, interdependensi, kepentingan bersama dan kerjasama antara semua negara, tidak peduli sistem-sistem ekonomi dan sosial mereka, yang akan memperbaiki kepincangan-kepincangan dan membetulkan ketidakadilan-ketidakadilan yang ada, memungkinkan menghilangkan jurang yang melebar antara negara-negara maju dan berkembang dan secara mantap menjamin akselerasi perkembangan ekonomi dan sosial serta perdamaian dan keadilan untuk generasi-generasi sekarang dan mendatang, dan dengan maksud itu menyatakan:

1. Hal paling besar dan paling berarti yang dicapai selama dasawarsa-dasawarsa terakhir adalah kemerdekaan dari dominasi kolonial dan asing bagi sejumlah

besar rakyat dan bangsa yang memungkinkan mereka menjadi anggota masyarakat rakyat-rakyat merdeka. Kemajuan teknologi juga dicapai di segala bidang kegiatan ekonomi dalam tiga dasawarsa terakhir, dan secara demikian memberikan suatu potensi yang kokoh untuk memperbaiki kesejahteraan semua rakyat. Akan tetapi sisa-sisa dominasi asing dan kolonial, pendudukan asing, diskriminasi rasial, apartheid dan neokolonialisme dalam segala bentuknya masih tetap merupakan hambatan-hambatan yang paling besar bagi pembebasan dan kemajuan penuh negara-negara berkembang dan semua rakyat yang bersangkutan. Manfaat kemajuan teknologi tidak dinikmati secara adil oleh semua anggota masyarakat internasional. Negara-negara berkembang, yang merupakan 70% penduduk dunia, hanya kebagian 30% pendapatan dunia. Ternyata tidak mungkin meneapai suatu perkembangan yang sama dan berimbang bagi masyarakat internasional dalam tata ekonomi internasional yang ada. Jurang antara negara-negara maju dan berkembang terus melebar dalam suatu sistem yang disusun pada waktu ketika negara-negara berkembang bahkan belum ada sebagai negara merdeka dan yang mengabdiakan ketidaksamaan.

2. Tata ekonomi internasional sekarang ini langsung bertolak-belakang dengan perkembangan-perkembangan dalam hubungan-hubungan politik dan ekonomi internasional sekarang ini. Sejak 1970 perekonomian dunia mengalami serangkaian krisis berat yang mempunyai reperkuensi-reperkuensi mendalam, khususnya atas negara-negara berkembang yang umumnya lebih rawan terhadap tekanan-tekanan ekonomi dari luar. Dunia berkembang telah menjadi suatu faktor yang sangat kuat yang pengaruhnya dirasakan di segala bidang kegiatan internasional. Perubahan-perubahan yang tidak dapat dibalik dalam perbandingan kekuatan di dunia ini mengharuskan partisipasi negara-negara berkembang yang aktif, penuh dan sama dalam perumusan dan penerapan segala keputusan yang menyangkut masyarakat internasional.
3. Perubahan-perubahan ini semua telah menonjolkan kenyataan interdependensi semua anggota masyarakat dunia. Kejadian-kejadian sekarang ini dengan tajam menyoroti kesadaran bahwa kepentingan-kepentingan negara-negara maju dan kepentingan-kepentingan negara-negara berkembang sudah tidak dapat diasingkan satu sama lain, bahwa terdapat satu kaitan erat antara kemakmuran negara-negara

maju dan pertumbuhan serta perkembangan negara-negara berkembang, dan bahwa kemakmuran masyarakat internasional sebagai keseluruhan bergantung pada kemakmuran bagian-bagian komponennya. Kerjasama internasional untuk pembangunan adalah tujuan dan kewajiban bersama semua negara. Dengan demikian kesejahteraan politik, ekonomi dan sosial generasi-generasi sekarang dan mendatang lebih dari sebelumnya bergantung pada kerjasama semua anggota masyarakat internasional atas dasar persamaan kedaulatan dan dihapusnya ketidakseimbangan yang terdapat antara mereka.

4. Tata Ekonomi Internasional Baru itu harus disusun atas dasar hormat penuh terhadap asas-asas berikut:
 - (a) Persamaan kedaulatan negara-negara, penentuan diri semua rakyat, tidak diijinkannya mendapatkan wilayah-wilayah dengan kekerasan, keutuhan wilayah dan tidak mencampuri urusan intern negara-negara lain.
 - (b) Kerjasama seluas mungkin semua negara anggota masyarakat internasional, atas dasar keadilan, di mana perbedaan-perbedaan di dunia sekarang ini dapat disingkirkan dan kemakmuran dijamin untuk semua.
 - (c) Partisipasi penuh dan efektif atas dasar persamaan semua negara dalam memecahkan masalah-masalah ekonomi dunia demi kepentingan bersama semua negara, sambil memperhatikan perlunya menjamin akselerasi pembangunan semua negara berkembang, secara istimewa memperhatikan agar diambil tindakan-tindakan khusus untuk negara-negara berkembang yang paling terbelakang, terkurung daratan dan terdiri atas pulau maupun negara-negara berkembang yang paling serius menderita akibat krisis-krisis ekonomi dan bencana-bencana alam, tanpa melupakan kepentingan-kepentingan negara-negara berkembang lainnya.
 - (d) Hak setiap negara untuk menganut sistem ekonomi dan sosial yang dirasanya paling cocok untuk perkembangannya dan untuk tidak mengalami diskriminasi apapun sebagai akibatnya.
 - (e) Kedaulatan permanen penuh setiap negara atas sumber-sumber daya alamnya dan segala kegiatan ekonomi. Untuk menjamin sumber-sumber daya ini setiap Negara berhak untuk melaksanakan penguasaan efektif atasnya dan eksplorasi-nya dengan sarana-sarana yang selaras dengan situasinya, termasuk hal nasionalisasi atau pemindahan pemilikan kepada warga-warganya,

- hal mana merupakan ungkapan kedaulatan permanen penuh Negara. Tiada Negara boleh dikennenakan paksaan ekonomi, politik atau lain untuk mencegah pelaksanaan bebas dan penuh hak yang tak terpindahkan ini.
- (f) Hak semua Negara, wilayah dan rakyat di bawah pendudukan asing, dominasi asing dan kolonial atau *apartheid* atas ganti rugi atau kompensasi penuh bagi eksplorasi dan pengurasan dan pengrusakan sumber-sumber daya alam dan sumber-sumber daya lain negara-negara, wilayah-wilayah dan rakyat-rakyat itu.
- (g) Pengaturan dan pengawasan kegiatan-kegiatan perusahaan-perusahaan transnasional dengan mengambil tindakan-tindakan demi kepentingan perekonomian nasional negara-negara di mana perusahaan-perusahaan transnasional itu beroperasi atas dasar kedaulatan penuh negara-negara itu.
- (h) Hak negara-negara berkembang dan rakyat-rakyat wilayah-wilayah di bawah dominasi kolonial dan rasial serta pendudukan asing untuk mencapai pembebasannya dan mendapatkan kembali penguasaan efektif atas sumber-sumber daya alam dan kegiatan-kegiatan ekonominya.
- (i) Memberikan pertolongan kepada negara-negara, rakyat-rakyat dan wilayah-wilayah berkembang yang di bawah dominasi kolonial dan asing, pendudukan asing, diskriminasi rasial atau *apartheid* atau tunduk pada tindakan-tindakan paksaan ekonomi, politik atau lain yang diambil untuk mendapatkan dari mereka subordinasi pelaksanaan hak kedaulatan mereka dan mendapatkan dari mereka keuntungan jenis apa pun, atau pada neokolonialisme dalam segala bentuknya, dan yang telah berhasil menegakkan atau berusaha untuk menegakkan penguasaan efektif atas sumber-sumber daya alam dan kegiatan-kegiatan ekonomi mereka yang pernah atau masih di bawah kekuasaan asing.
- (j) Perbandingan adil dan wajar antara harga-harga bahan-bahan mentah, hasil-hasil primer, barang-barang jadi dan setengah jadi yang dieksport negara-negara berkembang dan harga-harga bahan-bahan mentah, komoditi-komoditi primer, barang-barang jadi, barang-barang modal dan perlengkapan yang diimpor oleh mereka dengan maksud untuk mencapai perbaikan yang mantap dalam term of trade mereka yang tidak memuaskan dan dalam perluasan perekonomian dunia.

- (k) Peningkatan bantuan aktif kepada negara-negara berkembang oleh seluruh masyarakat internasional, bebas dari segala syarat politik atau militer.
- (l) Menjamin agar salah satu tujuan pokok pembangunan sistem moneter internasional adalah memajukan pembangunan negara-negara berkembang dan arus sumber-sumber daya nyata yang memadai.
- (m) Meningkatkan daya saing bahan-bahan alam yang menghadapi saingan ganti-ganti sintetis.
- (n) Perlakuan preferensi tanpa batasan bagi negara-negara berkembang, kapan saja mungkin, di segala bidang kerjasama ekonomi internasional di mana saja mungkin.
- (o) Mendapatkan syarat-syarat baik untuk pemindahan sumber-sumber daya finansial ke negara-negara berkembang.
- (p) Memberi negara-negara berkembang akses ke penemuan-penemuan ilmu pengetahuan dan teknologi modern, dan memajukan pemindahan teknologi dan penciptaan teknologi pribumi demi keuntungan negara-negara berkembang dalam bentuk-bentuk dan sesuai dengan prosedur yang cocok untuk perekonomian mereka.
- (q) Perlunya bagi semua Negara untuk menghentikan pemborosan sumber-sumber daya alam, termasuk hasil-hasil pangan.
- (r) Perlunya bagi negara-negara berkembang untuk memusatkan seluruh sumber daya mereka bagi pembangunan.
- (s) Dengan tindakan-tindakan individual dan kolektif meningkatkan kerjasama ekonomi, perdagangan, keuangan dan teknis antara negara-negara berkembang, terutama atas dasar preferensi.
- (t) Mempermudah peranan yang mungkin dimainkan oleh perhimpunan-perhimpunan produsen dalam kerangka kerjasama internasional dan, dalam mengejar tujuan-tujuannya, antara lain membantu dalam memajukan pertumbuhan mantap ekonomi dunia dan mempercepat pembangunan negara-negara berkembang.
5. Penerimaan secara unanim Strategi Pembangunan Internasional Dasawarsa Pembangunan Kedua PBB merupakan suatu langkah penting dalam memajukan kerjasama ekonomi internasional atas dasar yang adil dan wajar. Akselerasi implementasi kewajiban-kewajiban dan komitmen-komitmen yang diterima oleh masyarakat internasional dalam rangka

- Strategi itu, khususnya yang menyangkut kebutuhan-kebutuhan pembangunan negara-negara berkembang yang harus dilakukan, yang akan banyak menyumbang pada pelaksanaan tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran Deklarasi ini.
6. PBB sebagai suatu organisasi universal harus mampu menangani masalah-masalah kerjasama ekonomi internasional secara menyeluruh dan secara sama menjamin kepentingan-kepentingan semua negara. Dia harus memainkan peranan yang bahkan lebih besar dalam pembentukan Tata Ekonomi Internasional Baru. Piagam Hak-hak dan Kewajiban-kewajiban Ekonomi Negara-negara, yang persiapannya akan mendapatkan ilham tambahan dari Deklarasi ini, akan merupakan suatu sumbangan yang berarti dalam hal ini. Semua negara anggota PBB oleh sedab itu diminta agar melakukan usaha maksimal untuk menjamin implementasi Deklarasi ini, yang merupakan salah satu jaminan utama bagi terciptanya kondisi yang lebih baik untuk semua rakyat guna mencapai suatu kehidupan yang layak bagi martabat manusia.
 7. Deklarasi Pembentukan Tata Ekonomi Internasional Baru ini harus merupakan salah satu dasar yang paling penting untuk hubungan-hubungan ekonomi antara semua rakyat dan semua bangsa.

Sidang Pleno ke-2229, 1 Mei 1974

BAHAN BACAAN

- Abdulgani, H. Roeslan, "The Origin of the Concept Free and Active" in *Indonesian Foreign Policy*, "The Indonesian Quarterly, October 1975.
- Abdulgani, H. Roeslan, "Sejarah Asal Mula Rumusan Haluan Politik Luar Negeri Bebas Aktif," dalam *Gema Angkatan 45*, No. 102-103 (1988), hal. 46-50. Makalah pada Seminar Memperingati "40 Tahun Dicanangkannya Politik Luar Negeri Bebas Aktif RI," Yogyakarta, 2 September 1988.
- Abdulgani, H. Roeslan, *Change and Continuity in Indonesian Foreign Policy*. Pidato pada Pertemuan Tahunan The Australian Institute of International Affairs, Melbourne, 14 Agustus 1972.
- Dipoyudo, Kirdi, "Politik Luar Negeri Berdasarkan Pancasila," dalam *Gema Angkatan 45*, No. 44-50 (Juli 1980-Januari 1981), hal. 44-50.
- Dipoyudo, Kirdi, "Changes and Trends in the Indonesian Foreign Policy," dalam *Trends in Indonesia II*, Editor Leo Suryadinata dan Sharon Siddique, Singapura, 1981.
- Anak Agung Gde Agung, Ide, *Twenty Years Indonesian Foreign Policy 1945-1965*, Paris: Mouton, 1973.
- Hatta, Muhammad, "Indonesia's Foreign Policy," dalam *Foreign Affairs*, No. 31 (April 1953), hal. 441-452.
- Hatta, Muhammad, *Mendayung Antara Dua Karang*, Jakarta: Bulan Bintang, 1976.
- Departemen Luar Negeri RI, *Dua Puluh Lima Tahun Departemen Luar Negeri, 1945-1970*, Jakarta: Kawal, 1971.
- Kusumaatmadja, Mochtar, *Politik Luar Negeri Indonesia dan Pelaksanaannya Dewasa Ini*, Editor Eddy Damian dan Budiono Kusumohamidjojo, Bandung: Alumni, 1983.
- Kusumaatmadja, Mochtar, "Politik Luar Negeri Bebas Aktif dan Orde Baru," *Gema Angkatan 45*, No. 102-103 (1988), hal. 51-54.
- Leifer, Michael, *Indonesia's Foreign Policy*, London: Allen & Unwin untuk The Royal Institute of International Affairs, 1983.
- Malik, Adam, "Indonesia's Foreign Policy," *The Indonesian Quarterly*, October 1972.
- Sunario, "Asas-asas dan Praktek Politik Luar Negeri RI," dalam *Gema Angkatan 45*, No. 44-50 (1980-1981), hal. 38-44.
- Weinstein, Franklin B., *Indonesia's Foreign Policy and the Dilemma of Dependence from Sukarno to Suharto*, Ithaca: Cornell University Press, 1976.

Menuju Normalisasi Hubungan Indonesia-Cina

Endi RUKMO

AWAL TAHUN 1989 bisa dianggap sebagai lembaran baru dalam usaha-usaha pencairan hubungan diplomatik antara Indonesia dan Republik Rakyat Cina (Cina). Dikatakan lembaran baru karena setelah tahun 1967 Indonesia membekukan hubungannya dengan Cina sebagai reaksi terhadap peranan Beijing yang secara politis mendukung Gerakan 30 September-PKI (G-30-S/PKI), tampak usaha-usaha yang semakin konkret ke arah normalisasi hubungan antara kedua negara tersebut. Semakin konkretnya usaha tersebut terutama dengan adanya keterlibatan langsung Presiden Soeharto dalam perundingan normalisasi.

Hal itu terjadi ketika Presiden Soeharto mengadakan lawatan ke Jepang akhir Februari 1989 untuk melayat dan menghadiri upacara pemakaman Kaisar Jepang, Hirohito, tanggal 24 Februari 1989. Dalam kunjungannya tersebut, Presiden Soeharto bertemu dan mengadakan pembicaraan dengan Menteri Luar Negeri Cina, Qian Qichen, di Tokyo tanggal 23 Februari 1989, yang menu-

rut banyak pengamat merupakan pertemuan yang tidak diduga sebelumnya. Dalam pembicaraan itu, kedua pihak sepakat untuk mengambil langkah-langkah lanjutan ke arah normalisasi hubungan diplomatik yang selama ini masih beku.

Kesediaan Presiden Soeharto mengadakan pembicaraan dengan pihak Cina tampaknya mendapat tanggapan yang sangat positif dari pihak Cina yang selama ini memang mendesak Indonesia agar mau mencarikan kembali hubungan kedua negara. Usaha Cina tersebut tidak saja dilakukan melalui para diplomatnya, tetapi juga melalui pemimpin negara lain yang akan berkunjung ke Indonesia. Sebagai contoh, dalam kunjungannya ke Indonesia tanggal 30 April - 2 Mei 1983 Perdana Menteri Jepang waktu itu, Yasuhiro Nakasone, sempat menyampaikan pesan Pemerintah Cina mengenai keinginannya setiap saat untuk menormalisasi hubungan diplomatiknya dengan Indonesia.¹ Pada waktu itu pesan tersebut ditang-

¹Lihat Endi Rukmo, "Normalisasi Hubungan Indonesia-Cina," *Suara Karya*, 23 Mei 1983.

gapi oleh Presiden Soeharto dengan mengatakan bahwa masalah hubungan dengan Cina itu tergantung pada sikap negara tersebut terhadap sisa-sisa PKI dan gerilya komunis di Asia Tenggara. Ketegasan itu selalu dinyatakan Presiden Soeharto dalam menyatakan sikap bangsa Indonesia terhadap permintaan pihak Beijing. Yang terakhir dinyatakan pada pidatonya di depan MPR tanggal 1 Maret 1988. Dikatakannya bahwa normalisasi hubungan diplomatik dengan Cina masih dikaitkan dengan ketegasan sikap Cina untuk tidak mencampuri urusan dalam negeri negara lain -- khususnya Indonesia -- dengan membantu sisa-sisa kekuatan komunis di negara-negara yang bersangkutan.²

Yang menjadi pertanyaan di sini adalah mengapa pihak Cina tampaknya bersungguh-sungguh dalam usahanya menormalisasi hubungannya dengan Indonesia? Apa sebenarnya motivasi negara itu? Apa dampaknya bila normalisasi itu terjadi? Jawaban-jawaban pertanyaan-pertanyaan ini hanya dapat diberikan dengan mengkaji kembali perkembangan kebijakan luar negeri Cina dan perkembangan politik serta keamanan di kawasan Asia Tenggara sejak awal dasawarsa tahun 1970-an.

Perkembangan Politik Luar Negeri Cina di Asia Tenggara

Pada tanggal 16 Januari 1980 Deng Xiaoping menyatakan di depan Sidang Komite Sentral Partai Komunis Cina (PKC) tentang tiga tugas utama kebijakan luar negeri Cina, yaitu: (1) menentang hegemonisme dan mendukung perdamaian dunia; (2) berusaha mempersatukan kembali Taiwan ke dalam

wilayah Cina; (3) mempercepat konstruksi sosialis dengan empat program modernisasi di bidang pertanian, industri, ilmu pengetahuan dan teknologi dan pertahanan. Tugas pokok kebijakan luar negeri itu rupanya menjadi dasar motivasi Cina dalam mengembangkan hubungannya dengan negara-negara lain.

Pernyataan Deng Xiaoping itu sebenarnya hanya merupakan penegasan kembali dari kebijakan luar negeri Cina yang telah dianutnya sejak awal tahun 1970-an. Ketika itu Cina telah secara efektif mengadakan saling pendekatan dengan Amerika Serikat dan Jepang, yang pada dasawarsa sebelumnya dianggap musuh nomor satu. Perubahan kebijakan ini kiranya tidak terlepas dari persengketaan yang semakin meningkat dengan Uni Soviet yang memuncak pada Perang Perbatasan tahun 1969.

Sementara itu di Asia Tenggara Cina mulai pula mengadakan pendekatan-pendekatan baru. Pada tahun 1971, misalnya, Cina menjalin hubungan diplomatik dengan Birma. Hubungan yang sama juga diresmikan dengan Malaysia, ketika almarhum PM Malaysia, Tun Abdul Razak berkunjung ke Cina tanggal 28 Mei - 2 Juni 1974. Setahun kemudian menyusul Filipina ketika Presiden Marcos berkunjung ke Cina tanggal 7-11 Juni 1975 dan sebulan kemudian, yaitu tepatnya tanggal 1 Juli 1975, Thailand juga meresmikan hubungannya dengan Cina. Demikian pula hubungannya dengan Singapura, meskipun secara resmi Cina belum membuka hubungan diplomatiknya, hubungan dagang dan hubungan bilateral lainnya terus meningkat. Hal tersebut diungkapkan oleh kunjungan Menteri Luar Negeri S. Rajaratnam ke Beijing pada pertengahan Maret 1975 dan kunjungan PM Lee Kuan Yew tanggal 10-24 Mei 1976.

²Pidato Pertanggungjawaban Presiden/Mandataris MPR-RI, 1 Maret 1988, hal. 23.

Meskipun demikian, pada awal sampai pertengahan dasawarsa 1970-an itu, Cina tetap berusaha mempertahankan hubungan antar partai. Cina tetap mendukung partai-partai komunis di Birma, Malaysia dan Thailand. Cina juga terus memancarkan siaran-siaran radio bergelombang pendek dari wilayah Yunan yang berisi hasutan-hasutan dan pernyataan-pernyataan dukungannya kepada partai-partai komunis di Asia Tenggara termasuk PKI. Politik "dua muka" Cina tersebut mencerminkan keinginannya untuk menyesuaikan diri pada situasi internasional yang ditimbulkan oleh terjadinya konflik dengan Uni Soviet dan pendekatan timbal-balik dengan Amerika Serikat tanpa mengorbankan dukungannya kepada partai-partai komunis di negara-negara Asia Tenggara.

Namun, sejak tahun 1975 tampak terdapat beberapa perubahan penting yang dibuat oleh Cina. Sejak itu rupanya Cina tidak bersemangat lagi mendukung gerakan-gerakan komunis di negara-negara Asia Tenggara. Hal itu disebabkan, *pertama*, perubahan kepemimpinan di Cina, seperti direhabilisasiya Deng Xiaoping dan tokoh-tokoh korban Revolusi Kebudayaan, yang mengakibatkan munculnya kekuatan yang lebih menginginkan penekanan hubungan lain. *Kedua*, para pemimpin baru Cina menghendaki dipereratnya hubungan dengan negara-negara Barat terutama setelah Cina memutuskan untuk mengadakan reformasi dengan melaksanakan empat modernisasi. Itulah sebabnya Cina pada tahun 1978 mengadakan Perjanjian Perdamaian dan Persahabatan dengan Jepang dan pada tanggal 1 Januari 1979 Cina meresmikan hubungan diplomatiknya dengan Amerika Serikat.

Tampaknya Cina tidak lagi memandang dunia ini terbagi dalam tiga dunia yaitu: Du-

nia Kesatu terdiri dari kedua "superpower" Uni Soviet dan Amerika Serikat; Dunia Kedua terdiri dari negara-negara industri Barat; Dunia Ketiga terdiri dari negara-negara sedang berkembang termasuk Cina. Dalam pandangannya tentang pembagian dunia itu, Cina berpendapat bahwa Dunia Kedua dan Dunia Ketiga harus bersatu untuk melawan Dunia Kesatu. Tetapi sejak konfliknya dengan Uni Soviet itu, pandangan tersebut mulai ditinggalkan. Cina berusaha merangkul Amerika Serikat untuk melawan Uni Soviet. Karena adanya kepentingan strategi dan militer yang paralel itulah maka hubungan kedua negara terus meningkat.

Perubahan sikap Cina itu juga sangat dipengaruhi oleh perkembangan yang terjadi di kawasan Asia Tenggara sendiri, terutama setelah Vietnam menjadi seterunya dan diterima sebagai anggota COMECON di dalam Sidang Dewan Politik organisasi itu di Bukares tanggal 27-29 Juni 1978. Vietnam juga telah menandatangani suatu Perjanjian Persahabatan dan Kerjasama dengan Uni Soviet di Moskwa tanggal 3 November 1978. Peristiwa ini terjadi hanya selisih satu bulan sebelum invasi pasukan Vietnam ke Kampuchea pada bulan Desember 1978 yang akhirnya berhasil membentuk pemerintahan Heng Samrin dan mendesak kekuatan Khmer Merah yang didukung Cina, Karena kejadian itu Cina menanggapi dengan dua kebijakan, yaitu: *pertama*, dengan memberi pelajaran kepada Vietnam (menurut versi Cina) secara militer pada bulan Februari 1979, yaitu dengan mengadakan penyerbuan singkat di dalam wilayah Vietnam; dan *kedua*, dengan meningkatkan hubungan antar pemerintah dengan negara-negara ASEAN dalam usahanya membendung pengaruh Soviet-Vietnam di kawasan Asia Tenggara.

Dalam usahanya meningkatkan hubungan antar pemerintah dengan negara-negara ASEAN itu Deng Xiaoping mengadakan lawatan ke beberapa negara tersebut.³ Dalam lawatannya itu ia menyatakan bahwa hubungan antar pemerintah perlu dibedakan antara hubungan antar pemerintah (G to G Relations) dan hubungan antar partai. Dalam hal ini dikatakannya bahwa Cina tidak akan mengijinkan hubungan antar partai itu dicampurkan dengan hubungan antar pemerintah. Hal ini secara lebih jelas ditegaskan lagi oleh Perdana Menteri Zao Ziyang ketika berkunjung ke Bangkok bulan Februari 1981. Dikatakannya bahwa dukungan Cina kepada partai-partai komunis di Asia Tenggara hanya terbatas pada dukungan "politis dan moral" dan Cina akan berusaha agar hubungannya dengan partai-partai itu tidak mengganggu kerjasama dan persahabatannya dengan negara-negara ASEAN. Jadi tampaknya pernyataan Zhao Ziyang itu mengungkapkan bahwa hubungannya dengan partai-partai komunis itu merupakan masalah prinsip yang akan tetap dipertahankan. Hanya karena kepentingan keamanan nasional dan kepentingan reformasinya Cina tidak menghendaki terjadinya konflik dengan negara-negara ASEAN, sehingga negara itu berusaha untuk tidak terlalu menekankan hubungan antar partai.

Dalam kunjungannya ke Thailand Zhao Ziyang juga menyatakan bahwa Cina tidak akan mengekspor revolusi dan samasekali menentang campurtangan dalam urusan dalam negeri negara-negara lain. Dengan membaiknya hubungan antar pemerintah itu, dukungan kepada gerilya-gerilya komunis semakin berkurang dan tampaknya Cina bersikap netral dalam soal pemberontakan

komunis di negara-negara ASEAN. Perkembangan ini sangat berpengaruh dan menguntungkan pihak pemerintah setempat. Pengalaman Thailand, misalnya, menunjukkan bahwa perbaikan hubungan dengan Cina penting artinya untuk menekan gerilya komunis Thailand. Hanya dua bulan setelah PM Zhao Ziyang berkunjung ke negara itu, pada bulan April 1981 Partai Komunis Thailand (CPT) memutuskan untuk berunding dengan pemerintah membahas masalah gentalan senjata.

Kejadian itu disusul dengan penyerahan secara besar-besaran anggota CPT pro-Beijing. Pada tanggal 1 Desember 1982 sekitar 250 gerilyawan dan 800 pendukungnya menyerah di Propinsi Mukdaharn, yang terkenal sebagai basis terkuat CPT. Tanggal 27 Desember 1982 gerilyawan komunis lainnya menyerah di Propinsi Tak, dan pada tanggal 22 Januari 1983 sekitar 550 gerilyawan menyerah di Propinsi Mukdaharn. Sementara itu penyerahan diri gerilyawan komunis pro-Beijing juga terjadi di Malaysia dan Filipina.

Perkembangan Hubungan Indonesia-Cina

Sejarah mencatat bahwa sebelum di Cina terjadi Revolusi Kebudayaan, satu-satunya negara, yang sekarang ini tergabung dalam organisasi regional ASEAN, yang mempunyai hubungan diplomatik dan cukup akrab dengan Cina adalah Indonesia. Tetapi hubungan tersebut memburuk menjelang dan sesudah terjadinya G-30-S/PKI. Bahkan pada tahun 1967 secara sepihak Indonesia membekukan hubungan diplomatik dengan Cina.

Bagi Indonesia masalah normalisasi hubungan diplomatik diselesaikan secara hati-

³Deng Xiaoping berkunjung ke Thailand, Malaysia dan Singapura pada bulan November 1978.

hati sekali, terutama karena sikap Cina mengenai hubungannya antar partai dengan PKI. Meskipun Zhao Ziyang telah menegaskan tentang sikapnya terhadap masalah gerilya komunis di negara-negara ASEAN, kenyataannya hingga hari jadi PKI tanggal 23 Mei 1981 Beijing masih terus menyampaikan ucapan-ucapan selamat kepada PKI lewat radio Suara Revolusioner yang dipancarkan dari wilayah Yunan di Cina. Baru sejak siaran radio tersebut dihentikan pada tanggal 30 Juni 1981 dukungan-dukungan kepada perjuangan PKI itu sudah tidak terdengar lagi.

Dihentikannya dukungan kepada PKI merupakan suatu indikasi bahwa Cina memang bersungguh-sungguh ingin menormalisasi hubungannya dengan Indonesia. Usaha tersebut sebenarnya telah dirintis sejak awal tahun 1970-an. Misalnya ketika Cina mendatangi Perjanjian Perdamaian Vietnam di Paris bulan Februari 1973, Menteri Luar Negeri Cina, Chi Peng-fei, telah mengadakan pembicaraan dengan Menlu Indonesia, waktu itu almarhum Adam Malik, mengenai usaha pencairan hubungan diplomatik kedua negara. Selain itu kontak-kontak pribadi juga pernah dilakukan antara pejabat-pejabat pemerintah kedua negara di PBB untuk tujuan yang sama.

Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, usaha Cina untuk menormalisasi hubungan dengan Indonesia itu semakin ditingkatkan setelah kelompok reformis di bawah pimpinan Deng Xiaoping semakin mendominasi kekuasaan baik di dalam partai maupun di pemerintahan. Secara eksplisit, misalnya, Perdana Menteri Li Hsien-nian pernah mengatakan pada awal tahun 1978 bahwa Cina telah siap mencairkan hubungan diplomatik dengan Indonesia. Niatnya untuk memperbaiki hubungan itu juga diungkap-

kan dengan disahkannya suatu undang-undang baru mengenai "Kewarganegaraan Cina" pada bulan September 1980. Masalah kewarganegaraan ini sejak lama memang merupakan salah satu hambatan bagi hubungan kedua negara. Dalam pasal 3 undang-undang tersebut, misalnya, disebutkan bahwa: "The People's Republic of China does not recognize dual nationality for any Chinese National." Dengan demikian Cina samasekali menghapus kewarganegaraan rangkap, sehingga bagi orang Cina Perantauan yang telah menaturalisasikan dirinya di negara setempat secara otomatis kehilangan kewarganegaraan Cina dan harus mematuhi setiap peraturan dan undang-undang yang berlaku di negara setempat, tidak terlibat dalam setiap kegiatan politik dan hidup bersahabat dengan penduduk setempat.

Masalah kewarganegaraan ini sebenarnya bukanlah masalah baru. Masalahnya sudah ada sebelum Indonesia merdeka. Setelah Indonesia menyatakan kemerdekaannya, Pemerintah Indonesia segera berusaha mengatasi masalah kewarganegaraan. Pada bulan April 1946 Pemerintah Indonesia sudah mengeluarkan Undang-undang Kewarganegaraan yang berlandaskan pada asas *ius soli*. Asas ini menyebutkan bahwa warganegara Indonesia terdiri dari orang asli yang bertempat tinggal di wilayah Indonesia dan orang-orang bukan asli (asing), tetapi yang lahir di wilayah Indonesia dan telah tinggal di sana selama sekurang-kurangnya lima tahun secara berturut-turut, serta mereka yang telah berumur 21 tahun, dengan syarat orang-orang tersebut tidak menolak kewarganegaraan Indonesia karena menjadi warganegara negara lain. Akibat undang-undang itu, 1,5 juta warga Cina yang lahir di Indonesia seharusnya bisa menjadi warganegara Indonesia kecuali jika mereka meno-

laknya. Departemen Kehakiman Indonesia pada awal tahun 1950-an mengemukakan bahwa terdapat 390.000 warga Cina yang menolak kewarganegaraan Indonesia.⁴

Dengan diresmikannya hubungan diplomatik antara Indonesia dan Cina pada tahun 1950, masalah kewarganegaraan ini menjadi sorotan tajam, terutama karena pihak Cina pada waktu itu berusaha memanfaatkan warga "huaqiao" (*Cina perantauan*) yaitu warganegara Cina yang bertempat tinggal sementara di negara-negara lain, bagi kepentingan nasional Cina seperti penyebaran ideologi komunis. Karena hal ini membahayakan integrasi nasional bangsa Indonesia, maka pada tahun 1955 Indonesia dan Cina mengadakan perjanjian mengenai Dwi-Kewarganegaraan. Untuk pertama kali Cina mencabut pernyataan tradisionalnya, yaitu bahwa semua orang Cina adalah warganegara RRC.

Inti perjanjian Dwi-Kewarganegaraan itu menyatakan bahwa warga Cina yang tinggal di Indonesia wajib tunduk kepada undang-undang dan kebiasaan dari negara tempat tinggal dan tidak akan ikut serta dalam kegiatan politik di negara tempat mereka bertempat tinggal. Tetapi perjanjian ini dibatalkan oleh Indonesia pada tahun 1969 setelah ternyata Cina terlibat dalam usaha kudeta yang dilakukan oleh G-30-S/PKI tahun 1965 dan setelah hubungan diplomatik dibekukan tahun 1967. Sejak itu Pemerintah Indonesia mengatasi masalah kewarganegaraan dari warga Cina asing dengan naturalisasi

⁴Lihat Leo Suryadinata, *Pribumi Indonesians, the Chinese Minority and China* (Singapura: Heinemann Asia, 1986), hal. 113-115, atau terjemahannya yang berjudul *Dilema Minoritas Tionghoa* (Jakarta: PT Tempat, 1982), hal. 115-117.

⁵Lihat Lembaran Negara Republik Indonesia, no. 5 tahun 1958.

menurut Undang-undang Kewarganegaraan tahun 1958. Sebagai contoh, menurut Bagian 4, Undang-undang tersebut, orang asing kelahiran Indonesia yang orangtuanya berdiam dan lahir di Indonesia boleh mengajukan diri untuk mendapatkan kewarganegaraan Indonesia apabila mereka telah berumur 18 tahun. Sementara itu Bagian 5 Undang-undang itu mengatur bagi orang asing dewasa yang ingin menjadi warganegara Indoneia (WNI). Bagian itu menyatakan bahwa orang asing itu harus memenuhi persyaratan tempat tinggal, yaitu sekurang-kurangnya telah berdiam selama 5 tahun berturut-turut; persyaratan bahasa; mempunyai sumber penghasilan tetap dan diharuskan membayar kepada negara sebanyak Rp500-Rp10.000,00 atau suatu jumlah yang tidak lebih tinggi daripada penghasilan yang diperoleh selama satu bulan.⁶

Perubahan-perubahan sikap Cina dalam usahanya untuk menormalisasi hubungannya dengan Indonesia itu mulai mendapat tanggapan positif dari pihak Indonesia pada pertengahan 1980-an. Pada saat itu Indonesia mulai membuat terobosan baru dengan mengijinkan KADIN untuk menandatangani "Memorandum of Understanding (MOU)" dengan China Council for the Promotion of International Trade (CCPIT) di Singapura tanggal 5 Juli 1985. Bahkan MOU tersebut kemudian didukung sepenuhnya oleh Pemerintah Indonesia dengan dikeluarannya INPRES no. 9/1985 tanggal 23 Juli 1985 yang isinya mendukung secara resmi pembukaan kembali hubungan dagang langsung antara Indonesia dan Cina. Sementara itu penegasan yang selalu ditunggu-tunggu oleh pihak Indonesia akhirnya muncul juga.

⁶Menurut Keputusan Menteri Kehakiman tahun 1968 jumlah itu telah dinaikkan menjadi Rp30.000-Rp100.000.

Pernyataan penegasan itu untuk pertama kalinya terungkap ketika Wakil Perdana Menteri Cina, Wu Xueqian, bertemu "empat mata" dengan Ketua Kadin waktu itu, Sukamdani S. Gitosardjono, di Beijing tanggal 30 Juni 1988. Rupanya penegasan yang sekaligus merupakan jaminan itu diutarakan sebagai tanggapan terhadap sikap Indonesia yang telah dinyatakan oleh Presiden Soeharto dalam pidatonya di depan MPR tanggal 1 Maret 1988. Wu mengatakan bahwa Cina sudah bertahun-tahun tidak mempunyai hubungan dengan PKI. Oleh karena itu tidak ada masalah mengenai sokongan kepada siswa-siswi kekuatan PKI.⁷

Pernyataan jaminan pihak Cina itu kembali ditegaskan oleh Menteri Luar Negeri Cina, Qian Qichen, ketika bertemu dengan Menteri Sekretaris Negara, Moerdiono, yang menyertai Presiden Soeharto ke Tokyo. Penegasan Menlu Cina itu tampaknya tidak karena inisiatifnya sendiri, melainkan merupakan penegasan Pemerintah Cina, karena dia memang pada waktu itu menjadi utusan resmi Cina untuk menghadiri upacara pemakaman Kaisar Hirohito. Jadi kesepakatan Tokyo seperti yang telah disebutkan di atas mengungkapkan bahwa pihak Indonesia sudah menerima penegasan atau jaminan pihak Cina sehubungan dengan masalah PKI.

Dampak Normalisasi

Beberapa kalangan berpendapat bahwa normalisasi hubungan diplomatik antara Indonesia dan Cina akan lebih banyak menguntungkan pihak Cina daripada Indonesia. Tetapi kalau diamati lebih teliti, mungkin saja normalisasi tersebut bermanfaat juga bagi Indonesia baik ditinjau dari segi politik,

keamanan regional maupun ekonomi.

Ditinjau dari segi politik dan keamanan regional, normalisasi hubungan diplomatik itu banyak manfaatnya. Sebagai kekuatan terbesar di Asia Tenggara sudah saatnya Indonesia menunjukkan kepada dunia bahwa bangsa Indonesia tidak lagi bersikap "low profile." Sebagai negara yang menganut politik luar negeri yang bebas dan aktif, sikap yang aktif dalam percaturan internasional sangat penting. Terlebih-lebih jika dipandang dari kacamata negara Dunia Ketiga. Tepatlah kiranya jika yang dijadikan dasar normalisasi hubungan itu adalah Dasa Sila Bandung yang juga merupakan dasar dari Lima Prinsip Hidup Berdampingan Secara Damai. Sementara itu Cina yang merupakan negara besar di Asia dan sekaligus adalah salah satu anggota tetap Dewan Keamanan PBB, tidak bisa lagi diabaikan. Kedua negara ini bisa bekerjasama di banyak bidang untuk mengatasi berbagai masalah politik dan keamanan kawasan. Dalam masalah Kampuchea, misalnya, Cina memegang peranan kunci, karena tanpa melibatkan negara ini, masalah Kampuchea itu tidak akan dapat diselesaikan secara tuntas.⁸ Perlu diingat bahwa sikap keras Vietnam dalam masalah ini selalu saja dikaitkan oleh adanya apa yang disebut *ancaman Cina*. Dengan dicairkannya kembali hubungan diplomatik antara kedua negara itu, Indonesia akan lebih bisa banyak berperan, misalnya membantu menjembatani persengketaan antara Vietnam dan Cina.

Demikian pula halnya dalam konflik territorial di Laut Cina Selatan. Sekarang ini Cina secara fisik militer telah hadir di ka-

⁷Lihat Juwono Sudarsono, "Krisis Indocina: Dimensi Regional dan Internasional," *Analisa*, No. 5, Mei 1988, hal. 298-299.

⁷Suara Pembaruan, 18 Februari 1989.

wasan itu dengan pendudukannya di beberapa gugus pulau di Kepulauan Spratly. Tampaknya motivasi Cina menduduki pulau-pulau itu bukan hanya karena kepentingan ekonomi, tetapi juga kepentingan strategi. Tampaknya Cina merasa sudah saatnya untuk mengimbangi kehadiran Amerika Serikat dan Uni Soviet di kawasan itu. Semen-tara itu Cina juga mungkin ingin dirinya mulai diperhitungkan dalam percaturan regional. Kita belum tahu apa yang akan dilakukan Cina setelah berhasil merebut beberapa pulau yang sebelumnya diklaim Vietnam itu. Untuk mencegah hal-hal yang hanya akan mengganggu kestabilan keamanan kawasan, kiranya sudah waktunya kalau Indonesia, Cina, Vietnam dan negara-negara lain yang berkepentingan di kawasan Laut Cina Selatan duduk di meja perundingan mencari jalan pemecahan sengketa itu.

Ditinjau dari segi ekonomi normalisasi hubungan diplomatik itu juga banyak manfaatnya. Meskipun selama ini Indonesia terus mengalami defisit perdagangan dengan Cina, volume perdagangan kedua negara, terutama setelah ditandatanganinya MOU, terus meningkat. Ekspor Indonesia pada tahun 1986 bernilai US\$56,7 juta meningkat menjadi US\$118,7 juta atau meningkat 101%. Sementara itu impor Indonesia pada tahun 1986 bernilai US\$232,9 juta meningkat menjadi US\$238,4 juta atau meningkat 4%.⁹ Dari data tersebut di atas tampak bahwa ekspor Indonesia lebih cepat meningkatnya dibandingkan impornya. Hal ini berbeda dengan ketika Indonesia masih berdagang dengan Cina melalui negara ketiga (Hongkong). Dari tahun 1979 sampai 1981 misalnya, defisit perdagangan Indonesia dengan Cina bertambah besar. Pada tahun 1979 defisit tersebut adalah US\$120 juta,

1980 US\$159 juta dan tahun 1981 US\$230 juta.

Di sektor minyak Indonesia juga bisa mengadakan pembicaraan langsung dengan Cina, di saat harga patokan minyak OPEC belum mencapai US\$18 per barel. Rendahnya harga patokan minyak bumi itu disebabkan oleh produksi berlebihan dari negara-negara pengekspor minyak non OPEC termasuk Cina. Dalam hal ini Indonesia dan Cina bisa bekerjasama untuk mengatasi masalah keseragaman harga patokan minyak itu sehingga akan dicapai suatu kestabilan harga.

Terobosan baru Presiden Soeharto di Tokyo itu merupakan tindakan yang tepat, terutama dalam suasana hubungan internasional yang sudah berubah ini. Tampak pola hubungan internasional sekarang ini tidak lagi didasarkan pada kepentingan ideologi, melainkan pada kepentingan nasional. Karena kepentingan nasionalnya itu banyak negara semakin sadar akan semakin besarnya saling ketergantungan antar bangsa. Oleh karena itu tidak mengherankan bila telah terjadi pendekatan-pendekatan baru yang lebih bersifat penyesuaian. Hal ini terjadi tidak saja antara negara adi kuasa atau negara-negara besar, tetapi juga negara-negara di banyak kawasan yang sebelumnya dalam suasana berseteru.

Dalam hal hubungan dengan Cina, dampak negatif akan selalu dapat dicegah, apabila kita tetap waspada dan mengadakan persiapan sebaik-baiknya. Persiapan itu misalnya dengan: (1) melakukan pengawasan atas kehidupan organisasi sosial-politik, sehingga penyusupan dari kekuatan-kekuatan luar dapat dihindarkan; (2) membatasi jumlah diplomat Cina yang akan ditempatkan di Indonesia maupun membatasi ruang gerak

⁹Antara, 3 Maret 1989.

dan kegiatan mereka. Dalam hal pembukaan kantor Kedutaan, hendaknya Cina hanya diperkenankan membuka Kedutaannya di Jakarta dengan lokasi di luar "Kampung Cina" atau di luar wilayah Glodok; (3) menyelesaikan secara tuntas masalah kewarganegaraan Cina perantauan. Tampaknya dalam hal Cina Perantauan, Pemerintah Indonesia telah berusaha menuntaskan permasalahannya. Menurut Dirjen Imigrasi Departemen Kehakiman, data orang asing sejak 2 Januari sampai 2 Juli 1987 menunjukkan jumlah 350.000 orang, termasuk sekitar 100.000 orang Cina eks PP 10/1959. Untuk mengatasi masalah ini telah dikeluarkan Keputusan No. 05.01.06 tahun 1987 tertanggal 15 September 1987 oleh Menteri Kehakiman.¹⁰ Keputusan itu bertujuan menertibkan status keberadaan orang Cina asing eks PP 10/1959 ditinjau dari aspek keimigrasian dan untuk menghindarkan dampak kerawanan terhadap keamanan dan ketertiban negara atas ketidakpastian hukum bagi orang asing. Masalah Cina Perantauan yang ada di Indonesia jelas merupakan masalah intern, karena pihak Cina sudah mempunyai undang-undang kewarganegaraan yang jelas. Warga Cina asing di Indonesia sudah diberi waktu selama satu tahun, yaitu hingga 15 September 1988, untuk mendaftar kembali. Setelah tanggal tersebut, mereka yang tidak mendaftar kembali akan diperlakukan sebagai warga yang tak berkewarganegaraan (stateless).

Data mengenai Cina Perantauan atau Cina Asing mengungkapkan bahwa dari sekitar lima atau enam juta warga keturunan Cina, hanya sekitar 100.000 orang Cina Perantauan atau Cina Asing. Jadi sebagian besar penduduk keturunan Cina adalah warganegara Indonesia seperti warga Indonesia lainnya yang harus mendapat perlakuan yang sama pula. Yang terpenting adalah bagaimana pembangunan bangsa Indonesia yang ber-Bhinneka Tunggal Ika (karena daerah, suku, keturunan atau agama) dilakukan secara terus-menerus sehingga akan tercapai satu Ketahanan Nasional yang mantap, yang mampu menghadapi situasi regional dan internasional dengan penuh keyakinan. Mereka yang berasal dari keturunan Cina hendaknya juga dilibatkan secara aktif dalam pembangunan bangsa itu, sehingga mereka merasa sebagai satu bangsa, yaitu bangsa Indonesia. Sikap prasangka terhadap mereka hanya akan mendorong mereka menjadi eksklusif. Mereka yang sudah diakui mempunyai bakat dan keahlian di bidang bisnis itu justru harus diarahkan dan didorong untuk bersama-sama meningkatkan kesejahteraan rakyat sesuai dengan tujuan nasional seperti yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Kebijakan dan iklim semacam itu pada gilirannya turut membina perasaan memiliki dan tanggungjawab dari semua pihak akan kelangsungan kehidupan bangsa kita yang memang sangat majemuk ini.

¹⁰Antara, 4 Februari 1988.

Dokumen

RINGKASAN PERISTIWA ASEAN

Kegiatan-kegiatan ASEAN

Penyusun:
SUDIBYO,
DJOKOSUKOKARTARTO,
Yoyok ARIESSUSANTO

- I. SIDANG TAHUNAN PARA MENLU ASEAN
- II. KEGIATAN KERJASAMA ASEAN
 - A. Kerjasama Proyek Industri ASEAN
 - B. Kegiatan KADIN-ASEAN (ASEAN-CCI)
 - C. Kerjasama Energi ASEAN
 - 1. Seminar Perpjakan Hidrokarbon
 - 2. Kerjasama Perminyakan
 - D. Kerjasama Penerangan dan Pers ASEAN
 - 1. Pertemuan Dewan Konfederasi Wartawan ASEAN
 - 2. Seminar Pers ASEAN
 - E. Kerjasama Hukum ASEAN
 - F. Kerjasama Metereologi ASEAN
 - G. Kerjasama Pariwisata
 - 1. Forum Pariwisata ASEAN
 - 2. Taman Mini ASEAN
 - 3. Organisasi Kebun Binatang ASEAN
 - H. Kerjasama Kesehatan
 - 1. Palang Merah ASEAN
 - 2. Pertemuan Pengobat Tradisional ASEAN
- I. Kerjasama Sosial dan Tenaga Kerja
 - 1. Seminar Pembangunan dan Pertambahan Penduduk ASEAN
 - 2. Kerjasama Pemuda ASEAN
- J. Kerjasama Ekonomi dan Perdagangan
- K. Sidang AFTEX ke-11 di Manila
- L. Proyek Patungan ASEAN
- M. Kerjasama Pertanian dan Peternakan
- III. HARI ULANG TAHUN KE-21 ASEAN
- IV. HUBUNGAN ASEAN DENGAN MITRA-MITRANYA
 - A. Pertemuan ASEAN dengan Mitra Dialognya
 - B. Hubungan ASEAN-Australia
 - C. Hubungan ASEAN-Jepang
 - D. Hubungan ASEAN dengan Masyarakat Eropa
- V. PERTEMUAN INFORMAL JAKARTA
 - A. Persiapan-persiapan
 - B. Persidangan-persidangan
 - C. Hasil Pertemuan

I. SIDANG TAHUNAN PARA MENLU ASEAN

Sidang Para Menlu ASEAN ke-21 berlangsung di Bangkok tanggal 4-5 Juli 1988, dihadiri oleh Menlu Indonesia, Ali Alatas, Menlu Filipina, Raul Manglapus, Menlu Muangthai, Siddhi Savetsila, Menlu Singapura, Suppiah Dhanabalan, Menlu Malaysia, Dato Abu Hassan Omar dan Menlu Brunei Darussalam, Mohammad Bolkiah, untuk membahas antara lain cara-cara membantu mengakhiri konflik Kamboja, pengungsi Vietnam dan gagasan AS mengenai pembentukan Mini Marshall untuk membantu keuangan Filipina (*Antara*, 4 Juli 1988).

Sebelum sidang itu dimulai, dilangsungkan pertemuan-pertemuan untuk mempersiapkannya, seperti Pertemuan Para Pejabat Senior ASEAN di Bangkok tanggal 31 Juni 1988, Pertemuan Panitia Tetap ASEAN di Bangkok tanggal 1 Juli dan Pertemuan Tidak Resmi Para Menlu ASEAN di Bangkok juga tanggal 3 Juli 1988.

Pertemuan para Pejabat Senior ASEAN membahas program bantuan untuk membangun perekonomian Filipina, pengungsi Vietnam dan Pertemuan Informal Jakarta atau Jakarta Informal Meeting (JIM) (*Antara*, 2 Juli 1988). Pertemuan Panitia Tetap ASEAN membahas kemajuan kerjasama berbagai kepanitiaan yang berada dalam tanggung jawabnya, program kegiatan dan jadwal pertemuan ASEAN dengan mitra dialognya. Pertemuan ini menyetujui pedoman keikutsertaan pihak swasta dalam setiap pertemuan ASEAN ataupun antara ASEAN dan mitra dialognya, serta menandatangi pernyataan tentang kemajuan peranan wanita ASEAN di berbagai bidang kehidupan (*Antara*, 2 Juli 1988). Sementara, dalam pertemuan tidak resminya itu, para Menlu ASEAN menyatakan bahwa ASEAN mendukung rencana penyelenggaraan JIM, dan menyambut baik keinginan Vietnam dan kelompok-kelompok perlawanan Kamboja untuk menghadiri JIM (*Antara*, 4 Juli 1988).

PM Muangthai, Prem Tinsulanonda, mengatakan pada sidang pembukaan bahwa: (1) dukungan Uni Soviet untuk membantu menyelesaikan konflik Kamboja secara damai pantas dihargai; (2) konflik Kamboja telah mengakibatkan negara-negara Asia Tenggara kehilangan waktu 10 tahun yang seharusnya dapat untuk membangun perekonomian dan politiknya (*Pelita*, 5 Juli 1988); (3) usul Pangeran Norodom Sihanouk mengenai pembentukan Pasukan Pemelihara Perdamaian

an di Kamboja agar diperhatikan; (4) keikutsertaan Sekjen PBB untuk membantu menyelesaikan konflik Kamboja merupakan usaha agar perdamaian di Kamboja dapat ditegakkan dan dipelihara; (5) negara-negara yang terlibat dalam penyelesaian konflik Kamboja menginginkan penarikan pasukan asing, rekonsiliasi nasional dan pelaksanaan hak menentukan nasib sendiri rakyat Kamboja menuju terbentuknya negara yang merdeka, netral dan non-blok serta tidak merupakan ancaman bagi negara tetangganya (*Antara*, 5 Juli 1988).

Menlu Siddhi Savetsila mengatakan pada kesempatan itu pula bahwa: (1) JIM memberi harapan untuk menyelesaikan konflik Kamboja; (2) dia menghargai prakarsa Indonesia untuk menyelesaikan konflik Kamboja (*Kompas*, 5 Juli 1988); (3) ASEAN harus segera melaksanakan keputusan KTT ASEAN III untuk meningkatkan perdagangan antar regional (*Antara*, 5 Juli 1988).

Menlu Ali Alatas mengemukakan pada acara yang sama bahwa: (1) negara anggota ASEAN agar bersikap tegar untuk mengusahakan Asia Tenggara sebagai kawasan bebas nuklir; (2) terciptanya kawasan Asia Tenggara yang bebas nuklir merupakan sumbangan penting dalam proses pembatasan persenjataan nuklir (*Antara*, 4 Juli 1988); (3) ASEAN harus secara bertahap menghapuskan hambatan perdagangan dan investasi antar ASEAN; (4) ASEAN agar meningkatkan partisipasi pihak swasta dan memperluas usaha-usaha patungan dengan penanaman modal asing (*Antara*, 5 Juli 1988).

Menlu Dato Abu Hassan Omar mengemukakan perlunya ASEAN bekerja keras untuk meningkatkan perdagangan antar regional. Selanjutnya Menlu Malaysia itu mengatakan bahwa: (1) ASEAN prihatin atas usaha negara-negara industri yang memulihkan ekonomi domestiknya melalui proteksionisme; (2) negara-negara industri agar memberi kesempatan bagi masuknya produk-produk ekspor ASEAN dengan menghapuskan hambatan tarif dan non-tarif serta praktik perdagangan yang tidak adil (*Antara*, 5 Juli 1988).

Menlu Mohammad Bolkiah mengatakan bahwa Sekretariat ASEAN di Jakarta perlu diperkuat agar dapat melaksanakan keputusan-keputusan KTT ASEAN III dan menyediakan informasi ekonomi (*Antara*, 5 Juli 1988).

Menlu Raul Manglapus mengemukakan bahwa: (1) penyelesaian konflik Kampuchea diharapkan dapat mendorong AS mewujudkan gagasan tentang kawasan

damai; (2) kini merupakan saat yang tepat untuk menghapuskan semua hambatan hubungan ekonomi internasional; (3) negaranya berusaha keras untuk mengatasi hutangnya (*Antara*, 5 Juli 1988).

Menlu Suppiah Dhanabalan mengatakan bahwa pengembangan pola preferensi perdagangan mengalami kemajuan dan telah mengurangi hambatan-hambatan non-tarif (*Antara*, 5 Juli 1988).

Sidang Para Menlu ASEAN itu diakhiri dengan penandatanganan deklarasi tentang Kemajuan Peranan Wanita ASEAN (Development on the Advancement of Women in the ASEAN Region), dan tiga Memorandum of Understanding, mengenai Program Kerjasama ASEAN-Australia, Program Pasca Panen Biji-bijian ASEAN-Kanada dan Pertukaran Data ASEAN dengan AS (*Automated Data Exchange*) (*Antara*, 5 Juli 1988).

Komunike bersama tanggal 5 Juli 1988 mengatakan antara lain bahwa para Menlu ASEAN: (1) menegaskan kembali dukungannya atas rencana bantuan multilateral untuk membangun ekonomi Filipina; (2) menghendaki agar negara-negara industri mendukung program bantuan ASEAN itu; (3) menyetujui dukungan negara-negara industri untuk menghapuskan proteksionisme, meningkatkan bantuan keuangan dan menerapkan kebijaksanaan anggaran dan moneter yang tepat untuk mengatasi beban hutang Dunia Ketiga; (4) menyetujui usaha-usaha negara-negara industri untuk menstabilkan nilai tukar mata uang dunia (*Antara*, 5 Juli 1988); (5) mendesak para Menteri Ekonomi ASEAN agar memberi peranan yang lebih besar kepada pihak swasta dalam Pertemuan Para Menteri Ekonomi ASEAN (*Suara Pembaruan*, 5 Juli 1988); (6) prihatin atas masih berlangsungnya pendudukan Vietnam di Kamboja. Tindakan Vietnam itu bertentangan dengan Piagam PBB dan Hukum Internasional serta merintangi tercapainya perdamaian dan stabilitas di kawasan Asia Tenggara; (7) menyetujui penyelesaian politik secara menyeluruh atas konflik Kamboja melalui penarikan pasukan Vietnam dan pelaksanaan hak menentukan nasib sendiri rakyat Kamboja di bawah pengawasan internasional; (8) prihatin atas mengalirnya arus pengungsi ke negara-negara ASEAN. Hal ini dapat mempengaruhi stabilitas kawasan Asia Tenggara; (9) menyetujui usaha pencegahan arus pengungsi. Mereka mengusulkan agar: (a) Vietnam bekerjasama dengan masyarakat internasional mengatur *Orderly Departure Programme* (ODP) dan harus bersedia menerima kembali pengungsi Vietnam; (b) Laos mempercepat proses pengembalian para pengungsi yang diatur UNHCR, dan bersedia

menerima mereka kembali dengan spontan dan selamat (*Kompas*, 6 Juli 1988); (10) mendesak masyarakat internasional agar tidak memberi bantuan ekonomi kepada Vietnam selama pasukannya belum ditarik dari Kamboja (*Antara*, 6 Juli 1988); (11) mendesak Jepang agar lebih banyak memasarkan produk-produk ASEAN, terutama barang-barang manufaktur dan semi konduktor; (12) menegaskan kembali perlunya Jepang mengusahakan cara untuk meringankan beban hutang negara-negara ASEAN sebagai akibat naiknya Yen; (13) menyetujui pencalonan Malaysia sebagai anggota DK-PBB periode 1989-1990; (14) menyetujui usul untuk menetapkan tahun 1992 sebagai Tahun Kunjungan ASEAN (*Kompas*, 6 Juli 1988).

II. KEGIATAN KERJASAMA ASEAN

A. KERJASAMA PROYEK INDUSTRI ASEAN

Pertemuan Asosiasi Industri Pulp dan Kertas ASEAN atau ASEAN Pulp and Papers Industrial Corporation (APPIC) ke-5 berlangsung di Kuala Lumpur tanggal 11 Juli 1988, dihadiri oleh 51 peserta dari negara-negara ASEAN.

Deputi Menteri Perdagangan dan Perindustrian Malaysia, Datuk Kok Wee, mengatakan pada pembukaan pertemuan itu bahwa: (1) kerjasama ekonomi ASEAN perlu dilakukan untuk mengetahui potensi industri pulp dan kertas di kawasan ASEAN. Hal ini berguna untuk menjamin kelangsungan hidup para produsen pulp dan kertas di tengah kelesuan ekonomi dunia; (2) perkembangan industri pulp dan kertas akan mempercepat pertumbuhan perdagangan antara anggota ASEAN (*Antara*, 12 Mei 1988).

Pertemuan Panitia Ahli Proyek Automotif ASEAN berlangsung di Kuala Lumpur tanggal 13-14 Juni 1988, dihadiri oleh 33 peserta dari negara-negara ASEAN, kecuali Indonesia, untuk menyusun rancangan memorandum tentang proyek automotif yang akan disampaikan kepada Komisi Industri, Pertambangan dan Energi ASEAN. Rancangan memorandum itu meliputi usaha Mitsubishi Motor Corporation (MMC) dan perusahaan-perusahaan patungan ASEAN untuk memproduksi 100 komponen kendaraan tertentu yang dapat ditukar dengan komponen lain dari negara-negara ASEAN (*Antara*, 15 Juni 1988).

B. KEGIATAN KADIN-ASEAN (ASEAN-CCI)

Ketua Eksekutif Panitia Kerja Kelompok 14 (K-14), Paul Leong, mengatakan di Kuala Lumpur tanggal 13 Mei 1988 bahwa Panitia Kerja Kelompok 14 yang dibentuk oleh KADIN-ASEAN tanggal 26 November 1987 akan diubah menjadi sekretariat teknis untuk memperjuangkan masa depan ekonomi ASEAN (*Suara Karya*, 13 Mei 1988).

Seorang anggota Panitia Kelompok 14, Datuk Muhammad Ramli Kushairi mengatakan di Kuala Lumpur tanggal 16 Juli 1988 bahwa AFC perlu dikaji kembali: (1) karena gagal membiayai pembangunan AIJV; (2) agar tugas utama AFC untuk membiayai AIJV yang ditetapkan enam tahun lalu dapat normal kembali (*Antara*, 17 Juli 1988).

Pertemuan KADIN-ASEAN berlangsung di Kuala Lumpur tanggal 18-23 Juli 1988 untuk membahas fungsi dan kegiatan Badan Usaha Keuangan ASEAN atau ASEAN Finances Corporation (AFC), serta penanaman modal untuk proyek AIJV (ASEAN Industrial Joint Ventures).

Ketua Kelompok Kerja Bidang Industri Patungan ASEAN Dr. Sunarto Brawerosuyanto mengatakan pada pertemuan tanggal 18 Juli 1988 bahwa: (1) KADIN-ASEAN menyetujui 16 proyek perindustrian usaha patungan ASEAN dengan biaya US\$80 juta yang pelaksanaannya sedang dikaji; (2) proyek patungan itu meliputi produksi komponen sepeda motor, mobil, mesin listrik, pemrosesan daging, bahan kimia dan kertas berharga; (3) KADIN-ASEAN juga sedang meneliti 110 jenis produk berpotensi sebagai pengganti barang impor (*Antara*, 19 Juli 1988).

Ketua KADIN Indonesia selaku Ketua Delegasi Indonesia, Sukamdani S. Gitosardjono, mengatakan pada pertemuan tanggal 19 Juli 1988 bahwa: (1) Indonesia mengusulkan perdagangan bilateral antar negara anggota ASEAN, untuk mendorong kerjasama investasi dan teknologi; (2) usul Indonesia itu merupakan salah satu usaha nyata dari kesepakatan bersama untuk meningkatkan kerjasama ekonomi ASEAN (*Antara*, 20 Juli 1988).

Sekjen KADIN-ASEAN Jose Luis Yulo Jr. mengatakan pada pertemuan tanggal 20 Juli 1988 bahwa: (1) sejak 1 Juli 1988 negara-negara ASEAN menerapkan sistem harmoni, suatu sistem bea cukai terbaru untuk memudahkan dan menyeragamkan pengaturan perda-

gan di kawasan ASEAN; (2) Malaysia merupakan negara pertama yang melaksanakan sistem itu dalam penyusunan dan pengelompokan barang dengan kode baru (*Antara*, 21 Juli 1988). Direktur Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan dan Perindustrian Malaysia, Harun Siraj, mengatakan pada pertemuan tanggal 20 Juli 1988 bahwa: (1) sistem harmoni ini dapat merupakan patokan dasar untuk menentukan jenis barang, harga bea masuk dan segala keperluan bea cukai; (2) Malaysia akan membantu kesulitan negara-negara ASEAN lainnya untuk melaksanakan sistem itu; (3) pelaksanaan sistem itu jangan sampai mengganggu kepentingan para pengusaha (*Antara*, 21 Juli 1988).

C. KERJASAMA ENERGI ASEAN

1. Seminar Perpajakan Hidrokarbon

Seminar Perpajakan Hidrokarbon dan Kaitannya dengan Pengembangan dan Eksplorasi Minyak Bumi untuk Negara-negara ASEAN berlangsung di Jakarta tanggal 20-25 Juni 1988 untuk membahas harga, sistem perpajakan dan investasi asing dalam bidang minyak bumi.

Dirjen Pajak Salamun A.T., mengatakan pada penutupan seminar itu bahwa: (1) ASEAN agar membentuk futures market (perdagangan dengan penyerahan kemudian) untuk menciptakan harga minyak yang lebih stabil di kawasan Asia Tenggara yang dipusatkan di Singapura; (2) fluktuasi harga minyak dunia sangat menyulitkan perkiraan kepastian harga minyak; (3) ASEAN sedang mempelajari usul futures market itu (*Suara Karya*, 27 Juni 1988).

Koordinator ESCAP, Filino Harahap mengatakan pada acara yang sama bahwa: (1) ASEAN mempunyai kemampuan untuk mengekspor 2 juta barrel minyak mentah per hari; (2) penjualan sekitar 50 juta barrel minyak per hari oleh futures market di London dan New York sangat mempengaruhi harga minyak di pasar dunia (*Suara Karya*, 27 Juni 1988).

Pada kesempatan yang sama, Direktur Peraturan Perpajakan selaku Ketua Delegasi Indonesia, Drs. Masury, mengatakan bahwa melalui futures market: (a) negara-negara ASEAN dapat mengikuti perkembangan harga minyak yang berkaitan dengan kegiatan investasi hidrokarbon; (2) pemungutan pajak dan investasi hidrokarbon dapat ditingkatkan (*Suara Karya*, 27 Juni 1988).

2. Kerjasama Perminyakan

Pertemuan informal Menteri Perminyakan tiga negara ASEAN penghasil minyak berlangsung di Bali tanggal 20 Agustus 1988 untuk membahas: (1) perkembangan harga minyak dunia; (2) hubungan OPEC dan non-OPEC; (3) prospek pasaran di semua kawasan, termasuk Jepang; (4) penciptaan kerjasama dalam konteks ASEAN.

Menteri Pertambangan dan Energi Indonesia, Ginanjar Kartasasmita, mengatakan kepada pers di Bali tanggal 20 Agustus 1988 bahwa: (1) Malaysia dan Brunei mendukung penuh keputusan OPEC untuk menciptakan stabilitas harga minyak dunia, dan para anggota OPEC agar mengendalikan diri sehubungan dengan ketentuan produksi yang sudah ditetapkan; (2) Malaysia dan Brunei bersedia menurunkan produksinya untuk menstabilkan harga minyak dunia; (3) semua negara anggota OPEC harus mentaati tingkat produksi; (4) saat ini wadah permanen bagi negara pengekspor minyak ASEAN dirasakan belum perlu; (5) pertemuan informal semacam ini memungkinkan masing-masing pihak berbicara lebih efektif, tulus dan ikhlas; (6) forum ini berfungsi sebagai jembatan antara OPEC dan non-OPEC (*Suara Pembaruan*, 22 Agustus 1988).

Mereka sepakat untuk: (1) mengadakan konsultasi secara periodik; (2) bertemu kembali pada akhir November 1988, dan Indonesia akan melaporkan hasil sidang OPEC. Di samping itu, Malaysia dan Brunei Darussalam menjamin dan mendukung Indonesia untuk terus-menerus memperjuangkan stabilitas harga minyak; (5) meminta semua anggota OPEC untuk menciptakan keutuhan yang lebih kuat agar keputusan yang disepakati mudah dilaksanakan dan dicapai; (6) tidak bersaing memasarkan minyak ke Jepang. Selain itu, mereka juga menyatakan bahwa gencatan senjata antara Iran dan Irak akan memberikan dampak positif terhadap perkembangan minyak dunia (*Suara Pembaruan*, 22 Agustus 1988).

Wakil Ketua Komisi VI DPR-RI, Budi Hardjono, mengatakan kepada *Antara* di Jakarta tanggal 20 Agustus 1988 bahwa: (1) langkah ketiga negara dibidang perminyakan itu sangat tepat, khususnya untuk menghadapi situasi pasar Jepang; (2) Brunei bisa membantu Indonesia atau OPEC, untuk menciptakan iklim psikologis pasar minyak internasional; (3) untuk memperkokoh kebersamaan dan kekuatan ASEAN perlu dibentuk kerjasama patungan (*Antara*, 21 Agustus 1988).

D. KERJASAMA PENERANGAN DAN PERS ASEAN

1. Pertemuan Dewan Konfederasi Wartawan ASEAN

Pertemuan anggota Dewan Konfederasi Wartawan ASEAN atau Confederation of ASEAN Journalists (CAJ) ke-8 berlangsung di Jakarta tanggal 15-16 Agustus 1988, diikuti oleh para wakil 5 negara anggota ASEAN serta Jepang sebagai peninjau untuk membahas antara lain: (1) evaluasi kegiatan CAJ; (2) kerjasama CAJ dengan Perhimpunan Penerbit dan Wartawan Surat Kabar Jepang (Nihon Shimbun Kyokai atau NSK).

Sekretaris tetap CAJ, Drs. Djaffar Assegaff melaporkan bahwa: (1) hasil pertemuan ini akan menjadi masukan bagi Pertemuan Menteri Penerangan ASEAN; (2) dalam empat bulan mendatang Indonesia akan menyelenggarakan tiga kegiatan yang melibatkan para wartawan ASEAN, yakni seminar pemberitaan negara-negara ASEAN di media massa Indonesia, seminar sistem media massa di negara-negara ASEAN dan Pertemuan Para Menteri Penerangan ASEAN yang masing-masing akan diselenggarakan pada bulan September, Oktober dan Desember 1988 (*Antara*, 15 Agustus 1988).

Menteri Penerangan Indonesia, Harmoko mengatakan kepada para anggota Dewan Direktur Konfederasi Wartawan ASEAN di Jakarta tanggal 16 Agustus 1988 bahwa: (1) peningkatan kemampuan dan keterampilan wartawan dapat memperkokoh pers ASEAN; (2) Indonesia akan membantu menyediakan tempat pusat pendidikan dan latihan wartawan ASEAN di Multi Media Training Centre (MMTC) di Yogyakarta.

Pada kesempatan itu, Wakil Presiden CAJ, Ivan Lim melaporkan pula bahwa sidang merumuskan peningkatan kegiatan CAJ, termasuk kegiatan CAJ di forum internasional serta penghimpunan dana dari anggota (*Suara Karya*, 19 Agustus 1988).

Hasil Pertemuan CAJ ke-8 itu antara lain: (1) CAJ menerima usul PWI untuk menyelenggarakan simposium tentang Tata Baru Informasi dan Komunikasi Internasional di Jakarta; (2) simposium akan diselenggarakan bertepatan dengan Hari Pers ASEAN tanggal 11 Maret 1989; (3) CAJ dan NSK sepakat untuk memperluas kerjasama; (4) program tahunan CAJ dan NSK Fellowship yang telah berlangsung 11 tahun akan diteruskan; (5) program tahun depan CAJ dan NSK adalah

kajian masalah urbanisasi. Lima belas wartawan ASEAN, masing-masing 3 dari tiap negara, akan dipilih untuk mengikuti program orientasi selama 40 hari di Jepang atas undangan NSK (*Suara Karya*, 20 Agustus 1988).

Seusai melaporkan hasil pertemuan CAJ kepada Presiden Soeharto di Istana Merdeka tanggal 15 Agustus 1988, Menteri Penerangan Harmoko mengatakan bahwa: (1) Pertemuan Para Senior Bidang Penerangan ASEAN akan berlangsung di Jakarta tanggal 6-7 Desember 1988 untuk membahas perwujudan tata informasi ASEAN, kerjasama tarif dan bidang liputan serta pengembangan kerjasama informasi lainnya; (2) Pertemuan Menteri Penerangan ASEAN akan berlangsung di Jakarta tanggal 8-9 Desember 1988 (*Pelita*, 16 Agustus 1988).

2. Seminar Pers ASEAN

Seminar Pers ASEAN yang berlangsung di Jakarta tanggal 23-25 Agustus 1988 dihadiri oleh pejabat-pejabat pemerintah bidang penerangan, para ahli komunikasi dan beberapa redaktur media massa ASEAN serta 70 orang peninjau, untuk membahas sistem pers di negara-negara ASEAN.

Menyatakan pada pembukaan seminar bahwa: (1) pers di negara-negara ASEAN mengemban misi untuk memperkokoh persatuan dan kesetiakawanan anggota; (2) pers ASEAN harus mampu mendorong terwujudnya Kawasan Damai Bebas dan Netral (ZOPFAN); (3) pers ASEAN mampu meningkatkan ketahanan nasional dan menangkal pemberitaan yang mengganggu stabilitas nasional; (4) membicarakan sistem pers negara-negara ASEAN bukan berarti mencampuri sistem pers masing-masing negara anggota; (5) pers ASEAN dituntut untuk memantapkan fungsi guna meningkatkan kecerdasan dan kesejahteraan masyarakat; (6) konsultasi pers ASEAN memberikan kesempatan untuk bertukar pengalaman dan pengetahuan guna mendalami sistem pers ASEAN (*Jayakarta*, 24 Agustus 1988).

Pada kesempatan yang sama, Sekjen ASEAN Mass Communication Research and Information (AMIC), Vijay Menon, mengatakan bahwa: (1) kebebasan pers negara Barat yang menekankan konfrontasi dengan penguasa tidak sesuai lagi dengan nilai-nilai tradisional dan lingkungan ASEAN; (2) salah satu tugas pers

negara berkembang adalah meningkatkan keterpaduan yang sangat diperlukan bagi pembangunan politik dan bangsanya; (3) pers nasional harus mendukung program pembangunan; (4) forum atau seminar ini bermanfaat untuk meningkatkan saling pengertian yang dapat menghidupkan peranan pers dalam kawasan yang beranekaragam budaya dan politik.

Ketua Dirjen Pers dan Grafika Indonesia, Janner Sinaga, mengatakan: (1) sistem pers Pancasila merupakan sumbangsih Indonesia bagi pengembangan sistem pers internasional, khususnya ASEAN; (2) tradisi pers Indonesia adalah pers perjuangan; (3) kebebasan pers yang bertanggungjawab dapat mencegah timbulnya anarki, dan menjalin dinamika pers (*Jayakarta*, 24 Agustus 1988).

Wakil Direktur Penerangan dan Komunikasi Singapura, Baskaran Nair, mengatakan: (1) pers harus memisahkan pendapatnya dari pelaporan berita; (2) kadang-kala pers harus meliput hal-hal yang berkaitan dengan perdebatan dan perbedaan pendapat; (3) surat kabar bukan tempat wartawan untuk berkampanye tentang isyu politik; (4) sistem pers Singapura adalah pemerintah terbuka terhadap pers; (5) pemerintah bisa meminta pers untuk memberitakan sesuatu; (6) pemerintah secara tetap memberikan briefing kepada wartawan utama untuk menjelaskan latar belakang pemikirannya; (7) pemerintah dan wartawan berbagi persepsi dan nilai-nilai secara luas; (8) pemerintah dan redaksi harus berbagi pendapat, idealisme dan tujuan secara luas (*Kompas*, 25 Agustus 1988).

Sementara itu pengajar pada Departemen Komunikasi Universitas Kebangsaan Malaysia, Dr. Syed Arabi Idid, mengatakan: (1) media massa harus dilihat dari fungsi pembaca, pendengar dan pemirsanya. Semuanya harus aktif menentukan secara tajam pilihan acara yang diinginkan. Mereka harus kritis untuk menilai pilihan isyu-isyu yang muncul. Mereka juga mempunyai kekuatan tertentu untuk menuntut kualitas penerbitan yang disajikan; (2) sistem pers dapat bekerja secara aktif dalam sistem sosial yang lebih besar; (3) pers bisa dikatakan sebagai hati nurani masyarakat yang harus bisa berfungsi integratif; (4) pers berfungsi pula sebagai pengawas dan transmisi kebudayaan bagi kebaikan masyarakat sendiri (*Kompas*, 25 Agustus 1988).

Pemimpin Redaksi Harian Kompas, Jakob Oetama mengatakan: (1) pers Indonesia mendukung ideologi dan tujuan nasional; (2) pers sulit untuk menjalankan peranan yang mendukung pembangunan dan tanggung

jawabnya secara keseluruhan; (3) perbedaan pendapat antara pemerintah dan pers harus ditolerir untuk menemukan saling pengertian; (4) dialog pemerintah dan media massa merupakan alat utama yang tepat untuk menyambung pengertian (*Kompas*, 25 Agustus 1988).

Pernyataan bersama antara lain: (1) pers ASEAN seharusnya mempergunakan kebebasan secara produktif; (2) pers ASEAN harus memperhitungkan kelompok-kelompok tertentu yang harus dilayani; (3) pers ASEAN harus membuat kritik yang layak terhadap semua lembaga di dalam masyarakat sebagai bagian dari perannya dalam pembangunan nasional; (4) pers ASEAN agar mengendalikan diri untuk menghindari salah paham antara kelompok-kelompok yang berbeda agama, ras, dan etnik; (5) media penting sekali diberi kesempatan memperoleh informasi yang sangat diperlukan untuk proses pembangunan; (6) pers nasional ASEAN memikul tanggung jawab yang berat untuk menjalankan kebebasan, karena harus bekerja dalam kerangka kesetiaan terhadap negara (*Merdeka*, 29 Agustus 1988).

E. KERJASAMA HUKUM ASEAN

Seminar tentang kerjasama hukum ASEAN untuk memperingati HUT ASEAN ke-21 berlangsung di Sekretariat ASEAN Jakarta tanggal 20 Agustus 1988. Ketua Komite Nasional ASEAN Law Association (ALA), Teuku Muhammad Radhie SH mengatakan bahwa: (1) sebagai organisasi regional, ASEAN perlu mengadakan kerjasama di bidang hukum; (2) berbagai kegiatan kerjasama dalam jangka panjang harus diberi kerangka hukum dan tidak dapat ditetapkan atas dasar policy saja; (3) dewasa ini kesatuan hukum ASEAN sulit diwujudkan karena masih kuatnya paham keadautan negara di negara ASEAN; (4) sejak semula ASEAN tidak menghendaki suatu supra organisasi di atas negara anggota; (5) ASEAN perlu mempelajari cara-cara untuk mengatasi perbedaan hukum; (6) di masa mendatang model hukum yang memungkinkan keharmonisan akan banyak digunakan karena tidak menimbulkan masalah kedaulatan (*Suara Pembaruan*, 20 Agustus 1988).

F. KERJASAMA METEOROLOGI ASEAN

Pertemuan Sub-Komite Klimatologi ASEAN atau ASEAN Sub-Committee Climatology (ASCC)

berlangsung di Jakarta tanggal 22-24 Agustus 1988 untuk membahas kerjasama klimatologi, geofisika dan meteorologi.

Ketua Badan Meteorologi dan Geofisika (BMG) Indonesia, Drs. Sutrisna, mengatakan pada pembukaan pertemuan itu bahwa: (1) untuk mengatasi kebutuhan tenaga ahli dan dana penanganan meteorologi ASEAN, perlu dibentuk pusat meteorologi khusus regional; (2) badan ini menangani ramalan cuaca dan meningkatkan pelayanan meteorologi bagi kebutuhan nasional masing-masing negara (*Kompas*, 24 Agustus 1988).

G. KERJASAMA PARIWISATA

1. Forum Pariwisata ASEAN

Direktur Badan Promosi Pariwisata Singapura, Emile Thai, mengatakan kepada komponen pariwisata di Bali tanggal 27 Juli 1988 bahwa forum pariwisata ASEAN yang bertema "Suatu Gabungan Kerjasama Guna Meraih Kemenangan Bersama dalam Pariwisata ASEAN" akan berlangsung di Singapura tanggal 24-29 Januari 1989. Tujuan forum ini antara lain: (1) menjadikan ASEAN sebagai kawasan pariwisata yang terkenal di dunia; (2) meningkatkan daya saing ASEAN sebagai daerah tujuan wisatawan mancanegara di kawasan Asia-Pasifik; (3) mempererat kerjasama antara komponen industri pariwisata ASEAN.

Pada kesempatan itu Kepala Kanwil Deparpostel Drs. Ngurah Ketut mengatakan: (1) ASEAN harus mempererat kerjasama promosi pariwisata untuk menerobos pasaran dunia; (2) komponen pariwisata Indonesia harus berpartisipasi aktif dalam forum itu (*Angkatan Bersenjata*, 29 Juli 1988).

2. Taman Mini ASEAN

Pada tanggal 29 Juli 1988, Menteri Besar Malaka, Rahim Thamby Cik meresmikan pembukaan 7,5 ha areal untuk Proyek Taman Mini di Malaka. Proyek ini direncanakan selesai akhir tahun 1989. Rahim Thamby Cik mengatakan bahwa: (1) proyek ini dibangun untuk meningkatkan pengetahuan wisatawan Malaysia yang ingin berkunjung ke negara-negara ASEAN, serta melengkapi Malaka sebagai daerah tujuan wisata; (2) kecuali Brunei Darussalam, setiap negara ASEAN telah mengirim dua macam bentuk rumah berciri khas negara

masing-masing (*Antara*, 30 Juli 1988).

3. Organisasi Kebun Binatang ASEAN

Pertemuan pertama pembentukan Organisasi Kebun Binatang ASEAN, yang dihadiri oleh wakil-wakil dari Indonesia, Malaysia, Muangthai dan Singapura, berlangsung di Kuala Lumpur tanggal 27-29 Juli 1988 untuk membahas: (1) strategi perkembangan kebun binatang yang dapat membantu program pariwisata; (2) cara-cara perawatan kebun binatang di setiap negara ASEAN; (3) pertukaran informasi dan program pendidikan; (4) latihan petugas kebun binatang dan pertukaran binatang (*Antara*, 14 Juli 1988).

Mereka sepakat untuk: (1) membentuk Asosiasi Kebun Binatang ASEAN; (2) mengadakan pertukaran binatang langka; (3) mengadakan pertemuan berkala dua tahun sekali untuk bertukar pikiran, pandangan dan pengalaman; (4) menjadikan kebun binatang bukan hanya sebagai tempat wisata atau rekreasi tetapi sebagai pusat pendidikan juga; (5) menjadikan kebun binatang sebagai pusat penelitian dan pengembangan hewan langka (*Suara Pembaruan*, 12 Agustus 1988).

H. KERJASAMA KESEHATAN

1. Palang Merah ASEAN

Pertemuan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah ASEAN berlangsung di Jakarta tanggal 4-5 Agustus 1988 untuk membahas: (1) kegiatan Palang Merah ASEAN di masa mendatang; (2) rekayasa sosial dan penanggulangan bencana; (3) pencarian dana; (4) hukum perikemanusiaan internasional; (5) pengungsi.

Menko Kesra Soepardjo Rustam mengatakan bahwa: (1) ilmu pengetahuan dan teknologi canggih selain meningkatkan kesejahteraan manusia juga dapat membawa bencana karena kesembronaan dalam penerapannya; (2) Palang Merah dapat membantu pemerintah untuk menanggulangi bencana yang timbul; (3) hubungan pemerintah dan gerakan Palang Merah harus dipelihara dan diperkuat (*Kompas*, 5 Agustus 1988).

2. Pertemuan Pengobat Tradisional ASEAN

Pertemuan Sistem Pengobat Tradisional ASEAN

yang berlangsung di Bangkok tanggal 19 Juni 1988 membahas: (1) persiapan Kongres ke-3 Perhimpunan Pengobat Tradisional ASEAN yang akan berlangsung di Bangkok, September 1988; (2) pengembangan sistem pengobatan tradisional yang efektif, efisien dan ekonomis (*Antara*, 23 Juni 1988).

Ketua Pengurus Pusat Ikatan Naturopatis Indonesia (INI), Prof. Hembing Wijayakesuma, mengatakan kepada pers di Jakarta tanggal 23 Juni 1988 bahwa: (1) penemuan baru sistem pengobatan tradisional dengan sengatan lebah akan diperkenalkan; (2) pengobatan menggunakan lebah jenis Apis Mellifere merupakan yang pertama dikembangkan di Indonesia dan di dunia; (3) lebah jenis ini mengandung zat yang efektif untuk merangsang penyembuhan penyakit rematik, pinggang, nyeri syaraf, lumpuh dan pegal linu (*Antara*, 23 Juni 1988).

I. KERJASAMA SOSIAL DAN TENAGA KERJA

1. Seminar Pembangunan dan Pertambahan Penduduk ASEAN

Seminar Pembangunan dan Pertambahan Penduduk ASEAN yang berlangsung di Jakarta tanggal 28 Juni - 1 Juli 1988, dihadiri oleh 70 orang peserta membahas berbagai hasil studi ASEAN di bidang kependudukan dan membuat rekomendasi serta kesimpulan studi.

Seusai melapor Presiden Soeharto di Istana Merdeka tanggal 26 Juni 1988, Kepala BKKBN Pusat Harryono Suyono mengatakan kepada pers bahwa seminar: (1) akan mengadakan peninjauan lapangan mengenai perkembangan KB di Indonesia; (2) akan berdialog dengan pemimpin lembaga kependudukan; (3) bersifat teknis dan menyangkut bentuk kerjasama kependudukan ASEAN di masa mendatang (*Kompas*, 21 Juni 1988).

Wakil Presiden Sudharmono mengatakan pada pembukaan seminar bahwa: (1) seminar itu agar dapat menjadi forum komunikasi dan sumber inspirasi untuk menyempurnakan program kependudukan ASEAN di masa mendatang; (2) seminar agar menghasilkan kesimpulan yang terarah dan terpadu tetapi tetap realistik; (3) seminar diharapkan dapat membantu pemerintah masing-masing untuk menyusun perencanaan dan kebijaksanaan yang lebih sempurna; (4) tukar-menukar pengalaman yang dikembangkan secara teratur sangat besar artinya; (5) masalah kependudukan amat rumit

karena menyangkut banyak segi kehidupan dan masalah; (6) masing-masing negara ASEAN menghadapi masalah keanekaragaman kependudukan; (7) Indonesia mengendalikan pertumbuhan penduduk dengan menurunkan tingkat kelahiran dan kematian terutama bayi dan anak-anak; (8) pelaksanaan KB bukan merupakan pembatasan hak seseorang karena didasarkan atas kesadaran (*Kompas*, 29 Juni 1988).

Pada kesempatan itu, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS), Dr. Saleh Affif mengatakan bahwa: (1) pertumbuhan penduduk per tahun di negara-negara ASEAN dalam periode 1985-2000 akan mencapai 1,8%; (2) dalam jangka waktu 15 tahun mendatang penduduk ASEAN akan meningkat 89 juta jiwa, atau 288 juta jiwa pada tahun 1985 menjadi 377 juta jiwa pada tahun 2000; (3) pertumbuhan penduduk ASEAN pada tahun 2000 direncanakan hanya 1%; (4) memanfaatkan penduduk yang banyak sebagai asset nasional dalam pembangunan merupakan masalah yang pokok dan utama; (5) seminar ini merupakan salah satu sumbangan nyata dari ide Deklarasi Manila (*Antara*, 29 Juni 1988).

Mereka sepakat untuk mendesak: (1) semua organisasi internasional yang berkaitan dengan masalah kependudukan agar melanjutkan dukungannya terhadap program kependudukan ASEAN; (2) para pemimpin program kependudukan ASEAN (AHPP) agar mengambil langkah-langkah untuk menentukan negara donor dan badan-badan internasional yang tidak mempunyai hubungan formal dengan ASEAN; (3) lembaga-lembaga tinggi negara-negara ASEAN agar mengijinkan AHPP mengadakan pendekatan secara tidak resmi kepada masing-masing donor; (4) AHPP agar memprakarsai pembentukan suatu badan ahli untuk mempublikasikan keahlian yang menonjol di kawasan ASEAN. Selain itu, mereka juga mengeluarkan rekomendasi, antara lain: (1) perlu peningkatan pelayanan publikasi program kependudukan ASEAN; (2) mekanisme ASEAN yang kaku menghambat perundingan-perundingan untuk mencari dana dari badan-badan yang tidak memiliki hubungan formal dengan ASEAN; (3) komitmen dukungan negara donor dan badan internasional yang memiliki hubungan formal dengan ASEAN perlu ditinjau kembali (*Antara*, 1 Juli 1988).

2. Kerjasama Pemuda ASEAN

Menpora Akbar Tanjung berada di Singapura dan Malaysia tanggal 1-5 Juni 1988 untuk menghadiri peri-

ngatan Hari Belia Kebangsaan di Malaysia, dan memenuhi undangan Menteri Pembangunan Masyarakat Singapura Wong Kan Seng.

Seusai melapor kepada Presiden Soeharto di Bina Graha tanggal 21 Juni 1988, Menpora Akbar Tanjung mengatakan bahwa: (1) Indonesia, Malaysia dan Singapura telah menandatangani Memorandum of Understanding tentang kepemudaan untuk meningkatkan frekuensi kunjungan antara para pimpinan organisasi kepemudaan; (2) Presiden Soeharto meminta agar kerjasama kepemudaan untuk mewujudkan semangat ASEAN antara ketiga negara ASEAN itu diperluas hingga mencakup negara-negara ASEAN lainnya (*Antara*, 21 Juni 1988).

J. KERJASAMA EKONOMI DAN PERDAGANGAN

Ketua Lembaga Pengkajian, Penelitian dan Pengembangan Ekonomi (LP3E) Kadin Indonesia, Prof.-Dr. M. Sadli, mengatakan di Jakarta tanggal 3 Agustus 1988 bahwa: (1) peningkatan kerjasama ekonomi, perdagangan dan proyek investasi patungan antar negara anggota ASEAN masih lamban; (2) usaha-usaha untuk mempererat kerjasama dengan saling memberikan kemudahan terhambat oleh semangat proteksionisme yang lebih besar daripada kemauan membentuk masyarakat ekonomi regional dari masing-masing anggota; (3) pasaran bersama ASEAN belum saatnya dibentuk mengingat masih banyaknya perbedaan kepentingan nasional masing-masing anggota ASEAN; (4) proyeksi investasi swasta patungan ASEAN yang sudah disetujui belum dapat direalisasikan karena terbentur pada kepentingan nasional masing-masing; (5) tahap awal penyatuhan ASEAN bisa dimulai dengan pembebasan visa bagi warga ASEAN yang ingin berkunjung ke negara-negara anggota ASEAN (*Antara*, 3 Agustus 1988).

Ketua Eksekutif Panitia Kerja K-14 Paul Chan mengatakan kepada pers di Singapura tanggal 10 Mei 1988 bahwa: (1) pembentukan K-14 mencerminkan kesungguhan sektor swasta untuk mengkaji pelaksanaan semua hasil KTT ASEAN di Manila; (2) K-14 merupakan badan sementara yang dikendalikan oleh para pemangku jabatan kehormatan; (3) badan ini akan dijadikan sekretariat teknis untuk memperjuangkan masa depan ekonomi ASEAN; (4) ASEAN perlu meningkatkan kerjasama ekonomi untuk menghadapi persaingan perdagangan yang semakin sengit; (5) berbagai hambatan dan

ketidakpastian perdagangan internasional disebabkan oleh persaingan negara-negara maju (*Antara*, 11 Mei 1988).

K. SIDANG AFTEX KE-11 DI MANILA

Ketua Federasi Industri Tekstil Indonesia (FITI), Ir. H. Aminuddin, mengatakan kepada pers di Jakarta tanggal 1 Agustus 1988 bahwa: (1) FITI akan berusaha semaksimal mungkin untuk menyampaikan informasi secara luas tentang Indonesia, khususnya tentang pembangunan sandang; (2) AFTEX merupakan forum yang baik untuk bertukar pikiran dan pengalaman mengenai dunia pertekstilan; (3) informasi aktual berdasarkan fakta dan data terakhir perlu diberikan untuk menarik para investor; (4) iklim dunia usaha yang normal dan sehat masih menjadi dambaan kalangan bisnis; (5) segala bentuk mata rantai perpanjangan tangan departemen masih menghantui pengusaha; (6) iklim dunia usaha dan persaingan yang sehat tanpa menjurus ke arah liberalisme merupakan kunci keberhasilan; (7) realisasi pelaksanaan deregulasi dan debirokratisasi mungkin dapat mewujudkan iklim yang sehat (*Antara*, 1 Agustus 1988).

Sidang AFTEX ke-11 berlangsung di Manila tanggal 5-6 Agustus 1988 untuk membahas perkembangan industri tekstil negara anggota ASEAN. Hasil sidang yang ditandatangi oleh Donald G. Dee (Ketua AFTEX), dan ketua delegasi masing-masing negara yakni Ir. H. Aminuddin (Indonesia), Songkram Cheevaprawatdomrong (Muangthai), Lam Kam Wang (Malaysia), Cheng Wai Keuang (Singapura) dan Herminigildo Zayo (Filipina), mengatakan antara lain: (1) ASEAN prihatin terhadap berlanjutnya politik proteksionisme negara-negara maju, khususnya Amerika Serikat; (2) sebagai konsumen kapas yang besar, ASEAN akan berusaha meningkatkan bobotnya di forum Liverpool Cotton Association; (3) kontes desainer ASEAN merupakan promosi ekspor tekstil bersama di pasaran regional dan internasional; (4) ASEAN perlu menetapkan masa transisi untuk menghadapi berakhirnya Multi Fibre Agreement (MFA) tahun 1991, agar para pengusaha industri tekstil ASEAN dapat mengatur dan menyusun struktur operasinya; (5) ASEAN akan melakukan penelitian secara menyeluruh untuk memperoleh jatidiri masing-masing industri tekstil negara anggota ASEAN (*Antara*, 9 Agustus 1988).

Ketua Delegasi FITI, Ir. H. Aminuddin, mengatakan kepada pers di Jakarta tanggal 8 Agustus 1988

bahwa: (1) mandat dan tugas Kadin membuat delegasi FITI diterima sebagai peserta penuh. Hal ini merupakan angin segar dalam forum AFTEX; (2) komitmen-komitmen wakil Indonesia pada sidang-sidang AFTEX sebelumnya banyak yang tidak dipenuhi. Kini citra jelek Indonesia di forum ASEAN dapat diperbaiki; (3) FITI tidak membenarkan pernyataan API sebagai salah satu pendiri AFTEX berhak selamanya mewakili Indonesia di forum ini; (4) kedudukan API hanya sebagai asosiasi yang sejajar dengan anggota asosiasi FITI (*Antara*, 9 Agustus 1988).

L. PROYEK PATUNGAN ASEAN

Pada tanggal 4 Agustus 1988, Ketua Kadin Indonesia, Sukamdani Sahid Gitosardjono, mengatakan: (1) banyak usaha patungan swasta yang sudah disepakati belum dapat dilaksanakan karena kurangnya dukungan dari masing-masing pemerintah negara anggota ASEAN; (2) para pejabat pemerintah ASEAN tidak pernah menginformasikan hasil keputusan pertemuan para Menteri Ekonomi kepada dunia usaha; (3) masing-masing pemerintah ASEAN harus lebih terbuka untuk memperlancar peningkatan kerjasama perdagangan dan investasi antar swasta ASEAN; (5) keikutsertaan sektor swasta dalam pertemuan tingkat pemerintah ASEAN sangat penting untuk memperlancar peningkatan kerjasama ekonomi, perdagangan dan investasi intra ASEAN (*Antara*, 4 Agustus 1988).

M. KERJASAMA PERTANIAN DAN PETERNAKAN

Pertemuan Para Ahli Kesehatan Hewan ASEAN berlangsung di Jakarta tanggal 2-5 Agustus 1988 untuk membahas standardisasi vaksin hewan di negara ASEAN. Dirjen Peternakan drh. Soekaji mengatakan pada pembukaan pertemuan itu bahwa: (1) ASEAN kini perlu memiliki standar vaksin pemberantasan penyakit hewan; (2) standar ini memudahkan untuk mengendalikan dan mengatasi berjangkitnya penyakit hewan menular yang berbahaya (*Suara Karya*, 3 Agustus 1988).

III. HARI ULANG TAHUN KE-21 ASEAN

Sekretaris Jenderal Sekretariat ASEAN Roderick Yong mengatakan pada HUT ASEAN ke-21 ASEAN di

Jakarta tanggal 8 Agustus 1988 bahwa: (1) KTT ASEAN III di Manila memberikan arah baru bagi program-program kerjasama yang telah ada, seperti: (a) diubahnya Perjanjian Persahabatan dan Kerjasama di Asia Tenggara (*Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia*). Perubahan ini memungkinkan negara-negara Asia Tenggara lainnya dapat bergabung ke dalam ASEAN (*Analisa*, No. 4, 1988, hal. 256); (b) pembentukan kelompok kerja bidang politik untuk menangani masalah Kamboja, pengungsi, kawasan damai, bebas dan netral (ZOPFAN) dan kawasan bebas senjata nuklir (NWFZ); (2) dekade mendatang merupakan tantangan bagi ASEAN untuk mencapai kerjasama yang lebih kokoh guna mewujudkan tujuan-tujuannya; (3) perbaikan pengaturan preferensi perdagangan (Preferential Trading Arrangement atau PTA) dan program-program usaha patungan seperti ASEAN Industrial Joint Venture (AIJV) merupakan kemajuan yang dicapai di bidang ekonomi; (4) kerjasama fungsional ASEAN dipusatkan pada tiga masalah penting yakni peningkatan kesadaran mengenai ASEAN, perluasan keterlibatan dan partisipasi masyarakat ASEAN dalam berbagai bidang kerjasama serta pengembangan sumber daya manusia untuk meningkatkan pembangunan sosial ekonomi; (5) komite-komite ASEAN akan memusatkan diri pada program yang berorientasi pada kemajuan masyarakat, khususnya wanita dan pemuda; (6) pelaksanaan proyek-proyek merupakan usaha untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang ASEAN dan kekayaan budayanya (*Antara*, 8 Agustus 1988).

IV. HUBUNGAN ASEAN DENGAN MITRA MITRANYA

A. PERTEMUAN ASEAN DENGAN MITRA DIALOGNYA

Pertemuan ASEAN dengan mitra dialognya yang berlangsung di Bangkok tanggal 7-9 Juli 1988, dihadiri oleh Menlu AS, George Shultz, Menlu Australia, William Hayden, Menlu Jepang, Sosuke Uno, Menlu Kanada, Jos Clarke, Menlu Jerman Barat, Hans Dietrich Genscher, Menlu Selandia Baru, Russel Marshall, Menlu Spanyol, Francisco Fernandes Ordonez, Presiden Dewan Menteri Masyarakat Eropa/Deputi Menlu Yunani, Theodorus Pangalos, dan Ketua Komisi Masyarakat Eropa, Claude Cheyson serta delegasi ASEAN yang terdiri atas Menlu Malaysia, Abu Hassan Omar (selaku Ketua Delegasi), Menlu Indonesia, Ali Alatas,

Menlu Muangthai, Siddhi Savetsila, Menlu Singapura, Suppiah Dhanabalan, Menlu Brunei Darussalam, Mohammad Bolkiah, dan Menlu Filipina, Raul Manglapus (*Kompas*, 7 Juli 1988).

Menlu Siddhi Savetsila mengatakan pada pembukaan dialog bahwa: (1) pasaran negara mitra dialog agar terbuka bagi produk-produk ekspor ASEAN, yang selama ini sangat menentukan pertumbuhan dan stabilitas ASEAN; (2) apa pun kebijaksanaan ekonomi yang diambil oleh negara-negara industri jangan sampai merugikan ASEAN; (3) keputusan KTT Manila untuk memperbaiki usaha patungan industri ASEAN merupakan usaha untuk menarik penanaman modal ASEAN dan negara-negara non-ASEAN. Dengan demikian ASEAN diharapkan menjadi pasaran regional yang terpadu; (4) penyelesaian konflik Kamboja dapat dicapai melalui: (a) penarikan pasukan Vietnam dari Kamboja; (b) rekonsiliasi nasional; (c) pelaksanaan hak menentukan nasib sendiri rakyat Kamboja untuk membentuk negara yang merdeka, netral dan non-blok; (5) untuk mencegah berkuasanya kembali Khmer Merah, semua pihak yang berkepentingan atas masa depan Kamboja agar mendukung peranan Pangeran Norodom Sihanouk untuk menyelesaikan masalah Kamboja. Oleh karena itu ancaman yang dikhawatirkan negara-negara Barat dapat dinetralisasikan; (6) konferensi internasional merupakan strategi baru yang efektif untuk menanggulangi masalah pengungsi Indochina, yang penyelenggarannya diharapkan berlangsung awal tahun 1989 (*Antara*, 7 Juli 1988).

Pada acara yang sama Menlu George Shultz mengatakan bahwa: (1) kelompok kerja mengenai pengungsi Indochina perlu dibentuk sebelum konferensi internasional tentang pengungsi Indochina diselenggarakan; (2) kelompok kerja itu dapat menjajaki pendapat negara lain, menetapkan pandangan baru dan mengkaji kemungkinan keberhasilan penyelenggaraan konferensi internasional (*Antara*, 7 Juli 1988); (3) Hanoi agar menyetujui kebijaksanaan politik dan ekonomi ASEAN dan negara-negara pendukungnya mengenai pengungsi, yang memungkinkan pengungsi Indochina hidup produktif di negerinya sendiri; (4) tekanan diplomatik dan ekonomi terhadap Hanoi harus terus dilakukan oleh ASEAN dan pendukung-pendukungnya. Untuk ini ASEAN dapat mengandalkan kesetiaan AS; (5) dukungan terhadap Pangeran Norodom Sihanouk dan kelompok-kelompok perlawanan non-komunis sangat penting, karena mereka sebagai kunci penyelesaian masalah Kamboja; (6) meskipun usaha menyelesaikan konflik Kamboja mengalami kemajuan, ASEAN dan negara-negara pen-

dukungnya harus tetap waspada terhadap maksud-maksud Vietnam (*Antara*, 8 Juli 1988).

Menlu Sousuke Uno mengatakan bahwa: (1) Vietnam sebagai negara asal pengungsi agar mencegah keluarnya para pengungsi; (2) Jepang tetap ikut menanggulangi pengungsi Vietnam melalui program pemukiman, bantuan dana melalui PBB dan memberikan suaka (*Antara*, 7 Juli 1988); (3) Jepang akan membiayai segala kegiatan pasukan pemelihara perdamaian internasional, mengirim personil tim pemantau internasional bagi terselenggaranya pemilu di Kamboja dan membantu menyediakan berbagai kebutuhan material non-militer yang diperlukan; (4) ASEAN dan mitra dialognya agar membantu mengusahakan perdamaian di Kamboja melalui usaha: (a) penarikan seluruh pasukan Vietnam di bawah pengawasan internasional menurut jadwal yang telah ditetapkan; (b) pemulihan Kamboja yang non-blok, netral dan independen melalui pembentukan pemerintahan sementara yang disetujui kelompok-kelompok Kamboja yang bertikai, disusul pemilu yang bebas di bawah pengawasan internasional; (c) kerjasama internasional yang menjamin penyelesaian konflik Kamboja (*Antara*, 8 Juli 1988); (5) Jepang akan meningkatkan kerjasama ekonomi dan memperkuat sistem perdagangan bebas dengan negara-negara ASEAN. Peningkatan kerjasama ekonomi itu dilakukan antara lain dengan memperluas kuota Jepang atas impor barang-barang industri dan mineral dari ASEAN; (6) kerjasama ekonomi dengan ASEAN akan diprioritaskan; (7) Jepang juga akan meningkatkan kerjasama politik untuk membantu menciptakan perdamaian, kemakmuran dan stabilitas di kawasan Asia-Pasifik; (8) hubungan Jepang-ASEAN harus menjadi contoh hubungan kerjasama di antara negara-negara di kawasan Asia-Pasifik; (9) Jepang menolak untuk menjadi negara yang mempunyai kekuatan militer besar, meskipun Jepang sebagai negara industri kedua di dunia. Jepang tidak ingin menjadikan dirinya sebagai ancaman terhadap negara tetangga-tetangganya (*Antara*, 9 Juli 1988).

Pada kesempatan itu Menlu Abu Hassan Omar juga mengatakan bahwa: (1) ASEAN dan Jepang telah menandatangani Perjanjian Pelaksanaan Dana Pembangunan ASEAN-Jepang senilai US\$2 miliar; (2) sebagai negara yang memegang dominasi ekonomi dunia, Jepang agar mampu mengemudikan sistem perdagangan secara adil dan jujur; (3) komitmen Jepang untuk menghapuskan proteksionisme, membuka pasar bagi produk negara-negara berkembang, mengurangi tingkat fluktuasi kurs mata uang dan mengusahakan stabilitas

harga berbagai komoditi merupakan suatu tindakan yang penting sekali; (4) ASEAN percaya bahwa Jepang akan menangani masalah hutang dan suku bunga yang menjadi beban negara-negara ASEAN secara bijaksana; (5) Jepang diharapkan untuk memajukan industri berskala menengah dan kecil ASEAN (*Antara*, 9 Juli 1988).

Menlu Russel Marshall mengatakan bahwa: (1) Selandia Baru mempunyai pandangan yang sama dengan ASEAN mengenai upaya menyelesaikan masalah Kamboja; (2) Selandia Baru memahami sekali beban berat ASEAN untuk menampung pengungsi Indocina; (3) dukungan Selandia Baru terhadap kawasan bebas senjata nuklir di Pasifik Selatan merupakan pernyataan penting hak-hak negara kecil yang tidak berbeda dengan negara besar dalam masalah perlucutan senjata; (4) usaha memperkuat organisasi regional Pasifik Selatan terus diperjuangkan, agar suara negara-negara di kawasan itu lebih didengar di dunia internasional (*Antara*, 7 Juli 1988).

Menlu Ali Alatas mengemukakan perlunya keterlibatan pihak swasta dalam kerjasama industri ME dan ASEAN. Lebih lanjut Menlu Indonesia itu mengatakan bahwa: (1) pembentukan pasaran bersama ME tahun 1992, diharapkan tidak merugikan perdagangan ASEAN dengan ME; (2) stabilnya sistem moneter, serta adil dan terbukanya sistem perdagangan internasional akan menyeimbangkan pertumbuhan ekonomi dunia; (3) peranan GSP Masyarakat Eropa sangat penting untuk meningkatkan ekspor ASEAN ke ME; (4) ASEAN prihatin atas prosedur ME mengenai anti dumping investigation yang merugikan produk-produk negara-negara berkembang (*Antara*, 8 Juli 1988).

Dalam pertemuan itu, Para Menlu ASEAN dan Kanada telah menandatangani Memorandum of Understanding (MOU) mengenai program pasca panen ASEAN (*Antara*, 8 Juli 1988).

Menlu Kanada, Jos Clarke, mengatakan pada pertemuan tanggal 8 Juli 1988 bahwa: (1) bantuan Kanada untuk tahap kedua akan ditingkatkan menjadi US\$3,5 juta. Bantuan tahap pertama hanya US\$300 ribu; (2) perdagangan ASEAN-Kanada dalam tahun 1987 mencapai US\$1,9 miliar dan dalam tahun 1988 diharapkan meningkat menjadi US\$2 miliar (*Antara*, 8 Juli 1988).

Dalam pertemuan tanggal 9 Juli 1988, Para Menlu ASEAN dan Australia telah menandatangani Memorandum of Understanding (MOU) untuk meningkatkan

kerjasama ekonomi. Menlu Filipina selaku Wakil ASEAN, Raul Manglapus, mengatakan bahwa: (1) program kerjasama ekonomi ASEAN-Australia telah menge luarkan AS\$80 juta untuk membiayai 27 proyek, yang meliputi kerjasama ilmu pengetahuan dan teknologi, pangan dan pertanian, perdagangan dan pembangunan sosial; (3) Australia mendukung suatu program bantuan ekonomi multilateral untuk membangun perekonomian Filipina (*Antara*, 11 Juli 1988).

B. HUBUNGAN ASEAN-AUSTRALIA

Forum ASEAN-Australia ke-11 berlangsung di Manila tanggal 9 Juni 1988 untuk membahas tarif impor, proyek-proyek patungan, desentralisasi kebijaksanaan perdagangan Australia dan Program Kerjasama Ekonomi ASEAN-Australia (ASEAN-Australian Economic Cooperation Programme atau AAECP). Negara-negara ASEAN menyatakan keprihatinan atas situasi perdangannya dengan Australia yang sejak 1985 sampai 1987 terus menguntungkan Australia. Surplus perdagangan keseluruhan Australia dengan ASEAN sejak 1983 telah mencapai sekitar A\$6 miliar (*Antara*, 9 Juni 1988).

C. HUBUNGAN ASEAN-JEPANG

Delegasi Parlemen Jepang yang terdiri atas empat orang anggota, yakni: Hideo Watanabe, Fujinami, Therukisa Isiwatani dan Takashi Kataoka berada di Indonesia tanggal 30 April - 4 Mei 1988 untuk mengadakan pembicaraan dengan Presiden Soeharto mengenai pembentukan Lembaga Perdamaian Dunia dan konsep kerjasama ekonomi dan kebudayaan negara-negara Pasifik (*Antara*, 1 Mei 1988).

Fujinami mengatakan kepada pers setelah diterima Presiden Soeharto tanggal 2 Mei 1988 bahwa: (1) membengkaknya hutang Indonesia akibat apresiasi nilai dollar terhadap Yen merupakan tanggung jawab bersama Jepang dan Indonesia; (2) Parlemen Jepang dan Pemerintahan PM Takeshita selalu bekerjasama untuk mengatasi beban hutang negara-negara ASEAN (*Suara Pembaruan*, 2 Mei 1988).

Seorang anggota Komisi I DPR (bidang Hankam, Penerangan dan Luar Negeri), Theo Sambuaga mengatakan di Jakarta tanggal 4 Mei 1988 bahwa: (1) terhambatnya pembangunan ekonomi negara-negara ASEAN

akan mengakibatkan kerugian bagi pemasaran produk-produk Jepang dan suplai bahan mentah ASEAN. Oleh karena itu Jepang agar segera mewujudkan komitmenya untuk memberi bantuan US\$2 miliar kepada negara-negara ASEAN; (2) kunjungan Menlu Jepang, Souzuke Uno, ke Indonesia tanggal 5-8 Mei 1988 diharapkan dapat mengungkapkan sikap Jepang terhadap tekad ASEAN untuk mewujudkan ZOPFAN (*Antara*, 5 Mei 1988).

Dubes Jepang untuk Indonesia, Sumio Edamura, mengatakan di Jakarta tanggal 5 Mei 1988 bahwa kunjungan Menlu Jepang itu untuk meningkatkan dialog, yang diharapkan dapat membuka era baru hubungan Jepang-Indonesia (*Kompas*, 6 Mei 1988).

Menlu Jepang itu mengatakan setibanya di Jakarta tanggal 5 Mei 1988 bahwa: (1) Indonesia merupakan negara ASEAN pertama yang dikunjungi, karena peranannya yang sangat penting di antara negara-negara ASEAN lainnya; (2) Jepang sebagai sesama negara Asia-Pasifik tetap mendukung dan membantu ASEAN (*Antara*, 6 Mei 1988).

Menlu Malaysia, Abu Hassan Omar, mengatakan di Kuala Lumpur tanggal 30 Juni 1988 bahwa Jepang agar mengusahakan pengaruh apresiasi Yen tidak merugikan ASEAN dan negara-negara berkembang lainnya. Jepang perlu melakukan peninjauan kembali atas ketentuan atau persyaratan pinjaman yang menetapkan jumlah uang yang dipinjam dan uang yang harus dibayarkan kembali. Nilai Yen yang terus meningkat akan menghapuskan sifat pinjaman lunak Jepang (*Antara*, 1 Juli 1988).

Menurut PM Noboru Takeshita, dalam lima tahun mendatang ini Jepang akan meningkatkan bantuan Official Development Assistance (ODA) menjadi US\$50 miliar, dan ASEAN akan tetap mendapatkan 30%-nya, sekitar US\$15 miliar.

Jumlah ini merupakan peningkatan yang tajam dari periode 1982-1986 yang hanya mencapai US\$3,96 miliar.

Pada tanggal 4 Juli 1988, Wakil Dirjen Biro Asia Kementerian Luar Negeri Jepang, Haruhiko Shibuya, mengatakan bahwa: (1) Jepang berusaha memenuhi harapan ASEAN dengan meningkatkan investasi langsung perusahaan-perusahaan Jepang di negara-negara ASEAN; (2) perusahaan-perusahaan swasta Jepang akan didorong untuk meningkatkan investasi dalam industri yang berorientasi ekspor; (3) investasi Jepang ke

ASEAN terus meningkat, 1951-1978 mencapai US\$15.956 juta (11,5% dari seluruh investasi luar negeri Jepang), 1986 mencapai US\$856 juta dan 1987 mencapai US\$1.524 juta; (4) pembagian persentase investasi Jepang di negara-negara ASEAN adalah sebagai berikut, di Indonesia: 32,6%, di Malaysia: 21%, di Muangthai: 36,6%, di Singapura: 21,6% dan di Filipina: 16,1%; (5) Jepang sedang melaksanakan liberalisasi pasarnya bagi komoditi ekspor ASEAN; (6) ASEAN mengeluarkan tarif tinggi Jepang atas produksi ekspor mereka, seperti tarif kayu lapis keras Indonesia dan daging ayam bebas tulang Muangthai (*Pelita*, 5 Juli 1988).

D. HUBUNGAN ASEAN DENGAN MASYARAKAT EROPA

Pertemuan antara Para Menlu ASEAN dan ME berlangsung di Dusseldorf tanggal 2-3 Mei 1988 untuk membahas beberapa masalah yang berkaitan dengan politik, ekonomi dan keamanan.

Pada tanggal 1 Mei 1988, Menteri Negara Kementerian Luar Negeri Jerman Barat, Helmut Schaefer, mengatakan bahwa: (1) ASEAN merupakan mitra dialog utama dan terpenting bagi ME; (2) kegiatan ekonomi pasar dan perdagangan bebas antara ASEAN dan ME masih mungkin diperluas (*Antara*, 2 Mei 1988).

Menlu Indonesia selaku koordinator ASEAN, Ali Alatas SH, mengatakan pada pertemuan tanggal 2 Mei 1988 bahwa: (1) kerjasama industri ASEAN-ME harus melibatkan pihak swasta melalui pembentukan Dewan Bisnis ASEAN-ME dan program-program untuk menumbuhkan usaha bisnis kedua perhimpunan regional itu; (2) investasi asing mempunyai peranan penting bagi pembangunan negara-negara ASEAN; (3) untuk meningkatkan iklim investasi, di setiap ibukota negara-negara ASEAN telah dibentuk komite investasi bersama; (4) pertumbuhan ekonomi dunia akan berjalan bila negara-negara berkembang diberi kesempatan untuk memulihkan pembangunan ekonominya melalui: (a) alih teknologi; (b) kebebasan produk ekspor negara-negara berkembang untuk memasuki pasaran negara maju dan peningkatan kapasitas impornya (*Antara*, 3 Mei 1988).

Menlu Muangthai selaku Ketua Komite Tetap ASEAN, Siddhi Savetsila, mengatakan bahwa: (1) ME agar mendukung perjuangan Pangeran Norodom Sihanouk untuk menghadapi Vietnam; (2) nilai perdagangan antara ME dan ASEAN terus meningkat dan mengun-

tungkan kedua belah pihak; (3) ASEAN mengkhawatirkan kemungkinan ME untuk menerapkan proteksionisme seperti negara-negara maju lainnya (*Kompas*, 3 Mei 1988).

Menlu Jerman Barat, Hans Dietrich Genscher, mengatakan bahwa: (1) ME akan membuka pasaran bagi produk-produk jadi ASEAN; (2) sekitar 50% ekspor produk jadi ASEAN masih bisa ditingkatkan (*Kompas*, 3 Mei 1988).

Komisioner ME, Claudio Cheyson mengatakan bahwa pada tahun 1987 ME mengalami surplus jutaan dollar dalam perdagangannya dengan ASEAN (*Kompas*, 3 Mei 1988).

Menlu Itali, Giulio Andreotti, mengatakan bahwa: (1) dana untuk penanggulangan narkotika yang berasal dari ASEAN, Badan Penanggulangan Narkotika AS dan Organisasi Pengawasan Narkotika Internasional perlu disatukan (*Antara*, 4 Mei 1988).

Pernyataan bersama ASEAN-ME tanggal 3 Mei 1988 adalah sebagai berikut: (1) ME menghargai usaha ASEAN untuk membantu menyelesaikan masalah Kamboja, termasuk penyelenggaraan JIM antara pihak-pihak yang terlibat langsung; (2) ASEAN mengakui bahwa GSP ME telah membantu perluasan ekspor barang-barang jadi ASEAN; (3) ME bersedia memperbaiki kembali rancangan GSP; (4) ASEAN menganggap pemeliharaan dan perluasan kesempatan pemasaran kayu tropis di negara-negara ME sangat penting; (5) ASEAN dan ME prihatin atas ketidakadilan harga-harga komoditi dan pendapatan ekspor negara-negara berkembang. Oleh karena itu ME dan ASEAN menginginkan terselenggaranya kerjasama internasional untuk secara efektif menanggulangi masalah komoditi melalui forum-forum bilateral maupun multilateral. Dengan demikian negara-negara ASEAN dapat menemukan cara untuk menciptakan pertumbuhan, diversifikasi dan perluasan perdagangan komoditi; (6) ASEAN dan ME sepakat untuk mendorong partisipasi pihak swasta untuk memperbaiki hubungan ekonomi dan perdagangan kedua belah pihak; (7) ASEAN dan ME menyambut baik usaha untuk membentuk *Joint Investment Committee (JIC)* di setiap ibukota negara-negara ASEAN dan perlunya penunjukan sebuah Konsultan Investasi Eropa; (8) ASEAN mengakui bahwa ME merupakan sumber bantuan kedua terpenting bagi pembangunannya; (9) ASEAN dan ME puas atas kerjasama mereka dalam bidang pengembangan sumber daya manusia, yang telah menghasilkan berbagai pertukaran dan kon-

tak antara para pejabat dan para pengusaha kedua belah pihak; (10) ASEAN menghargai bantuan ME untuk membentuk Pusat Latihan dan Riset Manajemen Energi ASEAN-ME di Brunei Darussalam; (11) untuk menciptakan situasi perekonomian internasional yang sehat perlu pengembangan dan penerapan kebijakan yang diarahkan pada intensifikasi, termasuk perbaikan ketidakseimbangan perdagangan moneter (*Suara Karya*, 4 Mei 1988).

V. PERTEMUAN INFORMAL JAKARTA

A. PERSIAPAN-PERSIAPAN

Dalam rangka membantu mengakhiri pertikaian bersenjata dan mencapai perdamaian di Kamboja (Kampuchea) dilangsungkanlah Pertemuan Informal Jakarta atau yang lebih dikenal dengan sebutan Jakarta Informal Meeting (JIM). JIM yang berlangsung di Bogor tanggal 25-28 Juli 1988 itu dibagi menjadi dua tahap. Tahap pertama dihadiri oleh para wakil empat kelompok Kamboja yang bertikai, yakni Khmer Merah yang dipimpin oleh Khieu Samphan, Front Pembebasan Nasional Rakyat Kamboja atau Khmer People's National Liberation Front (KPNLF) yang dipimpin oleh Son Sann, Kelompok Funcinpec atau loyalis yang pro Pangeran Norodom Sihanouk, yang dipimpin oleh putera Pangeran Sihanouk, Pangeran Norodom Ranariddh, yang ketiganya tergabung dalam Pemerintahan Koalisi Demokratik Kamboja atau Coalition Government of Democratic Kamboja (CGDK), dan Pemerintah Republik Kamboja (PRK) atau People's Republic of Cambodia yang dipimpin oleh PM Hun Sen. Pada tahap kedua, selain dihadiri oleh para wakil empat kelompok Kamboja itu, JIM dihadiri pula oleh Menlu Vietnam, Nguyen Co Thach, pejabat Menlu Laos, Thongsavath Khaikhampithoune serta para wakil ASEAN, yang terdiri atas Menlu Ali Alatas, Menlu Malaysia, Abu Hassan Omar, Sekretaris Deplu Muangthai, Kasem S. Kasemsri, Pembantu Menlu Filipina, Manuel T. Yan, Menlu Singapura, Suppiah Dhabanalan dan Menlu Brunei Darussalam, Mohammed Bolkiah.

Khmer Merah merupakan kelompok yang memiliki kekuatan militer terkuat, yang dahulu dipimpin oleh Pol Pot. Khmer Merah berkuasa di Kamboja tahun 1975-1978. Rezim ini dianggap yang bertanggungjawab atas pembunuhan sekitar dua juta penduduk Kamboja selama mereka berkuasa (*Antara*, 26 Juli 1988). Pembu-

nuhan inilah yang menjadi salah satu sebab masuknya tentara Vietnam ke Kamboja untuk menjatuhkan rezim Pol Pot.

Funcinpec atau kelompok loyalis mengklaim mempunyai 17.000 orang anggota.

KPNLF merupakan kelompok terkecil di Kamboja. Kelompok ini dikenal sebagai kelompok konservatif nasionalis atau Khmer Biru.

PRK yang didukung sekitar 150.000 tentara Vietnam merupakan rezim yang menggulingkan pemerintahan Khmer Merah di bawah pimpinan Pol Pot. PRK de facto berkuasa di Kamboja sekarang ini dan dianggap oleh sebagian rakyat Kamboja sebagai pembebas rakyat dari kekejaman rezim Pol Pot.

JIM merupakan pertemuan yang pertama kali bagi semua kelompok Kamboja yang bertikai. Penyelenggaraan JIM ini didasarkan pada Kesepakatan Ho Chi Minh City yang disepakati oleh Menlu Indonesia waktu itu, Mochtar Kusumaatmadja, dan Menlu Vietnam, Nguyen Co Thach, tanggal 29 Juli 1987. Kesepakatan itu mengatakan antara lain bahwa: (1) Vietnam menyetujui rencana pertemuan informal atau Cocktail Party antara kelompok-kelompok Kamboja yang bertikai; (2) pertemuan informal itu akan diselenggarakan atas dasar persamaan kedudukan antara kelompok-kelompok yang bertikai itu tanpa prasyarat-prasyarat (no preconditions) dan embel-embel politik (no political labels); (3) pertemuan dibagi menjadi dua tahap. Tahap pertama hanya dihadiri oleh para wakil kelompok di Kamboja yang bertikai dan pada pertemuan selanjutnya, Indonesia juga akan mengundang negara-negara lain yang terlibat dalam pertikaian bersenjata di Kamboja itu, termasuk Vietnam (*Kompas*, 31 Juli 1987). Indonesia juga menawarkan diri sebagai tuan rumah cocktail party tersebut (*Suara Karya*, 31 Juli 1987). Sesuai dengan Kesepakatan Ho Chi Minh City, Vietnam akan menyampaikan rencana cocktail party itu kepada pemerintah Heng Samrin, dan Menlu Muangthai, Siddhi Savetsila, sebagai Ketua Panitia Tetap ASEAN, akan menyampaikannya kepada CGDK. (*Suara Karya*, 31 Juli 1988).

Laos, Kamboja dan Vietnam bersedia menghadiri cocktail party. Kesediaan itu diperkuat dengan keputusan Pertemuan Para Wakil Menlu Vietnam, Laos dan PRK yang berlangsung di Phnom Penh tanggal 13 Agustus 1987.

Menlu Mochtar Kusumaatmadja mengatakan di Jakarta tanggal 30 Juli 1987 bahwa Indonesia dan Viet-

nam hanya memberi kondisi untuk mempersiapkan suatu penyelesaian di Kamboja, tetapi penyelesaiannya itu tergantung dari pihak-pihak yang bersengketa di Kamboja sendiri (*Suara Karya*, 31 Juli 1987).

Para Menlu ASEAN mengadakan pertemuan tidak resmi di Bangkok tanggal 16 Agustus 1987 untuk membahas rencana cocktail party. Mereka menyambut gembira rencana cocktail party itu dan minta kepada Vietnam untuk segera hadir setelah diskusi dimulai (*Antara*, 21 Agustus 1987). Di samping itu usul delapan pasal Pangeran Norodom Sihanouk di Beijing, Maret 1986 perlu dijadikan dasar cocktail party (*Kompas*, 21 Agustus 1987).

Penekanan kata segera hadir dan pencantuman usul delapan pasal Pangeran Norodom Sihanouk mendapat reaksi dari Vietnam, yang menyatakan penolakannya atas cocktail party rumusan ASEAN. Vietnam, Laos dan PRK ingin tetap berpegang pada rumusan Kesepakatan Ho Chi Minh City (*Antara*, 21 Agustus 1987).

Para Menlu ASEAN mengadakan pertemuan di Bangkok tanggal 4-5 Juli 1988 untuk membahas rencana penyelenggaraan cocktail party yang akan berlangsung di Jakarta tanggal 25 Juli 1988. Komunike para Menlu ASEAN tentang penyelesaian masalah Kamboja mengatakan antara lain bahwa: (1) menghargai kerja keras bekas Menlu Mochtar Kusumaatmadja selaku interlocutor ASEAN untuk merintis dan meletakkan dasar yang memungkinkan terselenggaranya JIM; (2) mendukung secara penuh penyelenggaraan JIM yang akan datang; (3) menilai bahwa pertemuan informal itu merupakan saat yang menentukan untuk menyelesaikan konflik Kamboja; (4) tidak tercapainya terobosan baru dalam penyelesaian masalah Kamboja, seperti yang diadakan antara Pangeran Norodom Sihanouk dan PM Hun Senn di Paris bulan Desember 1987 dan Januari 1988, menempatkan JIM sebagai forum yang penting artinya. JIM merupakan peluang nyata untuk mencari penyelesaian politik secara menyeluruh mengenai masalah Kamboja (*Kompas*, 6 Juli 1988). Di samping itu Menlu Ali Alatas menyatakan bahwa: (1) Indonesia, sebagai tuan rumah menjamin JIM dilaksanakan berdasarkan kesepakatan Ho Chi Minh City tanggal 29 Juli 1987 dan mengharapkan keempat kelompok Kamboja dan Vietnam hadir dalam JIM; (2) JIM dibagi dua tahap. Tahap pertama, hanya dihadiri oleh keempat kelompok Kamboja dan tahap kedua, selain dihadiri oleh keempat kelompok Kamboja itu, dihadiri pula oleh

wakil pihak yang berkepentingan seperti Vietnam, Laos dan ASEAN (*Kompas*, 9 Juli 1988).

B. PERSIDANGAN-PERSIDANGAN

Pertemuan tahap pertama tanggal 25 Juli 1988 dibuka oleh Menlu Ali Alatas. Menlu Ali Alatas mengatakan kepada para wartawan sesudah membuka pertemuan itu bahwa: (1) para peserta JIM diminta untuk memisahkan butir-butir pokok (essential ingredients) yang menjadi unsur-unsur dalam suatu penyelesaian dengan cara (modalities) untuk mewujudkan butir-butir itu. Secara umum terdapat penyesuaian pandangan mengenai butir-butir pokok itu, tetapi masih terdapat perbedaan yang tajam mengenai cara-cara mewujudkannya; (2) butir-butir pokok itu antara lain: (a) penarikan mundur pasukan asing dari Kamboja; (b) pembentukan pemerintahan sementara yang terdiri atas para wakil empat kelompok Kamboja untuk mengatur penyelenggaraan pemilihan umum; (c) pembentukan badan internasional untuk mengawasi proses pemilihan umum dan penarikan pasukan asing itu; (d) pembentukan pemerintahan Kamboja yang independen, netral dan nonblok, yang bebas ancaman dari mana pun, yang sebaliknya tidak pula menjadi ancaman bagi negara-negara tetangganya. Kamboja yang seperti itu berada di bawah pemerintahan yang dipilih secara bebas oleh rakyat Kamboja; (f) jaminan negara-negara adikuasa bagi tercapainya penyelesaian Kamboja secara damai oleh semua pihak yang terlibat melalui suatu konperensi internasional. Di samping itu, Menlu Ali Alatas mengatakan bahwa masalah Kamboja terlalu kompleks oleh sebab itu tidak dapat diselesaikan hanya dalam satu pertemuan. Tetapi tanpa dimulainya dialog dan perundingan untuk mengantikan konflik dan konfrontasi militer, penyelesaian secara menyeluruh di Kamboja sulit tercapai (*Kompas*, 26 Juli 1988).

Dalam pertemuan tahap pertama tanggal 25 Juli 1988 itu, PM Hun Senn mengajukan usul tujuh pasal yang intinya menolak usul pembubaran rezim Kamboja mana pun, dan sebaliknya mengusulkan status quo politisi dan militer sampai terbentuk suatu pemerintahan baru melalui pemilihan umum. Ketujuh pasal usul itu adalah sebagai berikut: (1) pembentukan Kamboja yang damai, independen, demokratik, berdaulat, netral dan nonblok; (2) penarikan semua pasukan Vietnam dari Kamboja pada bulan Desember 1989, atau selambat-lambatnya triwulan pertama tahun 1990. Penarikan ini bersamaan waktunya dengan berakhirnya semua ban-

tuan asing dan peniadaan wilayah perlindungan (sanctuary) bagi kaum pengikut Pol Pot dan pasukan perlawanan lainnya. Ditegaskan pula mengenai larangan memanfaatkan pengungsi untuk menyerang rakyat Kamboja, serta penghentian campur tangan asing atas urusan dalam negeri Kamboja; (3) masalah dalam negeri Kamboja harus diselesaikan sendiri oleh kelompok-kelompok Kamboja atas dasar rekonsiliasi nasional, penyejaman pemimpin rezim Pol Pot yang bertanggungjawab atas banyaknya kejahatan serta penolakan pengakuan terhadap pasukan bersenjata Khmer Merah; (4) pembentukan status quo di Kamboja sampai selesainya pemilihan para anggota Majelis Nasional Kamboja, yang kemudian akan mensahkan konstitusi baru dan membentuk suatu pemerintahan koalisi; (5) pembentukan Dewan Rekonsiliasi Nasional yang terdiri atas para wakil keempat kelompok di Kamboja, yang diketuai oleh Pangeran Norodom Sihanouk. Dewan ini bertugas antara lain untuk melaksanakan semua persetujuan yang telah dicapai antara berbagai kelompok di Kamboja dan menyelenggarakan pemilihan umum untuk Majelis Nasional; (6) pembentukan Komisi Pengawas Internasional untuk mengawasi pelaksanaan semua persetujuan; (7) penyelenggaraan suatu konferensi internasional yang dihadiri oleh Kamboja, Vietnam, Laos, semua negara ASEAN, Ketua KTT Nonblok ke-6, ke-7 dan ke-8, Uni Soviet, RRC, Inggris, Perancis, AS, Sekjen PBB dan semua negara yang telah menyumbang tercapainya perdamaian di Kamboja dan Asia Tenggara, untuk menjamin kemerdekaan, kedaulatan dan netralitas Kamboja yang nonblok serta perdamaian dan stabilitas Asia Tenggara (*Kompas*, 26 Juli 1988). PM Hun Senn secara tegas mengatakan pula kepada para wartawan bahwa RRC-lah yang memberi bantuan keuangan dan militer kepada gerakan perlawanan di Kamboja, yang disalurkan lewat Muangthai (*Kompas*, 26 Juli 1988).

Pada pertemuan tahap kedua tanggal 25 Juli 1988, para wakil keempat kelompok di Kamboja, ASEAN, Vietnam dan Laos berhasil berbicara satu sama lainnya secara langsung mengenai prinsip-prinsip untuk menyelesaikan masalah Kamboja. Di samping itu, keempat kelompok Kamboja itu berhasil pula menyepakati empat masalah pokok mengenai tujuan pembicaraan mereka, yakni: (1) untuk segera mengakhiri konflik Kamboja; (2) untuk segera mengakhiri penderitaan rakyat Kamboja; (3) menyadari bahwa merupakan hal yang penting dan telah tiba waktunya bagi mereka untuk menyelesaikan masalah Kamboja melalui cara-cara politik; (4) secara prinsip Kamboja nantinya adalah in-

dependen, netral dan nonblok (*Kompas*, 26 Juli 1988).

Keempat kelompok ini juga menyepakati usul Pangeran Ranariddh untuk bersama-sama menghadap Pangeran Norodom Sihanouk, yang telah tiba di Indonesia untuk memenuhi undangan pribadi Presiden Soeharto.

Sementara itu, Menlu Nguyen Co Thach mengatakan bahwa: (1) penyelesaian masalah Kamboja harus berhubungan erat dengan penciptaan perdamaian abadi di Asia Tenggara, yang sekaligus juga sebagai usaha untuk membentuk mekanisme pemecahan perselisihan di antara negara-negara Asia Tenggara secara damai; (2) setiap orang menyadari eratnya hubungan antara masalah Kamboja dan perdamaian di Asia Tenggara, meskipun pendekatan terhadap masalah itu berbeda-beda. Selama 10 tahun terakhir ini, muncul tiga macam pendekatan yang berbeda, yakni: (a) penyelesaian masalah Kamboja merupakan prasyarat pembentukan zona damai di Asia Tenggara; (b) pembentukan zona damai di Asia Tenggara merupakan langkah awal untuk menciptakan suasana yang diperlukan untuk menyelesaikan masalah Kamboja; (c) mengusahakan penyelesaian masalah Kamboja sejajar dengan pembentukan zona damai di Asia Tenggara; (3) Vietnam mengusulkan agar pembentukan zona damai di Asia Tenggara harus diciptakan untuk menyelesaikan masalah Kamboja, karena penyelesaian masalah Kamboja sebagai prasyarat terciptanya zona damai di Asia Tenggara ternyata sampai dewasa ini belum menunjukkan hasil yang nyata (*Kompas*, 26 Juli 1988); (4) kegagalan menyelesaikan masalah Kamboja disebabkan antara lain oleh penonjolan kepentingan pribadi, misalnya hanya menuntut penarikan mundur semua tentara Vietnam dari Kamboja tanpa memperhatikan kepentingan rakyat Kamboja dan tunutan lain; (5) setiap penyelesaian masalah Kamboja tidak akan diterima oleh rakyat Kamboja maupun dunia, bila tidak dibarengi dengan pembubaran rezim Pol Pot. Sampai dewasa ini tindakan kriminal berdarah rezim Pol Pot masih menghantui rakyat Kamboja (*Antara*, 26 Juli 1988).

Selama ini ASEAN menentang usul Vietnam tersebut. ASEAN berpendapat bahwa penyelesaian masalah Kamboja merupakan prasyarat untuk membentuk zona damai, bebas dan netral di kawasan Asia Tenggara.

Pemimpin KPNLF Son Sann mengatakan bahwa: (1) KPNLF dan rakyat Kamboja ingin hidup berdampingan secara damai dengan rakyat Vietnam; (2) penarikan secara menyeluruh pasukan Vietnam dari Kambo-

ja akan mempercepat rujuk nasional antara kelompok-kelompok Kamboja yang bertikai; (3) penarikan mundur pasukan Vietnam itu akan memberikan kesempatan pula kepada para pemimpin dan rakyat Vietnam untuk memecahkan berbagai kesulitan ekonomi, sosial dan politik yang dihadapi selama ini (*Antara*, 26 Juli 1988).

Keberhasilan pertemuan hari pertama memperlancar pertemuan hari kedua. Pada tanggal 26 Juli 1988, JIM mulai mendiskusikan materi-materi yang dipandang dapat membantu menyelesaikan masalah Kamboja dan kaitannya dengan situasi kawasan Asia Tenggara, seperti penarikan mundur pasukan Vietnam dari Kamboja dan mencegah kembalinya rezim Pol Pot, jadwal waktu penarikan mundur pasukan Vietnam, perlu tidaknya gencatan senjata dan penghentian permusuhan di antara mereka.

Menlu Ali Alatas mengatakan kepada para wartawan bahwa pada prinsipnya semua pihak yang terlibat dalam konflik Kamboja mulai menunjukkan tanda-tanda yang mengarah kepada kesatuan pandangan atas berbagai aspek yang muncul dalam penyelesaian masalah Kamboja, misalnya: (1) penarikan mundur pasukan asing dari Kamboja dan kepastian tidak berkuasanya kembali rezim Pol Pot di negara itu; (2) pembentukan pemerintahan transisi yang terdiri atas para wakil empat kelompok di Kamboja (*Kompas*, 27 Juli 1988).

Sementara itu, selain menegaskan kembali usul-usul PM Hun Senn, Menlu Nguyen Co Thach mengatakan bahwa: (1) semua pihak menyetujui bahwa penarikan mundur pasukan Vietnam dari Kamboja merupakan bagian integral untuk menyelesaikan masalah di negara itu, bahkan pihak Khmer Merah tidak menolak untuk membahas penarikan pasukan Vietnam dan pencegahan berkuasanya kembali rezim Pol Pot sebagai dua masalah yang menentukan penyelesaian Kamboja; (2) dia belum dapat menyatakan persetujuannya mengenai perlunya dibentuk pasukan perdamaian internasional, karena contoh pembentukan pasukan perdamaian di Kongo dan Libanon justru merusak perdamaian (*trouble making force*) dan tidak menjaga perdamaian. Pasukan semacam itu akan menciptakan Kamboja sebagai Libanon di Asia Tenggara (*Antara*, 27 Juli 1988).

Pejabat Menlu Laos, Thongsavath Khaikhampi-thoune mengatakan bahwa usaha penyelesaian masalah Kamboja berkaitan erat dengan usaha untuk menjadikan Asia Tenggara sebagai kawasan bebas, stabil dan bersahabat. Untuk menjadikan kawasan Asia Tenggara

yang seperti itu, Laos mengajukan usul tujuh prinsip, sebagai berikut: (1) Asia Tenggara harus dibangun menjadi kawasan yang bebas, damai, netral, tanpa senjata nuklir, bersahabat dan bekerjasama untuk menyumbangkan perdamaian dan pembangunan dunia; (2) terdapat sikap saling menghormati masing-masing keadautan, kemerdekaan, integritas wilayah dan rezim politik serta non-agresi di kawasan Asia Tenggara; (3) negara-negara Asia Tenggara tidak menciptakan atau terlibat dalam aliansi militer, baik dengan negara-negara di dalam atau di luar kawasan Asia Tenggara untuk menentang satu sama lain, dan tidak menggunakan wilayah satu negara atau mengijinkan negaranya untuk dijadikan alat untuk memusuhi negara lain; (4) setiap konflik di Asia Tenggara diselesaikan secara damai sesuai dengan Piagam PBB; (5) kerjasama antara negara-negara di Asia Tenggara di berbagai sektor, seperti ekonomi, sosial dan budaya perlu ditingkatkan untuk pembangunan kawasan; (6) untuk menjamin tercapainya prinsip-prinsip itu; para Menlu negara-negara Asia Tenggara perlu mengadakan pertemuan dan konsultasi tahunan; (7) setiap negara di Asia Tenggara dapat bekerjasama atau meminta bantuan tidak mengikat dari luar atau organisasi internasional (*Suara Karya*, 27 Juli 1988).

Pada pertemuan hari kedua itu, Son Sann mengajukan usul empat pasal untuk mencapai perdamaian di Kamboja, sebagai berikut: (1) perlunya mengakhiri penderitaan rakyat Kamboja; (2) pengakuan rakyat Kamboja untuk menentukan nasib sendiri; (3) perlunya dibentuk satu Kamboja yang bebas, netral dan non-blok; (4) perlunya dibentuk pemerintahan baru di Kamboja yang terdiri atas para wakil empat kelompok di Kamboja (*Kompas*, 27 Juli 1988).

Menlu Suppiah Dhanabalan mengatakan antara lain bahwa: (1) penarikan mundur pasukan Vietnam dari Kamboja merupakan kunci untuk menyelesaikan masalah Kamboja. Masalah ini harus merupakan bagian dari penyelesaian politik atas masalah Kamboja; (2) sejak semula ASEAN menentang invasi Vietnam ke Kamboja. Sikap ini diambil bukan untuk mengembalikan kekuasaan rezim Pol Pot, melainkan untuk mengembalikan kemerdekaan, keadautan dan hak rakyat Kamboja untuk menentukan nasibnya sendiri; (3) ASEAN mengharapkan kepada pihak-pihak yang berkepentingan dan masyarakat internasional agar mengambil langkah-langkah untuk menghindarkan salah satu kelompok mengambil-alih kekuasaan menyusul penarikan mundur pasukan Vietnam itu; (4) persoalan rezim Pol

Pot perlu dikaitkan dengan aspek internal dan eksternal. Hadirnya beberapa pihak tertentu dalam JIM ini mengisyaratkan mereka tentang fenomena Pol Pot dan Khmer Merah yang bukan merupakan kejadian yang berdiri sendiri dalam sejarah Kamboja; (5) mengingat munculnya dua kelompok Kamboja yang dahulu berasal pula dari gerakan revolusioner yang dipimpin Pol Pot dan hadirnya pihak non-Kamboja yang membantu Khmer Merah merebut kekuasaan di Kamboja, diharapkan semua pihak untuk tidak mengajukan permintaan-permintaan, tetapi sebaliknya ikut mencari pemecahan-pemecahan, baik internal maupun eksternal, sehingga sejarah Kamboja tidak terulang lagi (*Kompas*, 27 Juli 1988). Atas dasar itu semua, Menlu Suppiah Dhanabalan mengajukan usul enam langkah untuk menyelesaikan masalah Kamboja, sebagai berikut: (1) mengidentifikasi anggota-anggota Pol Pot yang benar-benar tidak diijinkan kembali ke Kamboja; (2) mengusahakan kerujukan (rekonsiliasi) di antara empat kelompok Kamboja yang bertikai, serta membentuk pemerintahan sementara yang terdiri atas para wakil empat kelompok di Kamboja itu di bawah pimpinan Pangeran Norodom Sihanouk; (3) menjamin terhindarnya dominasi satu kelompok terhadap kelompok yang lain melalui checks and balances, termasuk jaminan internasional; (4) mengusahakan terintegrasiya kekuatan-kekuatan militer di Kamboja secara seimbang, yang didahului dengan pembubaran angkatan-angkatan bersenjata dari kelompok-kelompok Kamboja itu; (5) menerima pengawas internasional atau pasukan pemelihara perdamaian, yang anggota-anggotanya harus disetujui oleh semua kelompok di Kamboja; (6) pemilihan umum yang diawasi oleh badan internasional (*Antara*, 27 Juli 1988).

Ketua Delegasi Muangthai, Kasem S. Kasemsri mengatakan pada pertemuan tahap kedua tanggal 26 Juli 1988 bahwa: (1) rakyat Kamboja agar diberikan kebebasan sepenuhnya untuk menentukan nasibnya sendiri; (2) harus diusahakan mekanisme atau pengaturan yang efektif untuk menjamin tidak terulangnya lagi perrusuhan di Kamboja setelah penarikan mundur pasukan asing dari negara itu. Pengaturan itu dapat berbentuk Pasukan Pemelihara Perdamaian Internasional (IPKF) atau Badan Pengawas Internasional (IOC). Dengan demikian dapat diketahui titik-titik temu yang dapat dicapai ataupun perbedaan-perbedaan yang masih besar. Hal ini sangat berguna untuk membantu mengusahakan perdamaian yang adil di Kamboja; (3) penyelesaian politik atas masalah Kamboja harus segera tercapai, karena akan sangat berarti bagi tercapainya

perdamaian dan stabilitas di Kamboja. Cepatnya penyelesaian masalah Kamboja sangat berguna untuk menghilangkan penderitaan rakyat di negara itu maupun untuk mencapai perdamaian, stabilitas dan kemakmuran di kawasan Asia Tenggara (*Antara*, 27 Juli 1988).

Pada tanggal 27 Juli 1988, para pemimpin empat kelompok Kamboja itu mengadakan kunjungan kehormatan kepada Presiden Soeharto, serta mengadakan pertemuan dengan Pangeran Norodom Sihanouk di Wisma Negara, Jakarta. Dalam pertemuan itu, Pangeran Norodom Sihanouk mengajukan usul lima pasal untuk menyelesaikan masalah Kamboja, sebagai berikut: (1) nama negara mereka adalah Kampuchea (bahasa Khmer), Cambodge (bahasa Perancis) atau Cambodia (bahasa Inggris), dengan bendera dan lagu kebangsaan baru akan dikarang oleh para wakil keempat kelompok Kamboja. Nama negara yang demikian ini diharapkan dapat mempersatukan tujuh juta rakyat Kamboja, baik mereka yang berasal dari golongan ningrat, republikan, komunis, nasionalis, anti komunis, kanan, tengah, kiri, kapitalis maupun sosialis; (2) pembentukan pemerintahan yang terdiri atas wakil-wakil empat kelompok di Kamboja, dengan tiap-tiap kementerian, termasuk luar negeri dan pertahanan nasional, dibagi sama antara keempat kelompok dan terdiri atas empat menteri bersama, sehingga terdapat sistem persaudaraan yang terbagi sempurna (*Suara Pembaruan*, 27 Juli 1988); (3) pembentukan tentara nasional Kampuchea yang terdiri atas keempat angkatan bersenjata dari kelompok-kelompok di Kamboja itu dengan empat Kepala Staf Umum (*Antara*, 28 Juli 1988); (4) pembentukan pemerintahan nasional bersamaan dengan dilakukannya perubahan administrasi nasional secara bertahap, dari sistem satu partai ke ketatalaksanaan empat partai; (5) penyelenggaraan konferensi internasional tentang Kampuchea di bawah naungan Sekjen PBB, Javier Perez de Cuellar dan bukan di bawah naungan PBB. Konferensi ini akan menjamin netralitas Kampuchea dan mengirimkan Komisi Pengawas Internasional (IOC) yang para anggotanya dipilih oleh para peserta konferensi. IOC bertugas mengawasi penarikan mundur pasukan Vietnam dari Kampuchea dan membantu pemerintah empat kelompok Kamboja menjaga dan menjamin keamanan rakyat serta mengawasi pemilihan umum di Kampuchea (*Antara*, 28 Juli 1988).

Seusai pertemuan 27 Juli 1988, Menlu Nguyen Co Thach mengatakan bahwa para peserta JIM, baik yang terlibat langsung maupun yang hanya berkepentingan dalam masalah Kamboja itu, menyadari terdapatnya

hal-hal yang dapat maupun yang tidak dapat disepakati. Yang dapat disepakati adalah prinsip-prinsip umum untuk menyelesaikan masalah Kamboja, seperti: (1) masalah Kamboja harus diselesaikan melalui penyelesaian politik; (2) penyelesaian masalah Kamboja berkaitan dengan pembentukan zona damai, bebas dan netral (ZOPFAN) di Asia Tenggara; (3) terdapat dua masalah pokok dalam penyelesaian Kamboja, yakni penarikan mundur pasukan Vietnam dari Kamboja dan pencegahan kembalinya rezim Pol Pot; (4) pembentukan suatu pemerintahan rekonsiliasi nasional dan suatu badan pengawas internasional di Kamboja; (5) diselenggarakannya Konferensi Internasional untuk membahas penyelesaian masalah Kamboja dan perdamaian di Asia Tenggara (*Kompas*, 28 Juli 1988). Sedangkan beberapa masalah yang tidak dapat disepakati antara lain: (1) bagaimana langkah-langkah yang harus ditempuh untuk mencegah berkuasanya kembali rezim Pol Pot; (2) bagaimana bentuk rekonsiliasi nasional dan badan pengawas internasional yang diinginkan; (3) siapa yang hadir; kapan dan di mana Konferensi Internasional tentang Kamboja diselenggarakan (*Kompas*, 28 Juli 1988).

Sementara itu dalam keterangan pers terpisah, pemimpin KPNLF Son Sann mengatakan bahwa: (1) pihaknya mendukung perlunya pembentukan tiga badan internasional sebagai kelanjutan dari JIM, yakni Badan Supervisi dan Pengawasan Internasional, Badan Pengawas Perdamaian Internasional, dan Komisi Internasional mengenai Penyelidikan Pelanggaran Hak Asasi Manusia; (2) sebagai rakyat Kamboja, dia mendukung usul lima pasal Pangeran Norodom Sihanouk; (3) penghentian bantuan asing kepada kelompok perlawanan di Kamboja bukan merupakan sesuatu hal yang penting, justru yang paling penting adalah bagaimana membuat penarikan mundur pasukan Vietnam dari negerinya merupakan langkah awal terciptanya perdamaian di Kamboja; (4) dia mengharapkan Menlu Vietnam bersedia mengadakan perundingan langsung dengan para kelompok perlawanan di Kamboja untuk membicarakan jadwal penarikan mundur pasukan Vietnam dari Kamboja, sekaligus menyampaikan keinginannya sehubungan dengan penarikan pasukan itu (*Kompas*, 28 Juli 1988).

C. HASIL PERTEMUAN

JIM berakhir tanpa suatu komunikasi atau pernyataan bersama. Tetapi Menlu Ali Alatas yang didampingi Menlu Singapura, Suppiah Dhanabalan, dan PM PRK, Hun Senn mengatakan kepada para wartawan setelah berakhirknya JIM itu bahwa: (1) JIM sepakat untuk membentuk suatu Kelompok Kerja tingkat pejabat senior dari semua peserta JIM untuk menelaah aspek-aspek khusus bagi penyelesaian masalah Kamboja; (2) Kelompok Kerja itu harus menyelesaikan tugasnya paling lambat bulan Desember 1988, dan membuat rekomendasi untuk pertemuan berikutnya, termasuk tempat, waktu, jenis pertemuan dan sebagainya (*Suara Karya*, 29 Juli 1988). Selanjutnya Menlu Ali Alatas mengatakan bahwa: (1) tujuan JIM adalah untuk menyediakan kerangka bagi diskusi informal di antara pihak-pihak yang terlibat langsung maupun yang berkepentingan atas penyelesaian Kamboja secara menyeluruh, adil dan langgeng; (2) semua peserta JIM menyetujui mengenai perlunya pemecahan masalah Kamboja secara politis, karena hal ini dapat memberikan sumbangsih bagi terciptanya perdamaian dan stabilitas kawasan Asia Tenggara; (3) semua pihak bersedia mengidentifikasi titik-titik temu penyelesaian masalah Kamboja; (4) terdapat kesamaan pengertian di antara para peserta JIM mengenai segera diakhiri kesengsaraan rakyat Kamboja dan perlunya segera mendirikan pemerintahan Kamboja yang berdaulat, netral dan nonblok berdasarkan penentuan nasib sendiri dan rekonsiliasi nasional; (5) terdapat kesamaan pendapat di antara para peserta JIM mengenai dua persoalan kunci untuk menyelesaikan masalah Kamboja, yakni penarikan mundur pasukan Vietnam dari Kamboja dan pencegahan terulangnya kembali pembantaian rakyat Kamboja oleh rezim Pol Pot, serta pemastian penghentian campur-tangan asing dan pengiriman senjata dari luar kepada pasukan-pasukan bersenjata Kamboja yang saling bertengangan; (6) para peserta JIM menganggap perlu kehadiran internasional untuk mengawasi proses tercapainya perdamaian di Kamboja; (7) semua peserta JIM mengakui bahwa masalah Kamboja itu kompleks, banyak dimensi dan seginya, oleh sebab itu memerlukan pembahasan lebih lanjut (*Merdeka*, 29 Juli 1988).

Para Penulis

- **BANDORO**, Bantarto,
Sarjana Hukum jurusan Hukum Internasional Publik, Universitas Indonesia, 1978; MA dalam Hubungan Internasional dari International University of Japan, Graduate School of International Relations, 1986; sejak 1980 menjadi anggota Departemen Hubungan Internasional (HI) CSIS, peneliti dan pengamat masalah Asia Timur, khususnya Jepang dan hubungannya dengan Amerika Serikat.
- **DIPOYUDO**, Kirdi,
Gelar Doktor dari Universitas Urbaniana, Roma (1961). Spesialisasinya adalah filsafat sosial. Mulai tahun 1972 menjadi staf peneliti CSIS, anggota Departemen Hubungan Internasional CSIS, mengamati masalah-masalah internasional termasuk kawasan Afrika dan Timur Tengah serta masalah-masalah yang berhubungan dengan filsafat sosial. Editor *Analisa* (1976-1984), Editor *The Indonesian Quarterly* (1984-1988), Ketua Departemen Hubungan Internasional (1979-1983).
- **JOESOEF**, Daoed,
Sarjana Ekonomi, Universitas Indonesia (1959). Certificat Doctorat de l'Université dari Faculté du Droit et des Sciences Économiques Université de Paris (1966) dan Diplôme d'Etudes Supérieurs (1969). Doctorat d'Etat di Université Pluridisciplinaire de Paris I (Panthéon-Sorbonne), 1973. Pengamat masalah-masalah strategi, perdamaian, pendidikan dan kebudayaan. Sampai sekarang Ketua Dewan Direktur CSIS. Pernah menjabat sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan pada Kabinet Pembangunan III (1978-1983) dan sebagai anggota Dewan Pertimbangan Agung (1983-1988).
- **RUKMO**, Endi,
Sarjana Muda dari Akademi Hubungan Internasional (AHI), Jakarta, 1979 dan MA dalam Hubungan Internasional dari Australian National University (ANU), Canberra, Australia, 1982; sebagai staf peneliti CSIS, meneliti dan mengamati masalah Asia Timur khususnya Cina. Sebelumnya, Anggota Tim Summary (Ringkasan Peristiwa) CSIS selama tahun 1976-1979.

Catatan:

tempel
perangko
di sini

Kepada:
Bagian Penerbitan
Centre for Strategic and
International Studies

Jl. Tanah Abang III/23-27
Jakarta 10160
Telepon: 356532-5



Jurnal berkala yang menyajikan tulisan-tulisan tentang berbagai masalah nasional dan internasional, diterbitkan oleh CSIS sejak 1971.

FORMULIR LANGGANAN

Harap dicatat sebagai pelanggan ANALISIS CSIS,

Nama :

Alamat :

Mahasiswa: Fakultas Universitas NIRM:

Untuk langganan selama 1 tahun (6 nomor), mulai No. Tahun

Uang langganan setahun Rp 15.000,00 (6 nomor) kami kirim melalui:

- Poswesel ke: Bagian Penerbitan, CSIS, Jalan Tanah Abang III/23-27, Jakarta 10160, atau
- Rekening CSIS Biro Publikasi, No. 31-45-4433-9 pada Bank Rakyat Indonesia Cabang Jakarta Tanah Abang, Jalan Tanah Abang III/4, Jakarta 10160.

Pelanggan:

Tgl. Pesanan: